

SENARAI ANTROPOLOGI PERKOTAAN

Kota merupakan ruang sentra kehidupan yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang maupun pendekatan keilmuan. Kehidupan masyarakat di wilayah perkotaan termanifestasi dalam perilaku, tindakan, maupun aktivitas kehidupan menjadi akses telaah antropologis. Kehidupan masyarakat juga dapat dilihat dari aspek fisik perkotaan yang akan memberikan kontribusi pada perilaku sosio-antropologinya (manusia dan struktur sosialnya).

Antropologi Perkotaan berasal dari dua istilah atau konsep, yaitu antropologi dan perkotaan. Makna dari istilah atau konsep antropologi perkotaan adalah pendekatan-pendekatan antropologi mengenai berbagai problematika kehidupan manusia sebagai kesatuan sosieta (masyarakat) maupun komunitas di wilayah perkotaan. Problematika perkotaan dimaksud merupakan permasalahan yang muncul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat kota, dan sekaligus menjadi ciri dari keberadaan kota itu sendiri yang membedakannya dengan kehidupan masyarakat di wilayah perdesaan.

Dalam peradaban modern, dominasi kota terhadap masyarakat perdesaan telah diidentifikasi dengan dua fenomena. Pertama, kontak desa dan kota telah menjadi lebih erat dan lebih banyak bila dibandingkan dengan sebelumnya. Kedua, penduduk kota semakin besar bila dibandingkan dengan desa. Persoalan yang lebih kompleks dan sulit diketahui memicu keunggulan masyarakat perkotaan daripada orang desa secara kualitas maupun kuantitas. Dimaksud kualitas di sini adalah kemampuan untuk mengantisipasi kebutuhan dan kepentingan masyarakat guna meningkatkan taraf dan mutu hidup anggotanya. Sementara yang dimaksud dengan kuantitas adalah jumlah dan aneka ragam lembaga pranata, dan sarana lain yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan anggotanya.

Masyarakat Perkotaan

Kota menurut definisi universal adalah sebuah area urban yang berbeda dari desa ataupun kampung berdasarkan ukurannya, kepadatan penduduk, kepentingan atau status hukum. Beberapa definisi (secara etimologis) “kota” dalam bahasa lain yang agak tepat dengan pengertian ini, seperti dalam bahasa Cina, kota artinya dinding, dan dalam bahasa Belanda (kuno): *tuijn*, bisa berarti pagar. Dengan demikian, kota dapat diartikan sebagai teritori atau ruang terbatas. Selanjutnya masyarakat perkotaan sering disebut juga *urban community*. Pengertian masyarakat kota lebih ditekankan pada sifat serta ciri kehidupannya yang berbeda dengan masyarakat pedesaan.

Ada beberapa ciri yang menonjol pada masyarakat kota, yaitu:

- 1) Kehidupan keagamaan berkurang bila dibandingkan dengan kehidupan keagamaan di desa.
- 2) Orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain.
- 3) Pembagian kerja diantara warga-warga kota juga lebih tegas dan mempunyai batas-batas yang nyata.
- 4) Kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan juga lebih banyak diperoleh warga kota daripada warga desa.
- 5) Jalan pikiran rasional yang pada umumnya dianut masyarakat perkotaan, menyebabkan bahwa interaksi-interaksi yang terjadi lebih didasarkan pada faktor kepentingan daripada faktor pribadi.
- 6) Perubahan-perubahan sosial tampak dengan nyata di kota-kota, sebab masyarakat kota biasanya lebih terbuka dalam menerima hal-hal baru.

Selain itu, setidaknya ada 6 (enam) kondisi yang dapat ditemukan sebagai karakter perangkat kehidupan masyarakat perkotaan:

- a) Pembagian kerja dalam spesialisasi yang jelas
- b) Organisasi sosial lebih berdasarkan pekerjaan dan kelas sosial dari pada kekeluargaan
- c) Lembaga pemerintahan lebih berdasarkan teritorial dari pada kekeluargaan
- d) Suatu sistem perdagangan dan pertukangan
- e) Mempunyai sarana komunikasi dan dokumentasi
- f) Berteknologi yang rasional

Makin besar pertambahan penduduk, makin menjadi jelas corak kota suatu tempat. Dalam rangka urbanisasi, tampaknya dipedesaan yang letaknya mengelilingi wilayah perkotaan, kepadatan penduduk mendorong manusia mencari nafkah dari bidang non-agraris seperti perdagangan, industri, dan perkantoran.

Ikatan sosial berdasarkan tradisi menjadi lemah, luntur atau menghilang. Dengan demikian perubahan-perubahan tersebut mengubah ikatan antar manusia, begitu pula bentuk-bentuk kehidupan dan pertanyaannya serta sikap rohaninya.

Masyarakat Kota Sebagai *Community*

Pernyataan dimaksud memiliki pengertian tentang keberadaan suatu kelompok individu sebagai warga dengan teritorial tertentu. Dengan demikian, suatu *community* (komuniti/komunitas) dengan teritori dimaksud bercirikan sebagai berikut: 1) berisi kelompok manusia; 2) menempati suatu wilayah geografis tertentu; 3) mengenal pembagian kerja dalam spesialisasi dengan fungsi-fungsi yang saling tergantung; 4) memiliki kebudayaan dan sistem sosial bersama yang mengatur kegiatan mereka; 5) para anggotanya sadar akan kesatuan serta kewargaan mereka dari *community*; dan 6) mampu berbuat secara kolektif menurut cara

tertentu. Komuniti dengan teritori tersebut dapat dibagi lagi berdasarkan ruang aktivitas kehidupannya menjadi empat jenis ruang komuniti: *Rural*, *Fringe* (pinggiran), *Town*, dan *Metropolis*.

Kultur Perkotaan

Secara lebih khusus, 'kultur' dapat juga dirumuskan sebagai tingkat kemampuan seseorang atau masyarakat untuk merumuskan maupun menciptakan ketentuan bagi pengaturan tata kehidupannya, dalam hubungannya dengan lingkungan sosial maupun lingkungan alam, serta tingkat kemampuan seseorang atau masyarakat itu untuk mematuhi dan menaati ketentuan-ketentuan itu. Dengan demikian, komunitas kota dapat dikatakan memiliki intensitas progres 'kultur'-itas yang tinggi. Komunitas kota lebih berorientasi kepada hal-hal yang bersifat material dan rasional sehingga hubungan menjadi impersonal dan sekunder, bukan lagi '*relation base emotional oriented*'. Individu menjadi teratomisasi dan teranomisasi sehingga setiap individu diharuskan menciptakan jalur eksistensi kehidupannya.

Begitu banyaknya dan bervariasi tuntutan dalam bertindak laku dan bertindak sebagai anggota masyarakat yang berorientasi pada (*goal*) dan pencapaian (*achievement*), maka, gaya hidup masyarakat kota lebih diarahkan pada penampilan fisik dan kualitas fisik sehingga tampak *civilized*. Gejala lain dalam komunitas kota adalah adanya kecenderungan masyarakat menjadi masyarakat massa (*mass society*) yang cenderung mengakibatkan individu kehilangan identitas pribadinya (*self identity*).

Peran penting kota yang mengawal kehidupan masyarakat adalah ketika kota menjelma sebagai pusat kekuasaan, ekonomi, pengetahuan, inovasi, dan peradaban. Kota kemudian menjadi ruang (ekspektasi) peningkatan kualitas hidup manusia. Keadaan ini sebanding dengan konsep '*civilized*' yang berarti kualitas tertinggi pada masyarakat manusia.

Kota dan Kelompok Kerabat

Sejalan dengan berkembangnya kota, terutama dalam hal jumlah penduduknya, maupun tuntutan sejumlah kebutuhan (ekonomi, politik, dan sosial budaya lainnya), maka, organisasi keluarga juga cenderung berkembang menjadi organisasi regional guna menghadapi situasi anomik, individualisme, dan lainnya yang bersifat disintegratif. Dengan kata lain, alasan fundamental pembentukan asosiasi regional adalah karena asosiasi ini dapat berfungsi secara efektif sebagai suatu mekanisme adaptif bagi kepentingan kehidupan masyarakat di wilayah perkotaan.

Asosiasi-asosiasi kerabat bersifat regional tersebut juga bertujuan untuk memodernisasi dan menempatkan kesejahteraan umum para anggotanya. Akan tetapi, keberadaannya turut mendukung eksistensi status ‘urban’ dengan implikasi munculnya kesadaran atas ‘kelas’ (sosial-ekonomi), berbeda dengan ‘rural sosiet’ yang relasi antar individunya lebih berdasarkan pada kesadaran ‘etnisitas’.

Kota dan Kemiskinan

Salah satu masalah yang mendapat sorotan dari para antropolog adalah masalah kemiskinan yang dialami oleh golongan tertentu dalam kota-kota besar. Budaya kemiskinan (*culture of poverty*) merupakan interpretasi kemiskinan sebagai gaya hidup yang bersifat integral, di mana terjadi bentuk-bentuk tertentu dari penyesuaian dan partisipasi terhadap dunia yang ada di sekelilingnya.

Kemiskinan di wilayah perkotaan umumnya berkaitan dengan kawasan pemukiman kumuh di perkotaan. Ada beberapa pendekatan utama yang sering diacu guna menangani masalah pemukiman kumuh tersebut, terutama oleh pihak pemerintah, yaitu: a) Sikap *laissez fair*, di sini pemerintah membiarkan bangunan perumahan liar mengikuti permainan ekonomi, b) *Alamist approach*, pendekatan yang memandang kehadiran pemukiman kumuh yang dihuni oleh kelompok warga miskin di perkotaan sebagai ancaman; c) Pendekatan parsial (*partial approach*), pemerintah memberikan subsidi kepada perusahaan swasta yang mendirikan perumahan bagi penduduk yang mampu membayar secara kredit, d) *Total approach*, pendekatan menyeluruh, pemerintah membangun perumahan berskala besar untuk kaum ekonomi lemah, dan e) Pendekatan progresif (*progressive approach*), pemecahan bersama penghuninya.

Urbanisasi

PJM. Nas (1979:42), berpendapat bahwa urbanisasi adalah proses yang digerakkan oleh perubahan-perubahan struktural dalam masyarakat, sehingga daerah-daerah yang dulu merupakan daerah pedesaan dengan struktur mata pencaharian yang agraris maupun sifat kehidupan masyarakat lambat laun atau melalui proses yang mendadak memperoleh sifat kehidupan kota. Urbanisasi yang berarti “gejala perluasan pengaruh kota ke pedesaan, baik dilihat dari sudut morfologi, ekonomi, sosial, maupun sosial-psikologis”.

Penelitian urbanisasi itu dapat dirinci ke dalam pengertian-pengertian berikut :

a. Arus perpindahan penduduk dari desa ke kota.

- b. Bertambah besarnya jumlah tenaga kerja non agraris di sektor industri dan sektor tersier.
- c. Tumbuhnya pemukiman menjadi kota.
- d. Meluasnya pengaruh kota di daerah-daerah pedesaan dalam segi ekonomi, sosial, budaya dan psikologi.

Tetapi pada umumnya orang mengartikan urbanisasi itu hanya sebagai mengalirnya perpindahan penduduk dari pedesaan ke kota-kota, dan dipandang sebagai penyebab utama terjadinya berbagai masalah sosial. Migrasi ke kota terjadi karena adanya perbedaan kemajuan antara kota dan desa. Kehidupan kota yang jauh lebih enak, banyak kesempatan kerja yang bisa diperoleh di kota, mengundang penduduk desa untuk datang ke kota.

Sikap Manusia Terhadap Kota

Dalam menilai kota terdapat polarisasi, yakni golongan kolot, yakni para lokalis yang lebih berpangkal pada emosi, pengamatan pribadi, dan nostalgia. Mereka berpendapat bahwa yang ada tak usah dirubah, demi nilai sejarahnya. Golongan *cosmopolitans*, menghendaki perubahan drastis, yakni supaya wajah kota dirubah, sehingga lebih nampak corak modern dan internasional. Bagi lokalis, ini berarti perlindungan terhadap yang ada sedangkan bagi *cosmopolitans*, itu berarti pemugaran yang disertai pertimbangan penggunaan ruang secara efektif dan kreatif.

Kota dan Proses Pengasingan

Dalam masyarakat modern di kota-kota besar sering terjadi apa yang disebut proses keterasingan (*alienation*). Proses terjadi karena orang tidak mempunyai perasaan ikut memiliki fasilitas, lembaga, dan kesempatan. Sehingga karena itu orang-orang terasing tersebut merasa tidak menjadi bagian dari masyarakat kota. Perasaan keterasingan menyebabkan hilangnya rasa tanggung jawab bahkan ketidakpedulian. Tidak adanya tanggung jawab dan kepedulian tersebut menimbulkan sikap non-partisipatif.

Itulah sebabnya kota-kota besar itu cenderung kotor. Sebab warganya tidak merasa ikut memiliki dan karena itu tidak merasa berkewajiban untuk memelihara berbagai fasilitas publik yang telah disediakan oleh pemerintah. Gejala kekotoran berkorelasi dengan kepadatan penduduk dan kemiskinan.

Kota dengan demikian diperlakukan sebagai konteks atau variabel yang menjelaskan keberadaan permasalahan yang ada di dalam kehidupan perkotaan, dan kota adalah juga sebagai permasalahan perkotaan itu sendiri.

Mata Kuliah : Antropologi Perkotaan
Bobot : 3 SKS
Dosen Pengampu : Pangeran P.P.A. Nasution, S.Sos., M.A.

Sumber Pustaka

Ansy'ari, S.I. 1993. Sosiologi Kota dan Desa. Surabaya: Usaha Nasional.
Basham, R. 1978. Urban Antrophology: The Cross-Culture Study of Complex Societies. United States of America: Mayfield Publishing Company.
Daldjoeni, N. 1977. Seluk Beluk Masyarakat Kota (Pusparagam Sosiologi Kota dan Ekologi Sosial). Bandung: P.T. Alumni.
Nas, d. P. J. M. 1979. Kota di Dunia Ketiga: Pengantar Sosiologi Kota. Jilid 1. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
Spreiregen, P. D. (1965). Urban Design: The Architecture of Towns and Cities. New York: McGraw-Hill Book Company.



Integrasi Sosial Golongan Miskin di Perkotaan: Kajian Kasus di Jakarta

Achmad Fedyani Saifuddin

(Universitas Indonesia)

Abstract

This study looks into the internal process of the urban poverty of Jakarta in terms of the flowering phenomena of building and maintaining specific social relations among the poor to fulfill their basic economic needs. These complex social relations and exchanges among the poor and non-poor—called social integration of the poor—make the boundaries between the two social categories blurred and flexible. The paradox of social and economic statuses of the people involved has made this integration possible. This phenomenon will make poverty reduction programs in Indonesia face more complicated problems.

Key words: Urban poverty; specific social relations; poverty as process; poverty paradox; social integration.

Pendahuluan

Masalah kemiskinan tak habis-habisnya dibicarakan orang karena—khususnya di Indonesia—fenomena kemiskinan semakin meluas dalam satu dekade terakhir. Semenjak krisis moneter pada tahun 1997, Indonesia belum mampu keluar dari kemelut ekonomi tersebut, dibandingkan misalnya negara-negara lain yang juga mengalami krisis yang sama seperti Malaysia, Thailand, dan Korea Selatan. Tiga negara tersebut terakhir telah berhasil pulih, dan bahkan mengalami kemajuan yang signifikan dalam tahun-tahun terakhir.

Masalah kemiskinan juga sudah sangat banyak dibicarakan orang, khususnya oleh para ahli ilmu sosial. Hingga tahun 1980an, tulisan ilmiah ilmu sosial diwarnai oleh dua cara berpikir dominan, yakni: pertama, cara berpikir yang

memandang kemiskinan sebagai gejala absolut; dan, kedua, cara berpikir yang memandang kemiskinan sebagai gejala relatif. Cara pandang relativistik ini terdiri atas dua cara pandang, yakni cara pandang (model) kebudayaan, dan cara pandang (model) struktural. Kemudian, bermula pada tahun 1990an, terjadi perkembangan baru dalam pendekatan terhadap kemiskinan, yakni memandang kemiskinan sebagai proses. Cara pandang yang terakhir ini semakin menguat dalam dua dekade terakhir, meski di Indonesia baru saja dikenal. Secara singkat, penulis uraikan cara pandang di atas satu per satu di bawah ini.

Cara berfikir (model) mengenai kemiskinan sebagai gejala absolut memandang kemiskinan sebagai kondisi serba berkekurangan materi, hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak

memiliki sarana untuk mendukung kehidupan sendiri. Para ahli sependapat bahwa setiap orang yang berkekurangan materi dan sarana untuk tetap hidup termasuk dalam kategori miskin, meskipun batas yang disebut “kekurangan” itu bisa bergeser sesuai dengan ukuran kesepakatan pada ahli dan pembuat kebijakan mengenai “kebutuhan minimum” bagi mempertahankan efisiensi fisik”, atau yang kerap kali disebut juga sebagai “garis kemiskinan” pada tingkat subsistensi pada masa tertentu.

Memandang kemiskinan sebagai gejala relatif adalah kriteria yang berasas arbitrer sehingga kemiskinan mungkin justru berada dalam fraksi tertentu orang-orang yang berpenghasilan rata-rata atau di bawahnya. Dengan menggunakan model kemiskinan absolut, lebih sedikit orang yang termasuk dalam kategori miskin daripada kalau menggunakan model kemiskinan relatif. Model kemiskinan relatif, meskipun lebih menggambarkan realita empirik yang penting bagi tujuan penelitian ilmiah sosial namun batas-batasnya seringkali kabur bagi tujuan pembuatan kebijakan. Batas-batas yang kabur ini menggambarkan relativitas dinamik dari golongan miskin sebagaimana ditemukan dalam realitas empirik. Ada pun model yang menggambarkan batas-batas tersebut adalah yang memandang kemiskinan sebagai kebudayaan dan struktur sosial.

Cara pandang kebudayaan berpendapat bahwa kebudayaan dapat memantapkan kemiskinan. Kemiskinan adalah cara hidup yang dikembangkan dan ditransmisikan dari generasi ke generasi. Sebagai cara hidup maka kemiskinan berfungsi mengembangkan seperangkat *coping mechanism* yang dapat menimbulkan konsekuensi-konsekuensi negatif seperti kehidupan yang kacau, hilangnya masa kanak-kanak dalam siklus

kehidupan orang miskin, maraknya gejala hidup bersama tanpa menikah, maraknya gejala tindak kriminal, banyaknya anak-anak yang ditinggalkan orang tua. Selanjutnya, orang miskin semakin jauh dari partisipasi dan integrasi ke dalam masyarakat yang lebih luas. Orang miskin dipandang sebagai satuan sosial yang diskret, yang menyandang suatu kebudayaan yang disebut kebudayaan kemiskinan yang khas distinktif, yang berbeda dari masyarakat lain di luarnya (Lewis 1961; 1966)

Cara pandang struktural berpendapat bahwa struktur sosial memantapkan kemiskinan. Tekanan-tekanan struktural seperti politik dan ekonomi mengakibatkan sejumlah orang dalam populasi terdorong ke posisi yang tidak menguntungkan. Sebagai bagian dari struktur, mereka tidak atau kurang mampu menghadapi struktur yang demikian kuat, sehingga secara relatif tetap lemah dalam posisi itu (Valentine 1968).

Meskipun kedua model ini memiliki penekanan yang berbeda—kebudayaan dan struktur sosial dalam tulisan ini adalah dua dimensi analisis yang berbeda—keduanya berada dalam ruang paradigma struktural-fungsionalisme yang sangat berpengaruh dalam ilmu-ilmu sosial, paling tidak hingga akhir 1970an di negara-negara maju, dan hingga kini di Indonesia. Kedua model ini memandang masyarakat (miskin) sebagai suatu kesatuan sosial yang secara budaya khas, tunggal, dan memiliki batas-batas yang tegas (*culturally distinctive*).

Sebagai konsekuensi dari cara memandang kemiskinan dan orang miskin di atas, kebijakan-kebijakan yang disusun untuk menanggulangi kemiskinan mencerminkan cara berpikir atau paradigma tersebut, yakni: pertama, menempatkan orang miskin sebagai obyek yang menjadi sasaran penanggulangan kemiskinan, dan pihak yang menanggulangi (pemerintah dan

badan-badan lain yang terkait), menyusun rencana-rencana menurut apa yang mereka pikirkan tanpa melibatkan orang miskin yang menjadi sasaran; kedua, orang miskin dipandang sebagai orang yang tidak berdaya, lemah, dan apatis karena mereka memiliki kebudayaan kemiskinan (Lewis 1961; 1966) sehingga mereka perlu dibantu sepenuhnya melalui program-program yang dibangun dari “atas” (pemerintah); ketiga, orang miskin dipandang sebagai tidak berdaya, lemah, dan apatis karena mereka terkungkung dan terkurung oleh kendala-kendala struktural yang datang dari luar diri mereka. Oleh karena itu, pemerintah perlu membantu mereka dengan menghilangkan atau mengurangi kendala-kendala struktural tersebut.

Dapat kita cermati bahwa program-program penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah Indonesia selama ini kuat dipengaruhi oleh pemikiran di atas. Sebagai contoh belakangan ini adalah kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang membagikan bantuan uang sebesar Rp. 100.000,- per kepala keluarga bagi orang miskin untuk mengurangi beban akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Dalam pemberian bantuan ini jelas sekali kriteria siapa miskin dan tidak miskin berasal dari model yang dibawa pihak luar orang miskin, yakni pemerintah dan aparatusnya, sebagaimana terkandung dalam paradigma di atas.

Mencermati model-model pemikiran mengenai kemiskinan di Indonesia, maka tulisan ini membahas kemiskinan dari perspektif yang berbeda—suatu hal yang relatif baru di Indonesia—yakni kemiskinan sebagai proses. Dalam pendekatan ini realita empiris adalah terpenting, yang dari realita ini model-model kebijakan baru dalam menanggulangi kemiskinan dapat dibangun, sehingga penanggulangan kemiskinan itu sesuai dengan realitas empirik yang sesungguhnya.

Masalah penelitian

Kemiskinan sebagai proses

Pendekatan proses mengenai kemiskinan baru saja dikenal di Indonesia. Untuk sebagian besar, pendekatan yang digunakan di ruang ilmiah maupun praktis masih didominasi pendekatan kebudayaan dan struktural sebagaimana dibicarakan di atas. Kedudukan dan otoritas peneliti—dan pemerintah dalam konteks praktis—dominan dalam pendekatan kebudayaan (lihat Lewis 1961; 1966) dan struktural (lihat Valentine 1968) mengenai kemiskinan. Dengan kata lain, “orang miskin” dalam kedua model kemiskinan ini dilihat sebagai obyek, baik sebagai sasaran penelitian maupun sebagai sasaran program kebijakan.

Dalam pendekatan proses, peneliti berupaya mengungkapkan kemiskinan menurut apa yang sesungguhnya terjadi dalam realitas empirik. Orang miskin diposisikan sebagai subyek yang berpikir dan bertindak, mengembangkan strategi-strategi dan kiat-kiat agar bertahan hidup. Mengikuti cara berfikir proses tersebut, maka masalah penelitian ini adalah bahwa orang miskin—sebagaimana halnya orang yang tidak miskin—mengembangkan hubungan-hubungan sosial khusus di antara sesama orang miskin maupun orang-orang yang tidak miskin berdasarkan kompleks kepentingan satu sama lain, yakni mempertahankan hidup (dalam hal ini berarti memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendasar). Penulis berasumsi bahwa: pertama, kompleks keterjalanan hubungan-hubungan sosial yang khas ini membangun suatu integrasi sosial orang-orang miskin dan tidak miskin sedemikian, sehingga batas-batas golongan miskin yang diasumsikan dalam pendekatan kebudayaan dan struktural di atas menjadi baur. Kedua, sebagai konsekuensi dari hubungan-hubungan sosial yang khas tersebut, maka akumulasi totalitas hubungan sosial dan tindakan sosial

yang terwujud berimplikasi mundurnya kondisi kehidupan perkotaan, karena hubungan-hubungan sosial yang tidak formal semakin penting, dan bahkan kadang-kadang lebih penting daripada aturan-aturan formal dalam menentukan arah tindakan.

Sumber data dan metode

Penelitian ini memiliki sejarah yang panjang, yakni semenjak tahun 1983, ketika suatu survei dilakukan untuk mengetahui kehidupan masyarakat miskin di suatu lokasi di Jakarta Timur. Penelitian ini kemudian berlanjut pada tahun 1985 yang memusatkan perhatian pada struktur dan kehidupan rumah tangga miskin di lokasi yang sama. Pengamatan pada tahun 1991 menemukan tema-tema penting seperti fleksibilitas struktur rumah tangga miskin yang secara kualitatif dapat dipandang sebagai petunjuk adaptasi terhadap kondisi kemiskinan. Keanggotaan rumah tangga yang meningkat merupakan indikasi kemiskinan yang semakin berat, sehingga struktur rumah tangga harus selalu disesuaikan atau dimodifikasi agar mampu merespon kondisi tersebut. Akhirnya, penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2002 dan 2004 mengembangkan tesis integrasi golongan miskin di perkotaan yang merupakan implikasi dari fleksibilitas struktur, hubungan-hubungan sosial yang khas, dan proses adaptasi internal terhadap kondisi kemiskinan yang semakin berat. Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik pengamatan dan wawancara mendalam.

Data dan analisis

Ekonomi golongan miskin di Jakarta paling tepat dipahami dalam konteks yang luas sistem ekonomi Jakarta dan nasional. Dengan kata lain, kehidupan ekonomi golongan miskin di kota Jakarta dipengaruhi dan diberi corak oleh kehidupan sosial-ekonomi masyarakat yang lebih luas. Hal ini karena golongan miskin di

Jakarta tidak memiliki karakteristik distinktif dan diskret sebagaimana diasumsikan dalam pendekatan kebudayaan maupun struktural yang memandang orang miskin sebagai kelompok yang memiliki ciri-ciri khas tertentu. Pendekatan kemiskinan sebagai proses tidak memandang orang miskin dan yang tidak miskin memiliki batas-batas yang tegas satu sama lain, melainkan ada hubungan interaksi yang intensif satu sama lain. Ada konteks-konteks tertentu di mana kepentingan-kepentingan khusus mengikat kedua belah pihak, membangun kerjasama, mewujudkan integrasi sosial di antara keduanya.

Hubungan sosial sebagai adaptasi

Kajian-kajian kemiskinan di perkotaan di Indonesia—dan khususnya, Jakarta—sebelumnya terutama menekankan tiga strategi penting: pertama, mengalami bersama keadaan miskin dan memiliki bersama sumberdaya; kedua, melakukan aneka pekerjaan; dan, ketiga, kombinasi dari beberapa pekerjaan. Kebanyakan kajian tersebut berorientasi pada statistik ekonomi dan demografi kombinasi pekerjaan dan hasil berupa uang yang diperoleh (lihat misalnya, Evers 1982; 1989).

Berbeda dari strategi-strategi di atas, artikel ini mengulas kemiskinan di perkotaan dalam konteks jalinan hubungan-hubungan sosial yang khas—sebagian ahli menyebutnya hubungan sosial informal yang dikontraskan dari hubungan sosial formal—yang berpusat pada pemenuhan kebutuhan ekonomi. Hubungan-hubungan sosial tersebut bersifat adaptif dalam menghadapi tekanan ekonomi yang semakin meningkat baik lokal maupun nasional. Proses adaptasi berjangka panjang ini mengakibatkan terwujudnya golongan miskin di kota yang secara dominan bersifat massal, konservatif, dan berorientasi ke dalam—bukan mengembangkan reaksi keluar, misalnya, secara masif menentang kebijakan ekonomi

pemerintah. Kompleksitas dan kerumitan hubungan sosial yang khas ini mendorong proses perkotaan yang involutif, suatu proses yang analog dengan involusi pertanian yang dikemukakan C.Geertz (1963).

Berikut ini penulis mengemukakan dua kasus hubungan sosial yang khas yang merefleksikan fenomena integrasi golongan miskin yang diasumsikan dalam penelitian ini. Dari banyak kasus yang menunjukkan pola-pola hubungan sosial di kalangan orang miskin di perkotaan peneliti memilih menampilkan dua pola yakni pola horisontal kerabat dan bukan-kerabat, dan pola vertikal bukan kerabat, yang keduanya berkaitan satu sama lain. Alasan pemilihan pola tersebut adalah sebagai berikut: pertama, kedua pola ini mengindikasikan ciri-ciri paradoks kemiskinan di perkotaan Indonesia, yang di atas ciri paradoks tersebut hubungan integrasi golongan miskin dan tidak miskin dibangun dan dipelihara; kedua, kedua pola ini mengindikasikan bahwa orang miskin di perkotaan tidaklah terisolir dari lingkungan mereka yang lebih luas, yakni suatu jaringan sosial yang berusaha memenuhi kepentingan-kepentingan ekonomi yang mendasar, bukan kelompok sosial yang memiliki ciri distinktif.

Hubungan horisontal kerabat dan bukan-kerabat

Hubungan sosial ini bersifat horizontal dan simetris yang dicirikan oleh kesamaan status sosial-ekonomi yang rendah dari anggota-anggota rumah tangganya. Kompleks hubungan sosial ini dikembangkan oleh dua atau lebih rumah tangga yang memiliki atribut-atribut yang kurang lebih sama, yakni status pekerjaan (orang-orang yang terlibat mengakui status pekerjaan mereka yang rendah), latar belakang etnik (termasuk dalam hal ini kekerabatan, pertemanan, dan ketetanggaan), dan tingkat pendidikan yang rendah (sekolah dasar hingga sekolah lanjutan pertama).

Hubungan-hubungan sosial khas yang dipresentasikan di sini adalah dari rumah tangga pak Bs, berasal dari Tegal, Jawa Tengah. Pak Bs pindah ke Jakarta pada tahun 1972. Pada mulanya ia menyewa satu kamar, berdekatan dengan rumah keluarga lain yang juga berasal dari Tegal. Dengan bantuan sesama orang Tegal yang cukup banyak tinggal di sekitar daerah itu ia bekerja di tempat pembuatan tempe dan tahu. Bs merasa cukup aman tinggal di situ karena pergaulan sehari-hari dengan para tetangga yang sama-sama berasal dari Tegal tak ubahnya seperti di kampung halaman. Dua tahun kemudian ia membawa kedua orang tuanya, yang juga petani tak bertanah, ikut bergabung tinggal di Jakarta, dan ikut bekerja membuat tahu dan tempe. Dua adik laki-lakinya yang belum menikah kemudian juga pindah ke Jakarta. Hanya dalam waktu tiga tahun, rumah tangga Bs sudah berkembang menjadi lima orang. Bs menikah dengan anak tetangganya sendiri yang juga berasal dari Tegal. Dua keluarga yang tadinya bertetangga kini menjadi kerabat karena perkawinan. Apabila anggota rumah tangga sibuk, anak pak Bs yang masih kecil dititipkan pada kerabat yang tinggal bersebelahan itu.

Beberapa tahun kemudian dua saudara laki-lakinya yang sudah menikah juga memutuskan pindah ke Jakarta. Pada mulanya mereka tinggal bersama pak Bs; seperti yang lain, keduanya diperkenalkan dengan urusan membuat tempe dan tahu. Bedanya adalah bahwa pak Bs sudah memiliki tempat pembuatan tahu dan tempe sendiri. Tempat pembuatan makanan tradisional Jawa ini kini menjadi perusahaan keluarga. Anggota keluarga yang pendatang baru diajari cara membuat tempe dan tahu, meningkatkan mutu, menjualnya di warung-warung, dan mencari dan mempertahankan pelanggan. Untuk diketahui, dalam komunitas tersebut cukup banyak rumah tangga yang memproduksi dan menjual tempe dan tahu.

Saudara laki-laki Bs, yakni Hn dan Ms, masing-masing membawa istri-istri mereka yang membawa konsekuensi hubungan kekerabatan yang penting. Anggota keluarga istri Hn dan Ms yang kini tinggal di wilayah pemukiman yang sama terdiri dari seorang saudara perempuan yang belum menikah, seorang keponakan perempuan yang sudah menikah dan membentuk keluarga inti sendiri, serta seorang keponakan perempuan yang belum menikah. Kedua perempuan yang belum menikah ini bekerja sebagai pembantu rumah tangga di luar lingkungan pemukiman mereka. Keduanya tinggal di rumah majikan mereka, dan hanya kadang kala pulang ke rumah, khususnya ketika hari libur atau lebaran.

Dari rumah tangga Pak Bs, baiklah kita perhatikan rumah tangga lain yang menggambarkan corak hubungan yang sama, yakni rumah tangga Ibu Km. Ketika penelitian dilakukan pada tahun 1991, peneliti menemukan situasi berikut: Suatu hubungan resiprositas berkembang antara kedua saudara perempuan (Ibu Km dan ibu Ks), dan keponakan perempuan yang sudah menikah (Ibu Su), dua anak perempuan yang belum menikah yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, dan dua laki-laki yang belum menikah yang ketika itu sedang bekerja musiman. Ruang kamar yang dahulu ditempati, kini diisi oleh seorang teman baik yang ketika itu belum menjadi anggota keluarga. Namun, tak lama setelah itu, teman baik ini menikah dengan salah seorang anggota keluarga Ibu Km sehingga jalinan hubungan pertemanan berubah menjadi kerabat pula. Seperti halnya rumah tangga pak B, rumah tangga Ibu Km juga terbentuk dan berkembang atas dasar kepentingan ekonomi pada anggotanya.

Dari dua contoh di atas, kita mempunyai gambaran yang jelas bagaimana hubungan-hubungan sosial resiprositas yang kompleks terjadi, baik dalam kaitan kerabat maupun

bukan-kerabat, dan ketetanggaan. Situasi umum adalah cair karena anggota rumah tangga datang dan pergi tergantung pada kejadian-kejadian dan kesulitan ekonomi yang dihadapi di desa asal. Hubungan kerjasama pun bisa berkurang apabila salah seorang yang terlibat mengalami perbaikan ekonomi secara individual. Hubungan ibu Ks dengan yang lain pernah merenggang lantaran suaminya pada suatu ketika memperoleh uang (biasanya disebut “rejek”) yang cukup banyak, sehingga memungkinkan ibu Ks membeli beberapa peralatan rumah tangga. Pada saat itu ibu Ks mengurangi partisipasinya dalam hubungan resiprositas. Hal ini pernah menimbulkan gosip tentang keluarga Ks, yang dianggap “sudah kaya, sudah sombong dan pelit”.

Hubungan vertikal kerabat dan bukan-kerabat

Berbeda dari hubungan horizontal simetris yang telah diuraikan di atas suatu hubungan vertikal yang tidak simetris merupakan pola kedua yang ditemukan dalam penelitian lapangan. Pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan ini tidak setara dalam pengertian akses kepada uang, barang, dan jasa yang merupakan dasar pertukaran ini. Meminjam istilah Claude Fischer (1992 [1987]) bahwa kata kunci dalam suatu hubungan tukar-menukar adalah akses kepada komoditi. Komoditi yang dimaksud diasumsikan langka, dan terakumulasi secara “terorganisir” pada lokus-lokus tertentu dalam masyarakat. “Patron yang potensial tidak harus memiliki sendiri komoditi tersebut, namun melalui perantaraannya, komoditi tersebut dapat diraih oleh orang-orang luar tertentu secara ‘terseleksi’ dan membuka akses bagi klien kepada komoditi tersebut dengan imbalan tertentu bagi patron” (Fischer 1992[1987]: 129; lihat juga, Greenfield 1983 [1978]).

Kasus pak Bs dalam hubungan horizontal kerabat dan bukan kerabat di atas bukanlah

kasus yang terisolir. Rumah tangga luas Bs tidak mengembangkan kebudayaan distinktif sebagaimana diasumsikan para ahli yang kulturalis—sebagaimana tercermin dalam konsep kebudayaan kemiskinan—maupun yang strukturalis—sebagaimana tercermin dalam konsep kemiskinan struktural, melainkan meluas ke pola hubungan yang lain, yakni hubungan vertikal kerabat dan bukan-kerabat. Oleh karena itu strategi mempertahankan kehidupan di perkotaan sebenarnya melibatkan spektrum hubungan social yang lebih luas daripada yang diasumsikan oleh kedua pendekatan di atas.

Hubungan vertikal dapat dilihat sebagai mekanisme patronase yang komplementer bagi institusi formal dalam masyarakat, yang meski pun dipandang menyimpang dari hukum formal justru mendorong sistem fungsional. Fungsi tersebut mendorong gerakan barang dan jasa dari satu orang ke orang lain baik horisontal maupun vertikal (Eisenstadt dan Roniger 1984). Melalui bekerjanya kedua pola ini maka sistem masyarakat secara total dapat bekerja bersama-sama. Kasus hubungan vertikal di bawah ini mengilustrasikan dinamika internal struktur sosial golongan miskin tersebut.

Pak Dj, saudara sepupu pak Bs, adalah seorang pegawai negeri pada salah satu divisi di Bandara Sukarno Hatta, Jakarta. Sebagai pegawai menengah-bawah, gaji pak Dj hanya Rp. 950.000.-, per bulan, suatu jumlah yang jauh di bawah kebutuhan dasar keluarganya, yakni Rp. 1.800.000.- per bulan. Penghasilan sebesar itu hanya cukup untuk seminggu bagi keluarganya dengan tanggungan istri dan tiga anak yang masih kecil. Pak Dj beruntung punya atasan, pak Sn, yang kebetulan saudara sepupu istrinya. Dengan koneksi pak Sn, pak Dj memperoleh pekerjaannya sekarang. Pak Sn memahami masalah keuangan pak Dj, dan secara diam-diam dia mengatur jadwal pe-

kerjaan Dj sedemikian fleksibel agar dia bisa mencari penghasilan tambahan. Ia memperkenalkan pak Dj kepada pak Mu, yang dulu pernah sekelas dengan pak S di suatu sekolah menengah atas di Jawa Tengah. Pak Mu bekerja sebagai kepala bagian *ticketing* di bandara tersebut, dan dianggap sebagai “orang kuat” oleh bawahannya karena hubungan baiknya dengan polisi dan aparat bandara lainnya. Sebenarnya pak Mu hanya pegawai golongan menengah-bawah dengan penghasilan pokoknya tak lebih baik dari pak Dj, tetapi tak seorang pun menyangkal bahwa keadaan ekonomi pak Mu jauh lebih baik dari rekan-rekannya yang lain. Ia mempunyai mobil dan rumah yang bagus, suatu hal yang mustahil dimiliki oleh seorang pegawai dengan jenjang penggajian yang sama. Pak Mu beruntung karena bekerja di tempat “basah”.

Dengan sepengetahuan pak Mu, pak Dj menjadi “perantara tak resmi” bagi orang-orang yang membutuhkan tiket segera. Ia menghabiskan waktu berjam-jam berdiri tak jauh dari loket penjualan tiket pesawat. Sebenarnya ia sudah “bekerja sama” dengan petugas loket untuk mengatakan kehabisan tiket apabila ada calon pembeli langsung datang ke loket. Pelayanan *shuttle flight* adalah yang paling banyak karena pembeli biasanya harus langsung membeli di bandara, dan pelayanan ini tidak tersedia di agen-agen perjalanan. Akan tetapi bagi pak Mu dan rekan-rekannya, pelayanan ini merupakan peluang untuk mencari penghasilan tambahan. Pak Mu sudah melakukan praktik tersebut selama bertahun-tahun, tetapi kini ia lebih banyak berada di belakang layar. “Anak buah”nya yang melakukan langsung di lapangan, dan dia hanya menunggu “setoran” tanpa harus tampil langsung seperti dahulu.

Para calon penumpang yang sedang kebingungan adalah sasaran empuk. Biasanya mereka tidak akan menawar-menawar lagi harga

tiket dan bersedia membayar lebih tinggi karena sedang sangat membutuhkan. Agar permainan harga ini nampak bersih, pak Dj menjelaskan kepada calon penumpang bahwa selisih harga tiket itu adalah uang lelah mencari tiket. Sebagian penumpang tidak terlalu mempersoalkan selisih harga itu karena mereka dalam kondisi darurat.

Namun tak jarang penumpang menjadikan hal ini persoalan serius. Mereka merasa ditipu orang-orang di Bandara. Mereka melapor ke Pos Polisi Bandara. Komandan Pos Polisi, AKP Wd, menginstruksikan anak buahnya untuk menangkap para perantara itu dan menggiringnya ke pos polisi. Satu hal yang patut diketahui adalah bahwa pak Wd adalah teman baik pak Mu, yang bermain di belakang layar. Pak Mu mengunjungi pak Wd di rumahnya untuk menyelesaikan persoalan ditangkapnya pak Dj. Persoalan itu cepat beres, pak Dj hanya ditahan beberapa jam dan kemudian dibebaskan.

Pak Sn, atasan yang sekaligus kerabat pak Dj, sangat marah. Dia mengancam tidak akan memberi peluang lagi kepada pak Dj untuk bebas keluar kantor kalau terjadi lagi peristiwa yang memalukan itu. Peluang kebebasan itu diberikannya agar pak Dj dapat memperoleh penghasilan tambahan untuk keluarganya. Apalagi nama pak Sn dibawa-bawa sebagai atasan ketika pak Dj diinterogasi polisi. Pak Sn menyuruh pak Dj minta maaf kepada pak Mu atas kejadian itu, dan memberikan sejumlah uang sebagai tanda dilanjutkannya kerjasama. Dalam pertemuan itu pak Dj mengakui bahwa semua kejadian itu adalah kesalahannya, dan berjanji akan lebih santun dan halus kepada calon penumpang agar mereka merasa tak tertipu.

Isu kunci dalam kasus di atas bukan tentang pak Dj, pak Sn, pak Mu, atau pak Wd. Akar persoalannya adalah pada hubungan-hubungan sosial yang khas terjalin di antara mereka demi memperoleh penghasilan tam-

bahan. Ada aturan-aturan yang mereka kembangkan dalam berhubungan satu sama lain agar jaringan ini terpelihara. Itulah sebabnya peristiwa penangkapan pak D, meski pun kejadian ini merupakan pemandangan sehari-hari di mana pun di Jakarta, tetap sangat penting karena menyangkut masa depan kerjasama. Setiap ada penghasilan tambahan, di sana adalah pembagian berdasarkan aturan kesepakatan bersama yang harus ditaati secara ketat. Pembagian hasil tidak hanya sebatas mereka berempat, karena rekan-rekan lain yang melihat, mengetahui, atau mendengar juga mendapat bagian berdasarkan aturan. Oleh karena itu dikenal beberapa istilah seperti “uang dengar”, “uang diam”, dan sebagainya. “Uang dengar” adalah uang yang diberikan kepada seorang rekan yang mengetahui langsung rejeki tambahan itu tanpa terlibat, dan “uang diam” diberikan kepada seorang rekan yang mengetahui pak Dj keluar kantor pada jam kerja, tetapi diam saja. Menurut pak Dj, rekan ini harus mendapat bagian karena kalau tidak, ia bisa saja “buka mulut” setiap saat sehingga dapat membahayakan kondisinya di kantor.

Implikasi penelitian

Meski tulisan ini hanya mengangkat dua kasus, namun dikembangkannya hubungan-hubungan sosial seperti di atas adalah fenomena umum di Jakarta. Sesuai dengan paradigma kualitatif yang bekerja dalam kajian ini, kedua kasus ini merefleksikan fenomena yang lebih luas tersebut. Suatu refleksi teoretis yang penulis sebut integrasi sosial golongan miskin dan akibat praktisnya yang dikemukakan di bawah ini.

Integrasi sosial golongan miskin

Kemiskinan di perkotaan sudah banyak dibicarakan para ahli, namun pendekatan yang dominan digunakan adalah pendekatan survei dalam tradisi kuantitatif. Hipotesa kota-kota

primat di Asia Tenggara yang dikembangkan T.G.McGee (1968) misalnya, cukup dekat dengan situasi perkotaan di Indonesia. Hipotesa ini dikembangkan lebih lanjut oleh H.D.Evers (1982[1972]; 1989) untuk menjelaskan gejala kemunduran perkotaan di Asia Tenggara, dan khususnya Jakarta. Akan tetapi, perlu kita catat bahwa pendekatan para ahli ini tetap berakar pada paradigma kuantitatif yang memandang kemiskinan sebagai agregat dan frekuensi dari atribut kemiskinan tertentu.

Pendekatan kualitatif terhadap kemiskinan di perkotaan diwarnai oleh cara pandang mikro yang menanggapi orang-orang miskin sebagai kelompok yang memiliki suatu kebudayaan yang distinktif, yang berbeda dari masyarakat yang lebih luas. Cara pandang ini sangat dipengaruhi oleh tradisi struktur dan fungsi dalam antropologi yang pada masa lampau lebih banyak memperhatikan masyarakat sederhana atau masyarakat pedesaan yang secara metodologi memenuhi persyaratan idiosinkratik tersebut. Oleh karena orang miskin dipandang memiliki kebudayaan yang khas, maka sebagai konsekuensi dari memandang kebudayaan sebagai pedoman hidup, maka kemiskinan mewujudkan suatu kebudayaan kemiskinan yang khas pula (lihat Lewis 1966; lihat juga Valentine 1968).

Konsekuensi lain dari melihat suatu kelompok miskin sebagai penyandang suatu kebudayaan kemiskinan, maka kelompok ini dipandang minoritas dan terisolasi dan perlu dikembangkan program-program khusus untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Di Amerika Serikat, misalnya, dikenal program-program seperti Women and Infant Care (WIC), Food Stamp Program (FSP), dan lain-lain. Di satu sisi program-program ini meningkatkan kesejahteraan kelompok miskin, tetapi di sisi lain justru memperkuat label orang miskin yang inferior karena mereka yang mendapat dan tidak mendapat bantuan program jelas terlihat.

Strategi orang miskin dalam menanggulangi kebutuhan hidup memperoleh perhatian dari para antropolog pada tahun 1970an hingga 1980an. Dapat dicatat beberapa kajian antara lain dari W.F.Whyte (1972), C. Stack (1974), U.Hannerz (1976), dan M.Williams (1980) yang memusatkan perhatian pada proses internal orang berkulit hitam Amerika Serikat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, namun kajian-kajian ini sangat kurang memperhatikan hubungan-hubungan sosial orang miskin tersebut dengan masyarakat yang tidak miskin di luar mereka. Orang berkulit hitam Amerika Serikat dilihat sebagai kelompok minoritas, memiliki latarbelakang sejarah perbudakan yang panjang, dan latarbelakang tersebut turut membentuk stereotip dan prasangka terhadap golongan miskin ini.

Arus pemikiran baru dalam memandang kemiskinan mungkin dimulai secara bermakna melalui tulisan N.S. Hughes (1992) yang berpendapat bahwa orang miskin maupun orang yang tidak miskin memiliki kapasitas dan potensi untuk mengembangkan strategi-strategi kreatif maupun manipulatif dalam menghadapi lingkungannya. Dengan menggunakan kasus kemiskinan di perkotaan Brasil, Hughes menunjukkan bahwa sukar membuat garis tegas batas-batas antara kedua golongan tersebut, terlebih populasi orang miskin di perkotaan Brasil sangat besar. Gambaran ini nampaknya mirip dengan yang terjadi di perkotaan Indonesia, khususnya Jakarta.

Paradok kemiskinan

Kedua pola hubungan sosial di atas—horizontal kerabat dan bukan-kerabat dan vertikal kerabat dan bukan kerabat—tidaklah terpisah satu sama lain. Setiap jaringan hubungan dapat dimulai dari pak Bs, atau dapat juga dimulai dari pak Dj, karena keduanya juga dipertautkan oleh faktor kerabat dengan jenis kepentingan yang berbeda atau berubah sesuai konteks.

Keterjalinan hubungan yang kompleks seperti ini mengakibatkan kaburnya batas-batas kemiskinan itu sendiri. Variasi individual dalam konteks ekonomi rumah tangga juga menonjol, sehingga secara individual setiap anggota rumah tangga tidak dapat dikatakan miskin.

Status sosial berdasarkan definisi kebudayaan secara umum sejalan dengan status ekonomi yang biasanya diukur menurut tingkat penghasilan. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, jenjang pendidikan dan pengalaman bekerja menentukan besar gaji yang diperoleh. Semakin tinggi pendidikan, semakin besar gaji yang diterima. Dalam kasus Indonesia, jenjang pendidikan tidak selalu menentukan besar penghasilan. Meski pun pak Wd menyandang status sosial yang lebih tinggi sebagai perwira pertama polisi dibandingkan pak Dj, pak Sn, atau pak Mu, yang pegawai menengah-bawah, penghasilan total sebulan lebih rendah dari ketiga rekannya itu. Dalam banyak kasus, penghasilan pedagang makanan di kaki lima Jakarta—yang menyandang status sosial yang lebih rendah—jauh lebih besar daripada penghasilan pegawai negeri golongan III yang menyandang gelar sarjana—yang menyandang status sosial yang lebih tinggi. Namun, kesenjangan tingkat penghasilan itu dikurangi melalui kompleks atas hubungan-hubungan kerjasama yang khas dan saling menguntungkan, suatu fenomena yang penulis sebut integrasi sosial golongan miskin.

Akibat praktis

Dua kasus yang diangkat dalam tulisan ini hanya contoh dari banyaknya kasus serupa di perkotaan Indonesia, khususnya Jakarta. Oleh karena itu sangat penting kita cermati akibat praktis dari maraknya gejala tersebut. Pertama, kemiskinan perkotaan di Indonesia—khususnya Jakarta—tidak dapat ditanggapi semata-mata dengan konsep masyarakat dan kebudayaan distinktif, yakni memandang

orang miskin sebagai kelompok yang khas dengan batas-batas yang tegas. Penelitian ini jelas menunjukkan bahwa istilah golongan lebih sesuai diterapkan daripada istilah kelompok, untuk menunjukkan bahwa batas-batas tersebut longgar, kabur, dan dinamik.

Kedua, program-program penanggulangan kemiskinan di seluruh dunia, dan juga di Indonesia, mungkin sama usianya dengan kemiskinan itu sendiri. Penanggulangan kemiskinan di perkotaan Indonesia banyak meminjam pendekatan terhadap kemiskinan yang berlaku di negara-negara maju seperti Amerika Serikat di mana orang miskin adalah minoritas, khas secara ras atau etnik, dan memiliki sejarah perbudakan di masa silam. Model-model penanggulangan kemiskinan tersebut biasanya memandang orang miskin sebagai kelompok-kelompok yang hidup sebagai kantung-kantung masyarakat di perkotaan. Indonesia dalam banyak hal sangat dipengaruhi oleh pendekatan seperti itu. Sebagai contoh, model-model yang diusulkan oleh Mukerjee (1999), World Bank (2001), dan Mukerjee, Harjono, Carriere (2002), yang menanggapi orang miskin sebagai kelompok-kelompok sosial yang perlu diberdayakan dan difasilitasi. Bantuan bagi orang miskin yang paling menonjol belakangan ini adalah uang tunai, yang ternyata juga penuh muatan manipulatif.

Ketiga, integrasi sosial golongan miskin yang terwujud akibat paradok-paradok status sosial dan ekonomi sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini mengakibatkan semakin sukarnya membangun program-program khusus penanggulangan kemiskinan di perkotaan di Indonesia. Selain batas-batas yang kabur antara golongan miskin dan yang tidak miskin, populasi orang miskin di perkotaan juga sangat besar dan banyak variasi di dalamnya.

Referensi

- Eisenstadt, S.N. dan L.Roniger
1984 *Patrons, Clients, and Friends: Interpersonal Relations and the Structures of Trust in Society*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Evers, H.D.
1982 *Urban Involution: The Social Development of Southeast Asian Town*. Kuala Lumpur: Southeast Asian Studies.
1989 "Urban Poverty and Labor Supply Strategies in Jakarta", dalam G. Rodgers (peny.) *Urban Poverty and the Labour Market Access to Jobs and Incomes in Asian and Latin American Cities*. Geneva: ILO Publications. Hlm. 145–172.
- Fischer, C.L.
1992 *To Dwell among Friends*. Berkeley: University of California Press.
- Geertz, C.
1963 *Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia*. Berkeley: University of California Press.
- Greenfield, S.
1978 *Patronage Networks, Factions, Political Parties, and National Integration in Contemporary Brazilian Society*. Berkeley: University of California Press.
- Hannerz, U.
1976 *Soulside: Inquiries into Ghetto Culture and Community*. New York: Columbia University Press.
- Hughes, N.S.
1992 *Death without Weeping: Violence of Everyday Life in Brasil*. Berkeley: University of California.
- Lewis, O.
1961 *The Children of Sanchez*. New York: Random House.
1966 "The Culture of Poverty", *Scientific American* 25(4):19–25.
- McGee, T.G.
1968 *The Southeast Asian City. A Social Geography of the Primate Cities of Southeast Asia*. London: G.Bell.
- Mukerjee, N.
1999 *Consultation with the Poor in Indonesia: Country Synthesis Report*. Jakarta: The World Bank.
- Mukerjee, N., J. Harjono, dan E. Carriere
2002 *People, Poverty, and Livelihood: Links for Sustainable Poverty Reduction in Indonesia*. Jakarta: The World Bank & DFID.
- Stack, C.
1974 *All Our Kin: Strategies for Survival in a Black Community*. New York: Harper & Row.

Valentine, C.

1968 *Culture and Poverty: Critique and Counter Proposal*. Chicago: University of Chicago Press.

Whyte, W.F.

1972 *Street Corner Society: The Social Structure of an Italian Slum*. Chicago: University of Chicago Press.

Williams, M.

1980 *On the Street Where I Lived*. New York: Prentice-Hall Publ.

World Bank

2001 *Poverty Reduction in Indonesia: Constructing a New Strategy*. Jakarta: The World Bank.

Antropologi dan *Civil Society*: Pendekatan Teori Kebudayaan¹

Bachtiar Alam

(Universitas Indonesia)

Abstract

This article seeks to demonstrate the relevance of modern anthropological perspectives to the development of civil society in Indonesia. The concept of civil society has figured prominently in the political discourses taking place in Indonesia today. It has been largely interpreted as an intermediate sphere between the state and local communities, where the discourses on individual freedom as well as cultural and religious diversity can be effectively articulated without being coopted by the state power, or being bogged down in communal conflicts. This paper argues that modern anthropological perspectives, centering on the idea of the development of polyphonic discourses on cultural identities, can offer a powerful conceptual tool to deconstruct the cultural essentialism perpetuated by the state power and social groups, thereby making a significant contribution to the development of civil society in Indonesia.

Key words: civil society; practice; discourse; culture theory.

Pengantar

Salah satu konsep yang banyak menarik perhatian dalam diskusi-diskusi mengenai kiprah politik negara kita saat ini adalah konsep *civil society*. Memang, terjemahan istilah *civil society* ke dalam bahasa Indonesia masih sangat beragam seperti: masyarakat madani, masyarakat sipil, masyarakat berbudaya, masyarakat kewargaan, dsb. Tetapi, pada dasarnya sudah ada satu kesepakatan bahwa *civil society* adalah wilayah kehidupan sosial yang terletak di antara 'negara' dan 'komunitas

lokal' tempat terhimpunnya kekuatan masyarakat untuk mempertahankan kebebasan, keanekaragaman, serta kemandirian masyarakat terhadap kekuasaan negara dan pemerintah.

Konsep *civil society* demikian jelas menawarkan wawasan alternatif bagi dua pilihan dikotomis yang selalu didengung-dengungkan oleh berbagai rezim otoriter di dunia: sistem politik yang sentralistik dan otokratis, atau kekacauan (*chaos*) yang ditandai oleh anarki, konflik komunal, dan disintegrasi. Justru terhadap perangkap pilihan dikotomi 'semu' seperti inilah konsep *civil society* menunjukkan keampuannya yang luar biasa, karena konsep ini secara tegas mengisyaratkan kemungkinan timbulnya 'kebebasan sipil' (*civil liberties*) yang

¹ Tulisan ini merupakan penerbitan ulang artikel yang sama dari Jurnal ANTROPOLOGI INDONESIA vol. XXIII, no. 60, 1999, hlm. 3–10.

bertanggung jawab, perbedaan pendapat yang nyata, dan pembentukan perserikatan-perserikatan secara sukarela, tanpa terkooptasi oleh jaringan-jaringan politik resmi.

Pada saat berbagai konflik sosial dan politik nyaris menceraiberaikan kehidupan bangsa kita seperti sekarang ini, tampaknya merupakan saat yang sangat tepat untuk merenungkan kemungkinan-kemungkinan pengejawantahan *civil society* di dalam konteks Indonesia, agar kecenderungan-kecenderungan timbulnya kembali kekuasaan yang otoriter di negeri ini dapat dicegah sedini mungkin.

Tulisan ini bertujuan mengkaji makna konsep *civil society* dari segi teori kebudayaan antropologi, khususnya teori-teori kebudayaan mutakhir yang dijuluki beragam sebutan seperti 'post-modernis', 'post-strukturalis', 'postkolonial', 'refleksif', dan lain-lain. Antropologi adalah suatu disiplin ilmu sosial yang telah lama berusaha merumuskan konsep kebudayaan sebagai salah satu konstruksi teoritis utama dalam penelitian sosial. Konsep *civil society*, seperti akan ditunjukkan dalam tulisan ini, berkaitan erat dengan konsep kebudayaan yang dinamis dan inovatif, sehingga sudah sewajarnya apabila teori-teori antropologi menunjukkan relevansi tinggi bagi pengembangan konsep *civil society* dalam konteks Indonesia. Namun, dalam kenyataannya, hingga saat ini nampaknya usaha-usaha ke arah itu masih sangat terbatas, sehingga tulisan ini mencoba membuat suatu 'kajian penjajagan' (*preliminary considerations*) mengenai relevansi teori kebudayaan antropologi bagi pengembangan konsep *civil society* dalam konteks Indonesia.²

² Karena tulisan ini semata-mata merupakan suatu usaha penjajagan penjabaran konsep *civil society* dalam konteks Indonesia, saya tidak mencoba membuat terjemahan baku istilah tersebut. Untuk sementara, dalam tulisan ini digunakan istilah Bahasa Inggris *civil society*.

Konsep *civil society*

Untuk mengkaji relevansi antropologi bagi pengembangan konsep *civil society* dalam konteks Indonesia, pertama-tama perlu kita tinjau kembali perkembangan konsep *civil society* itu sendiri. Dalam hal ini, saya tidak bermaksud melakukan suatu tinjauan menyeluruh atas sejarah perkembangan konsep *civil society*. Saya di sini hanya akan mencoba menggarisbawahi beberapa kandungan makna utama dari konsep ini agar selanjutnya dapat dipaparkan relevansi teori kebudayaan mutakhir bagi konsep tersebut.

Apabila kita mencoba memahami asal-usul konsep *civil society*, maka jelaslah bahwa konsep ini mempunyai akar yang sangat dalam di dalam sejarah Eropa. Dalam tradisi Eropa sebelum abad ke-18, berbagai macam istilah yang berpadanan dengan *civil society*, seperti *koinonia politike* dalam bahasa Yunani, *societas civilis* dalam bahasa Latin, *societe civile* dalam bahasa Perancis, dan *burgerliche Gesellschaft* dalam bahasa Jerman, semuanya mensinonimkan pengertian *civil society* dengan negara (Keane 1988a:35-36). Pada masa itu, seorang anggota *civil society* atau masyarakat kota, dengan sendirinya juga berarti warga dari negara (*citizen*) setempat.

Filsuf Jerman Hegel (1770-1831) barangkali merupakan orang pertama yang secara tegas membedakan konsep 'negara' dan *civil society* (Sassoon 1983).³ Menurut Hegel, *civil society* adalah suatu 'wilayah' (*sphere*) perantara di antara wilayah 'keluarga' dan wilayah 'negara'. Menurutnya, kaum borjuis yang mulai

³ Perbedaan konsep 'negara' dan *civil society* adalah pendapat yang diterima secara umum, namun peneliti masalah *civil society* seperti John Keane (1988a:62-63) membantah pendapat demikian. Menurutnya, sebelum Hegel sudah ada banyak penulis Inggris, Perancis dan Jerman yang membahas hubungan antara *civil society* dan negara.

bermunculan di Eropa abad ke-17, melepaskan diri dari kungkungan kekuasaan negara feodal maupun keluarga, sehingga menciptakan wilayah sosial baru yang ditandai oleh berbagai persaingan ekonomi dalam bentuk kerja, produksi, pertukaran jasa dan barang, serta perolehan harta. Wilayah sosial demikian oleh Hegel disebut *civil society* atau *burgerliche Gesellchaft*. Tetapi, Hegel lebih lanjut menyatakan bahwa karena *civil society* merupakan arena persaingan ekonomi, maka ia mengandung potensi perpecahan, sehingga pada akhirnya negara, sebagai kekuasaan politik yang mengurus kepentingan umum, harus mengontrol *civil society* agar tidak mengalami disintegrasi.

Karl Marx melanjutkan pemikiran Hegel tentang *civil society* dalam mengembangkan teorinya tentang masyarakat kapitalis. Tetapi, dia melihat *civil society* dari perspektif determinisme ekonomi bahwa modus produksi kehidupan materiallah yang ternyata ‘mengkondisi’ kehidupan sosial dan politik manusia pada umumnya (Marx dan Engels 1968:181-182). *Civil society* juga dilihat sebagai ‘bentukan sosial’ (*social formation*) masyarakat borjuis tempat negara menjadi alat dari kepentingan-kepentingan kelas borjuis.

Penampilan luar *civil society* sebagai suatu masyarakat, tempat para anggotanya dengan bebas dapat mengejar keuntungan ekonomi, dikritik oleh Marx sebagai suatu ‘kamufase’ dari monopoli sarana produksi oleh kaum borjuis yang mengeksploitasi kaum proletar. Dengan demikian, *civil society* bagi Marx hanyalah merupakan fase transisi yang masih tetap mengandung kontradiksi-kontradiksi hubungan ekonomi masyarakat kapitalis, yang pada akhirnya pasti akan hancur dari dalam karena terjadi transformasi total menuju masyarakat sosialis.

Melihat sebatas pendekatan idealis Hegel maupun materialis Marx seperti ini, sangatlah

jelas bahwa—walaupun mereka mengakui *civil society* sebagai suatu arena sosial yang terpisah dari negara—mereka sangat menonjolkan ‘aspek negatif’ dari *civil society* sebagai ajang persaingan kepentingan ekonomi. Pandangan yang lebih positif terhadap *civil society* baru bermunculan pada abad ke-20.⁴

Pemikir sosial dari Itali bernama Antonio Gramsci (Bobbio 1988; Sassoon 1988a, 1988b) misalnya, menganalisis *civil society* dengan menggunakan konsep hegemoni yang mengkritik determinisme ekonomi Marx. Menurut Gramsci, suatu kelas sosial mempertahankan dominasinya bukan sekedar dengan menguasai modus produksi, melainkan dengan mengembangkan ‘hegemoni’, yaitu suatu tatanan ide dan moral yang dapat menarik ‘kesepakatan aktif’ (*active consent*) dari kelas-kelas sosial yang didominasinya. Dengan kata lain, konsep hegemoni ini menolak adanya manifestasi langsung kepentingan-kepentingan ekonomi kelas penguasa di dalam kehidupan politik maupun kebudayaan masyarakat bersangkutan. Tak pelak lagi, revisi demikian mempunyai implikasi yang sangat jauh bagi pengkajian ideologi dan kebudayaan, karena konsep hegemoni praktis membebaskan konsep *civil society* dari perspektif determinisme ekonomi.

Dengan demikian, konsep hegemoni juga memberi arti ‘positif’ bagi konsep *civil society*. Menurut Gramsci, ajang pembentukan hegemoni justru terletak di wilayah *civil society* dan bukan di wilayah negara. Gramsci berpendapat bahwa untuk mempertahankan kekuasaannya, kelas sosial yang dominan mau tidak mau harus bernegosiasi dan membuat

⁴ Sebetulnya ada pemikir sosial abad ke-19 seperti Alexis Tocqueville yang memberi penilaian positif terhadap *civil society*, namun dalam tulisan ini saya memfokuskan pembahasan saya pada pemikiran abad ke-20 yang berpengaruh.

kompromi-kompromi dengan kelompok-kelompok sosial lainnya di dalam arena *civil society*. Karena itu, di dalam pemikiran Gramsci, di antara negara dan *civil society* senantiasa terdapat suatu hubungan timbal-balik. Kelas sosial yang dominan melalui negara mencoba mengooptasi kelompok-kelompok lain dalam *civil society*. Sebaliknya, kelompok-kelompok sosial tersebut pun mencoba memaksa negara untuk berkompromi dan menerima tuntutan-tuntutannya.

Hegel dan Marx melihat hubungan antara negara dan *civil society* sebagai hubungan satu arah. Hegel melihat negara sebagai pengontrol *civil society*, sedangkan Marx melihat negara sebagai perpanjangan kepentingan ekonomi yang menguasai *civil society*. Berbeda dengan pandangan Hegel dan Marx, Gramsci mengajukan suatu perspektif baru yang melihat hubungan timbal balik yang setara di antara keduanya. Hal inilah yang membuat pemikiran Gramsci sangat berpengaruh pada berbagai pemikiran-pemikiran sosial masa kini.

John Keane (1988a, 1988b), seorang ahli ilmu sosial masa kini yang menentang determinisme ekonomi, melihat *civil society* sebagai arena sosial yang mengandung kebebasan (*freedom*), perserikatan sukarela (*voluntary association*), keragaman hubungan manusia, jati diri, serta nilai-nilai, yang terpisah dari kekuasaan politik negara dan pemerintah. Bagi Keane dan para ahli ilmu sosial lainnya yang berhaluan liberal, berbagai macam kekuasaan dalam *civil society* tidak bersumber dari satu hal, seperti penguasaan sarana produksi, tetapi dari berbagai macam faktor yang sangat beragam dan heterogen. Oleh sebab itu, seperti halnya Gramsci, Keane (1988b:xiii) melihat hubungan setara antara negara dan *civil society* itu mengandung penyaluran kekuasaan ke aneka macam wilayah publik yang terdapat di dalam dan di antara negara dan *civil society*.

Di Indonesia sendiri, ahli ilmu politik Muhammad Hikam (1996:3) melihat *civil society* secara eklektif sebagai wilayah kehidupan sosial yang menjamin berlangsungnya tindakan dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kondisi kehidupan material, tidak terserap di dalam jaringan-jaringan kelembagaan politik resmi, serta mengandung transaksi komunikasi yang bebas oleh warga masyarakat.

Dari tinjauan beberapa pemikiran tentang *civil society* oleh para ahli ilmu sosial abad ini, jelas terlihat seutas benang merah yang menghubungkan perbedaan-perbedaan mereka, yaitu:

- bahwa *civil society* mempunyai kemandirian terhadap negara, tetapi di antara keduanya terdapat hubungan timbal balik, dan
- bahwa *civil society* merupakan arena sosial yang mengandung kepentingan-kepentingan berbeda, namun memungkinkan terjadinya negosiasi terus-menerus secara bebas.

Pendekatan teori kebudayaan mutakhir

Berangkat dari pemikiran-pemikiran tentang *civil society* seperti telah diuraikan di atas, teori-teori antropologi masa kini tampak sangat relevan. Dalam tulisan ini saya akan mencoba menunjukkan relevansi antropologi untuk kedua ciri utama konsep *civil society* yang telah disimpulkan di atas.

Praksis

Seperti telah kita bahas di atas, terobosan konseptual utama dalam pemikiran tentang *civil society*—setelah munculnya konsep hegemoni Gramsci—adalah diakuinya peranan ‘kesadaran subyektif’ (*subjective consciousness*) dari para pelaku dalam mencapai hubungan timbal-balik yang harmonis antara *civil society* dan negara. Gramsci melihat peran kesadaran subyektif demikian sebagai *active consent* (kesepakatan

aktif) dari kelompok-kelompok yang membentuk *civil society*. Pendekatan ini agak berbeda dari pendekatan sebelumnya yang dikemukakan oleh Hegel dan Marx yang melihat *civil society* dan negara sebagai 'fakta sosial' atau 'struktur' yang terlepas dari kesadaran individu.

Dalam teori antropologi masa kini, 'kesadaran subyektif' mendapat posisi yang sangat penting dalam 'teori praksis' (*theory of practice*) yang dikembangkan oleh Pierre Bourdieu (1977; cf. Jenkins 1992). Konsep ini dikemukakan oleh Bourdieu (1977) pada akhir dekade 1970an, tetapi baru mulai menarik perhatian para antropolog pada pertengahan 1980an (lihat misalnya Moore 1987; Ortner 1984).

Pokok pikiran teori praksis yang paling relevan dalam pembahasan ini adalah bahwa konsep 'praksis' (*practice*) Bourdieu dibedakan dari konsep 'tindakan' (*action*) yang merupakan salah satu konstruk teoritis utama sosiologi Weber, yang diwariskan dalam berbagai pendekatan antropologis, antara lain pendekatan interpretatif Geertz (1973). Berbeda dengan konsep tindakan yang dalam tradisi sosiologi Weber cenderung dilihat sebagai pencerminan ide-ide yang terkandung dalam kebudayaan si pelaku, konsep praksis menekankan adanya hubungan timbal balik antara si pelaku dan 'struktur obyektif' atau 'kebudayaan' sebagai keseluruhan pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam bentuk simbolik (Bourdieu 1977:83).

Implikasi utama dari konsep praksis bagi konsep kebudayaan ialah bahwa simbol-simbol yang terkandung dalam suatu kebudayaan senantiasa bersifat cair, dinamis, dan sementara, karena keberadaannya tergantung pada praksis para pelakunya yang berada pada konteks sosial tertentu, yang mempunyai 'kepentingan' tertentu. Kebudayaan dalam arti ini bukan semata-mata merupakan sekumpulan pe-

ngetahuan yang diwariskan atau dilestarikan, melainkan merupakan sesuatu yang 'dibentuk', suatu konstruksi sosial yang berkaitan erat dengan kepentingan maupun kekuasaan si pelaku.

Dilihat dari teori praksis seperti ini, hubungan saling membentuk dan mempengaruhi antara *civil society* dan negara merupakan hubungan dialektis antara subjek dan struktur obyektif. Praksis para pelaku tidak sepenuhnya bebas dari struktur obyektif, tetapi praksis juga dapat merubah struktur obyektif. Begitu juga, seperti dikemukakan oleh Gramsci, Keane dan Hikam, *civil society* yang terdiri dari subjek-subjek dengan kesadaran serta kepentingan yang berbeda-beda di satu pihak dibentuk oleh negara, namun sebaliknya negara juga dipertahankan atau dirubah oleh *civil society*.

Wacana

Konsep antropologi lain yang sangat relevan terhadap pemikiran tentang *civil society* adalah wacana. Konsep wacana sangat berpengaruh tidak saja dalam antropologi, tetapi juga dalam berbagai cabang ilmu sosial dan budaya lainnya.

Wacana, menurut Emile Benveniste (1971:217-230), adalah modus komunikasi verbal (kebahasaan) tempat posisi si penutur tampak dengan jelas, sehingga menurut Foucault (1980), sejumlah wacana dapat terhimpun menjadi suatu akumulasi konsep ideologis yang didukung oleh tradisi, kekuasaan, lembaga dan berbagai macam modus penyebaran pengetahuan. Perlu diperhatikan bahwa dalam arti adanya keterlibatan 'subyektivitas' demikian, wacana dibedakan dari 'teks' yang merupakan penuturan verbal yang telah lepas dari posisi si penutur.

Dengan pengertian wacana demikian, kita dapat melihat bahwa setiap wacana tentang kebudayaan tidak terlepas dari 'kepentingan' dan 'kekuasaan'.⁵ Bahkan, dalam setiap

masyarakat biasanya terdapat berbagai macam wacana tentang kebudayaan yang bisa saja saling bertentangan. Namun dengan mendapat dukungan dari kekuasaan, wacana tertentu menjadi wacana yang dominan, sedangkan wacana-wacana lainnya akan ‘terpinggirkan’ (*marginalized*) atau ‘terpendam’ (*submerged*).

Karena adanya kesadaran tentang hubungan erat antara wacana dan kepentingan serta kekuasaan, antropologi dewasa ini sangat mementingkan keragaman wacana tentang kebudayaan, baik dalam arti wacana umum tentang kebudayaan maupun wacana antropologis yang dinamakan etnografi. James Clifford (1988) mengemukakan perlunya penciptaan ‘ruang’ tempat tumbuh suburnya berbagai wacana tentang kebudayaan sebagai hasil ‘negosiasi konstruktif’ (*constructive negotiation*) antara peneliti dan para pelaku. Clifford (1988) menamakan kondisi demikian sebagai *polyphonic* atau *heteroglossia*, bersuara majemuk.

Kepedulian antropologi masa kini terhadap kemajemukan wacana kebudayaan, serta terhadap wacana-wacana dan pengetahuan-pengetahuan yang terpinggirkan atau terpendam oleh kekuasaan yang ada, berkaitan erat dengan kiprah antropologi dewasa ini yang menentang ‘esensialisme budaya’. Esensialisme budaya adalah pandangan bahwa suatu kebudayaan mempunyai ‘esensi’ yang statis, yang tidak akan berubah selama-lamanya. Esensialisme budaya bukan saja tidak sesuai dengan konsep kemajemukan wacana yang berkembang dalam antropologi, melainkan juga mengabaikan perspektif antropologi yang

secara tajam melihat hubungan antara wacana dan kekuasaan.

Semua pengertian ini jelas sangat cocok dengan ciri kedua *civil society* yang telah disimpulkan di atas, yaitu bahwa *civil society* merupakan arena sosial yang mengandung kepentingan-kepentingan berbeda, namun memungkinkan terjadinya negosiasi terus menerus secara bebas. Perspektif antropologi seperti yang baru saja diuraikan dapat semakin mempertajam karakteristik *civil society* sebagai arena sosial yang mengandung berbagai wacana dan praksis, yang mewakili berbagai kepentingan yang berbeda; tetapi, kesemua wacana dan praksis mendapat kesempatan untuk berkembang secara bebas.

Penutup: *civil society* dan wacana kebudayaan di Indonesia

Dalam tulisan ini telah diuraikan dua konsep utama dari teori kebudayaan mutakhir, yaitu praksis dan wacana. Kedua konsep ini sengaja ditonjolkan dalam tulisan ini, karena dalam berbagai diskusi tentang kebudayaan di Indonesia selama ini, kebudayaan lebih banyak digambarkan secara statis, sebagai sesuatu yang diwariskan, dipelajari, dan dilestarikan, bukan sebagai sesuatu yang dikonstruksi. Teori kebudayaan mutakhir justru menekankan bahwa kebudayaan selalu dikonstruksi oleh para pelakunya melalui praksis dan wacana. Tetapi, apakah relevansi teori kebudayaan mutakhir seperti ini bagi pengembangan *civil society*, khususnya dalam konteks Indonesia? Inilah kesimpulan terpenting yang ingin saya tarik dari pembahasan ini.

Konsep kebudayaan yang dinamis dan inovatif justru sangat diperlukan bagi pengembangan *civil society* di Indonesia, karena kepentingan-kepentingan politik di negeri ini teramat sering dipresentasikan sebagai wacana kebudayaan. Ambil saja contoh, masih segar dalam ingatan kita bahwa

⁵ Yang dimaksud dengan ‘kekuasaan’ dalam tulisan ini bukanlah semata-mata kekuasaan politik, melainkan kekuasaan dalam arti *power* seperti yang dimaksud oleh Foucault (1972:427), yaitu kemampuan untuk menstruktur tindakan orang lain dalam bidang tertentu. Menurut Foucault (1972), kekuasaan demikian senantiasa beredar dari subjek yang satu ke yang lain.

pada akhir masa Orde Baru, ketika Nurcholish Madjid mengusulkan perlunya partai oposisi, oleh pihak penguasa serta merta ditanggapi dengan jawaban: 'oposisi tidak sesuai dengan budaya kita.' Ini hanya sekedar satu contoh kecil untuk hal-hal yang bersifat sangat 'politis', seperti sistem oposisi di negeri ini yang cenderung dipresentasikan sebagai persoalan kebudayaan.

Sangat mudah kita jumpai contoh-contoh seperti ini dalam wacana-wacana politis di negeri ini, bahkan juga pada masa pasca-Orde Baru sekarang ini. Misalnya saja, dalam gejala sosial-politik yang berkepanjangan di negeri kita, sering kita dengar pernyataan-pernyataan seperti 'Indonesia belum siap menerima sistem demokrasi', 'budaya (*sic*) demokrasi belum berakar di Indonesia', dan seterusnya. Dilihat dari pemahaman kebudayaan sebagai suatu proses dinamis seperti yang saya kemukakan di atas, pernyataan-pernyataan demikian jelas salah kaprah. Kalau kita lihat kebudayaan bukan sebagai sesuatu sistem simbolik baku yang semata-mata diwariskan dari generasi sebelum-

nya, melainkan sebagai sesuatu yang dikonstruksikan oleh para pelaku dengan didorong oleh kepentingan-kepentingannya, maka masalah kita sekarang ini bukannya 'apakah kita mempunyai budaya demokrasi atau tidak', melainkan 'apakah kita mau menciptakan (mengonstruksi) kebudayaan demokrasi atau tidak'. Kalau memang ada kemauan politis untuk itu, hal itu dapat dilakukan melalui wacana dan praksis.

Terdapat kecenderungan sangat kuat dalam masyarakat kita untuk mempresentasikan masalah-masalah politis sebagai masalah budaya. Memang dalam satu segi, hal itu menunjukkan preokupasi kita dengan masalah kebudayaan. Tetapi, di lain pihak, hal itu juga disebabkan oleh konsep kebudayaan yang berlaku umum di negeri ini yang sangat bersifat statis. Padahal, untuk mengembangkan *civil society* yang mandiri, sesuatu yang amat sangat diperlukan adalah konsep kebudayaan yang dinamis dan inovatif. Di sinilah, tak pelak lagi, terdapat peluang besar bagi ilmu antropologi untuk memberikan sumbangsinya yang nyata.

Referensi

Benveniste, E.

1971 *Problems in General Linguistics*. Coral Gables: University of Miami Press.

Bobbio, N.

1988 'Gramsci and the Concept of Civil Society', dalam J. Keane (peny.) *Civil Society and the State*. London: Verso. Hlm. 73-79.

Bourdieu, P.

1977 *Outline of a Theory of Practice*. Cambridge, England: Cambridge University Press.

Clifford, J.

1988 *The Predicament of Culture: Twentieth-Century Ethnography, Literature, and Art*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Foucault, M.

1972 *Power/Knowledge*. New York: Pantheon.

Geertz, C.

1973 *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.

- Hikam, M.A.S.
 1990 *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: LP3ES.
- Jenkins, R.
 1992 *Pierre Bourdieu*. London: Routledge.
- Keane, J.
 1988a 'Despotism and Democracy: The Origins and Development of the Distinction between Civil Society and the State 1750-1850', dalam J. Keane (peny.) *Civil Society and the State*. London: Verso. Hlm. 35–72.
 1988b *Democracy and Civil Society*. London: Verso.
- Marx, K dan F. Engels
 1968 *Selected Works*. London: Lawrence & Wishart.
- Moore, S.F.
 1987 'Explaining the Present: Theoretical Dilemmas in Processual Ethnography', *American Ethnologist* 14(4):727–736.
- Ortner, S.
 1984 'Theory in Anthropology since the Sixties', *Comparative Studies in Societies and History* (26):126–166.
- Sassoon, A.S.
 1983 'Civil Society', dalam T. Bottmore, dkk. (peny.) *A Dictionary of Marxist Thought*. Cambridge: Harvard University Press. Hlm.

Peran Arsitektur dan Antropologi dalam Tata Ruang Kota Indonesia Abad ke-21¹

Gunawan Tjahjono
(Universitas Indonesia)

Abstract

This paper attempts to examine various aspects of urban space design to be considered for policy making. Based upon his personal experience in conducting research with anthropologists in traditional environments, the author suggests that architects and anthropologists can contribute considerably to overcoming urban problems.

The author notes that the prolonged socio-economic crisis has brought the growth of large cities in Indonesia to a standstill. No new building project has been initiated, and the recently completed skyscrapers remain as vacant, lifeless glass blocks. New towns have also stopped growing, and this offers decision makers the opportunity to rethink their planning policy. Further developments in and beyond Indonesia must be taken into consideration. The emergence of a new form of society as a result of information technology can be seen in the case of the European Union. Meanwhile, the strengthening of group identities within nation-states have led to the breakdown of other nations. The question remains how these phenomena will affect the future of urban life in Indonesia.

Urban spaces that are prone to riots and other mass acts of violence indicate problems in urban policy. In the past, the citizens' culture determined urban form; but large cities are marked by cultural diversity. Whereas urban space is a field studied by urban planners and architects, culture is the focus of anthropologists, who have largely been excluded from the urban policy making process. As a result, policy makers determined urban form according to their own cultural biases, without considering the cultural tendencies of the citizens.

Pendahuluan

Berkat krisis dalam segala bidang kehidupan, kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, yang sebelumnya bertumbuh cepat, menjadi berhenti sejenak. Bangunan-bangunan yang diselesai-

kan hanya sebagai pemenuhan kontrak lama, bukan proyek baru. Meski selesai, mereka tetap tidak terisi, sehingga mengalami kekosongan kehidupan. Kota-kota baru yang sebelumnya banyak dirancang juga berhenti berkembang dan meninggalkan rumah-rumah kosong tak dihuni. Keadaan ini memberi kesempatan bagi pengambil kebijakan dalam penataan ruang kota untuk meninjau kembali kebijakannya.

Penghentian pengembangan tak berarti kita tak perlu berbuat sesuatu. Di luar Indonesia, suatu masyarakat baru sedang bangkit dan

¹Tulisan ini merupakan hasil revisi dari naskah yang disajikan dalam sesi 'Pembangunan "Gaya Orde Baru" dan Krisis Budaya' pada seminar Jubileum Jurnal Antropologi Indonesia ke-30, 'Memasuki Abad ke-21: Antropologi Indonesia Menghadapi Krisis Budaya Bangsa', 6-8 Mei 1999, di Pusat Studi Jepang, Universitas Indonesia, Depok.

menuju perwujudan yang lebih jelas. Masyarakat itu adalah hasil picuan teknologi informasi yang memungkinkan pembentukan jaringan. Jaringan cenderung menyatukan dunia. Namun, di balik itu, juga timbul suatu gejala lain yang cukup dahsyat, yaitu semakin kuatnya identitas kelompok dalam negara bangsa. Gejala keruntuhan Uni Soviet, pemecahan negara Ceko dan Slovakia, memberi tahu kita tentang kekuatan yang sedang muncul. Indonesia juga sedang menghadapi isu yang mulai muncul, seperti tuntutan pemisahan wilayah tertentu, yang meski belum resmi mencuat ke permukaan dengan jelas, tetap menantang kita. Selain itu, ada pula gejala unifikasi Eropa yang hingga kini langkahnya cukup pasti. Apakah gejala-gejala tersebut akan mempengaruhi kehidupan kota yang akan datang di Indonesia?

Kota akan menjadi tempat penampungan penduduk terbesar pada abad mendatang. Tantangan di depan membuat kita menoleh ke belakang untuk mempelajari apa yang mendasari tata ruang berkota yang mungkin selama ini diabaikan oleh pembuat kebijakan. Tata ruang yang rapuh terhadap kerusakan mencerminkan ada sesuatu yang tidak beres. Demikian pula dengan tata ruang yang mengundang perkeltahan, pengelutan, dan pengabaian terhadap harkat manusia, semua itu mencerminkan kebudayaan yang kurang sehat dalam berkota. Dalam hal ini, cendekiawan perlu ikut bertanggung jawab. Belanda, misalnya, dapat mengendalikan Bangsa Indonesia karena mereka memahami betul kebudayaan kita, sehingga dapat melakukan pengendalian melalui segi kebudayaan. Bangsa kita dirayu terus, diadu domba, dan dikendalikan. Tampaknya pelajaran ini telah kita lupakan.

Penataan ruang adalah bidang yang dipelajari oleh perancang kota dan arsitek. Sebelum perancangan kota melepaskan diri dari

arsitektur, tata ruang kota adalah urusan arsitek terlepas dari apakah istilah itu gayut dalam konteks Indonesia. Masalah kebudayaan adalah pumpunan antropologi. Namun, selama ini ahli antropologi kurang dilibatkan dalam olahan pengambilan keputusan. Bila terlepas-lepas, maka tata ruang akan ditentukan oleh kebudayaan sang penentu kebijakan yang belum tentu prihatin terhadap kebudayaan orang lain yang menjadi warga kotanya.

Dengan berkeyakinan bahwa krisis membuka peluang bagi yang mengalaminya untuk melangkah pasti setelah melewatinya, tulisan ini mencoba meninjau beberapa segi tata ruang kota yang dapat menjadi dasar bagi pertimbangan kebijakan. Dalam hal ini, arsitektur dan antropologi dapat menyumbangkan sesuatu. Tulisan ini bukan suatu penelitian lapangan, melainkan suatu hasil perolehan pengetahuan tidak langsung yang di dalamnya melibatkan pengalaman penulis yang bergaul dan bekerja sama dalam melakukan penelitian di bidang lingkungan binaan masyarakat bertradisi kuat. Dengan tulisan ini, kekuatan dan kelemahan yang dilakukan oleh masing-masing bidang mungkin terungkap, sehingga terbuka peluang bagi penyelesaian yang lebih konkret.

Tantangan di depan: jaringan, identitas, dan ruang kota

Pakar sosiologi kota Manuel Castells (1996, 1997, 1998) mengamati beberapa gejala dunia yang menonjol pada akhir abad ke-20 ini. Pertama, ada kebangkitan masyarakat jaringan (*network society*) sebagai hasil perkembangan teknologi informasi yang semakin meniadakan batas wilayah dan memungkinkan individu lebih leluasa dalam menentukan tempat Bergeraknya. Kedua, ada penguatan identitas kelompok kesukubangsaan (atau bangsa) yang melemahkan kekuasaan negara dan mempertajam perbedaan antara bangsa dan negara. Gejala

pertama mengakibatkan ruang mengalir dan tidak berhenti pada lokal-lokal tertentu; dan konsep tempat sebagai pengikat seakan-akan menjadi usang. Gejala kedua mengakibatkan perpecahan dan penyusunan kembali tata hidup berbangsa dan bernegara.

Indonesia sedang menghadapi krisis yang berkaitan dengan gejala kedua dalam kategori Castells ini. Sebagai bagian dari dunia ini, Indonesia tidak mungkin terlepas dari jaringan ini, terutama dalam berbagai aspek kehidupan kota. Kehidupan penduduk Indonesia yang sebagian besar kini masih berada di desa akan beralih ke kota atau desa-kota (McGee 1989). Hal ini akan menjadi kenyataan bila perkembangan ekonomi berlanjut mengikuti pola yang berlaku dalam sistem yang amat tergantung dari 'jaringan' ini. Dalam laju pertumbuhan demikian, 'pengotaan' dunia tampaknya akan menjadi suatu kenyataan di masa depan dan, dengan demikian, perwujudan sebuah *ecumenopolis* seperti yang dicita-citakan pakar permukiman Doxiadis (1968) akan terjadi. Dalam keadaan demikian, ruang kotalah yang akan menjadi tumpuan bagi keberlangsungan kehidupan sebagian besar penduduk Indonesia, menyusul gejala dunia. Penataan ruang kota, dalam kaitan ini, menjadi penting dan kualitas ruang kota akan menentukan kualitas hidup warganya.

Keadaan ruang kota yang kita alami sekarang merupakan hasil suatu olahan panjang yang melibatkan berbagai faktor. Sejarah kota Jakarta, sebagai contoh, menceritakan kesilihgantian peruntukan lahan dan juga pola aliran sungai (Surjomihardjo 1977). Hal itu menunjukkan bahwa permukaan batas ruang kota hanyalah suatu lapisan yang menindih lapisan-lapisan lain di bawahnya. Pola tata ruang kota di Jakarta kini adalah suatu perluasan dari struktur yang landasannya dibuat oleh Belanda. Perubahan pola terjadi pada saat Jakarta memiliki suatu Rencana Induk yang kini telah

memasuki 20 tahun dari Rencana Induk kedua (Rencana Induk 1965-1985 dan 1985-2005) dengan pengaturan peruntukan dan pengendalian batas ketinggian bangunan. Sementara itu, pertumbuhan kota-kota besar lain di Indonesia pada era Orde Baru mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat yang berdasarkan rasional tertentu, yaitu mendahulukan pertumbuhan ekonomi dengan mengacu pada standar yang diperoleh dari suatu hasil peninjauan pasar yang menguntungkan golongan tertentu. Hal tersebut agak berbeda dari kota-kota kecil yang pertumbuhannya kurang terjangkau oleh pusat.

Sebagian besar pengambil keputusan akhir atas tata ruang kota-kota besar yang berpendidikan sebagai sarjana perencana (*planner*) yang mengandalkan tradisi perencanaan Barat. Sayangnya, dalam tradisi ini mereka tahu banyak tentang sejarah kota di Eropa atau Amerika serikat, namun hanya sedikit sekali, atau hampir tidak ada, di antara mereka itu yang menguasai sejarah kota lama di Indonesia. Dengan demikian, seakan-akan sejarah perancangan kota di bumi Indonesia dimulai dari saat Thomas Karsten, arsitek dan perancang kota Belanda yang meletakkan banyak dasar pola di kota-kota Indonesia. Padahal, tradisi berkota telah lama tumbuh di Indonesia. Ahli geografi yang memumpuni kajiannya tentang sejarah kota di Asia, Paul Wheatley (1983), menganggap bahwa tradisi berkota di kawasan ini telah dimulai sejak istilah *nagara* dikenalkan. Ketidaktahuan itu mungkin membawa akibat ketidakberdayaan dalam menghadapi cara manusia Indonesia berperilaku terhadap ruang umum kota. Bila keadaan ini berlanjut terus, tidak mustahil kita akan terjebak dalam lubang yang digali sendiri, sehingga kota kita tidak lagi didukung oleh warganya.

Tradisi berkota: *nagara* dan *commandery*

Tradisi berkota di Nusantara mencerminkan dua sistem (Wheatley 1983), yaitu sistem kebangkitan (*generation*) dan sistem paksaan (*imposition*). Sistem kebangkitan terjadi bila seluruh jaringan dan unsur-unsur terkait dalam kehidupan berkota itu timbul dari nilai-nilai setempat oleh masyarakatnya. Dalam hal ini, sistem dari luar mungkin bersinggungan dengan sistem tempat tersebut, namun sistem setempat mampu mengatasi atau menyerapnya ke dalam sistem yang ada dalam kehidupan. Sistem paksaan terjadi bila jaringan dan unsur-unsur terkait datang dari luar dan menghapus atau menindas sistem setempat. Di sini ada suatu paksaan atas sesuatu yang telah berlaku dan terjadi ketakberdayaan lokal terhadap nonlokal. Wheatley menamakan sistem kebangkitan *nagara* dan sistem paksaan sebagai *commandery*.

Dalam *nagara*, seluruh penataan sesuai dengan keadaan kebudayaan dan ruang kota dibagi sesuai dengan lapisan sosial serta tata nilai yang dipahami warga. Pusat kekuasaan dalam *nagara* menjadi acuan penataan ruang dengan diri penguasa sebagai titik awalnya. Semakin jauh dari pusat, semakin kurang kekuatan penataan. Jati diri masyarakat bergabung dengan kekuasaan, terutama bagi mereka yang berada di dalam batas tegas tata ruang kota. Warga Kota Gede, misalnya, pada masa ada ketegasan dinding kota, mengasosiasikan diri dengan kotanya. Mereka tegas-tegas membedakan diri dari desa di sekitarnya, yang ditandai dengan dinding kota. Perbedaan tempat berkaitan dengan jenis tugas atau pekerjaan, dan juga kelompok luar yang dikelompokkan dalam gugus tertentu. Namun, jumlah kelompok luar jauh lebih sedikit daripada jumlah yang berasal dari *nagara*.

Tata ruang kota hasil suatu *commandery* selalu menimbulkan perbenturan nilai antara yang mengatur dan yang diatur. Penguasa memaksakan suatu pola yang memudahkan pengawasan demi pengendalian dan mempertahankan kekuasaannya. Penguasa mengelompokkan kelompok-kelompok 'lain' menurut asal-usul dan meletakkan mereka di luar tata tertib resmi. Kediaman kelompok 'luar' itu berupa kampung. Kelompok menemukan identitas melalui asosiasi jati diri asal dengan tempat atau kampung mereka. Perbedaan kelompok dalam pola demikian amat tegas dan kesenjangan antarkelompok semakin tajam. Hanya tempat umum yang berkaitan dengan perdagangan, seperti pasar, yang memungkinkan pertemuan antarkelompok. Hal tersebut tentu menjadi suatu selubung yang siap meledak bila keadaan memungkinkan.

Dalam kenyataannya, pengendalian dengan pengelompokan terjadi juga pada kota yang dikuasai masyarakat lokal atau *nagara*, terutama di daerah pantai yang banyak pendatangnya. Terhadap mereka yang 'dikampungkan', perasaan terperintah tetap timbul. Namun, pola kota yang dominan adalah dari masyarakat lokal yang lebih mengacu pada paham kosmologis daripada penjajahan. Pasar dan alun-alun adalah ruang yang menetralkan berbagai eksek. Kota-kota besar di Indonesia banyak yang jaya berkat air. Mereka berada di muara sungai dan membuka diri ke laut (Leaf 1988). Kota-kota demikian, pada masa berkembang dari sistem sendiri (*nagara*), juga berciri cepat berubah, karena warganya yang lebih banyak berorientasi dagang. Hal tersebut berbeda dari kota pedalaman yang bersifat agraris dan seremonial (McGee 1969). Kota pantai berkembang lebih pesat daripada kota pedalaman berkat perdagangan. Dalam kota demikian, kemajemukan kebudayaan juga lebih kaya berkat silang budaya dengan luar daripada dalam kota pedalaman yang cenderung

konservatif. Namun, dalam perkembangan kota masa kini, pantai dan sungai tampaknya kurang mendapat perhatian. Jakarta, yang memiliki 13 sungai, belum memiliki perancangan produktif untuk kawasan pinggiran sungainya.

Kota-kota besar di Indonesia melanjutkan kebijakan yang lebih menyerupai konsep *commandery*, hanya berbeda bentuk. Bila dulu yang menentukan adalah Belanda, kini yang menentukan warga sendiri yang kebijakannya lebih ditentukan oleh bisnis. Hal ini timbul berkat ketidakberdayaan pengambil keputusan tata ruang kota atas campur tangan kekuasaan dan lembaga-lembaga sosial yang tidak dapat menjalankan sistem kontrolnya, sehingga hasrat warga tidak berperan sama sekali. Sebagai akibatnya, terjadi suatu perkembangan yang tidak adil dan hal ini membawa dampak sosial, sehingga bayaran untuk itu juga mahal. Dengan adanya campur tangan penguasa, maka ruang yang ditawarkan menjadi semu akan kegiatan nyata yang mencerminkan kehidupan sebagian besar warganya.

Adakah bentuk kota yang baik?

Kota adalah suatu karya besar manusia. Kota membuahkan suatu cara hidup yang berbeda dari desa. Warga kota menganggap dirinya lain dari warga desa. Kota itu suatu prestise yang bagaikan dalam dongeng, pahlawan atau jagoan menciptakan prestise. Prestise ini ternyata juga merupakan sesuatu yang berada dalam alam kejiwaan manusia (Goode 1987). Kenyataan demikian dapat kita temukan di Kota Gede, misalnya, yang warganya pernah membedakan diri dari warga desa di sekitarnya pada masa dinding kota masih kuat (Tjahjono 1989).

Sebagai hasil manusia, kota mengalami pasang surut perkembangan dengan bermacam-macam sebab. Sejarah kota-kota dunia menyaksikan ada kota yang tumbuh cepat kemudian lenyap karena bencana alam

(Pompeii); ada pula yang mengalami kejayaan lama lalu menyusut karena persaingan (Banten lama). Perkembangan kota bagaikan daur hidup manusia yang ada titik mulanya, meskipun kadang-kadang lahir dari suatu olah yang lama dan, mungkin, ada titik hilang atau akhirnya. Kota-kota yang berasosiasi dengan kerajaan di Jawa juga ada yang telah lenyap (Plered). Banyak kota sebelum revolusi industri di dunia ini mengambil model kosmologis yang juga ikut mengatur stratifikasi sosial warganya, masih bertahan, dan berkembang hingga kini (Beijing). Model demikian bekerja baik dalam konteks jamannya yang memusatkan kekuasaan pada penguasa tunggal sebagai pusat kosmos dan tata ruang mengacu darinya. Kota demikian didirikan oleh penguasa kerajaan dan mencerminkan *archetype* warga jamannya.

Pakar arsitektur dan psikologi ruang Mimi Lobell membagi *archetype* keruangan permukiman yang pernah timbul dalam sejarah peradaban manusia. Berdasarkan konsep pakar psikoanalisis C.G. Jung tentang *archetype* sebagai citra primitif yang berada dalam alam tak sadar kolektif manusia, Lobell (1983) menganggap bahwa citra tersebut juga tampil dalam tata ruang. Setiap *archetype* keruangan berfungsi baik sesuai dengan keadaan yang menyebabkannya muncul. Lobell mengklasifikasikan enam *archetype* yang menandai peradaban, meski tidak ada satu pun yang persis muncul seperti abstraksinya. Keenam *archetype* itu adalah:

- 1) *Sensitive Chaos*, yang menandai ketidakpastian tata ruang di masyarakat yang masih mengandalkan berburu dan mengumpulkan makanan;
- 2) *Great Round* yang menandai jaman wanita berperan banyak pada permulaan jaman bercocok tanam;
- 3) *Four Quarters* yang menandai jaman dengan banyak perang dan pahlawan sebagai pujaan;

- 4) *Pyramid* sebagai jaman Raja Dewa saat penguasa mengasosiasikan diri dengan titisan dewa dan stratifikasi sosial berbentuk piramida;
- 5) *Radiant Axes* yang menandakan jaman penjajah besar yang mengatur kekuasaan bagai radiasi matahari; dan
- 6) *Grid*, yaitu suatu masyarakat tanpa pusat kekuasaan yang menonjol dan teknokrat berjaya dalam bentuk hubungan jaringan.

Menurut Lobell, *archetype* keruangan mencerminkan ego manusia yang mendorong pemunculannya. Dalam hal ini, *archetype* ke-4 dan ke-5 adalah suatu luapan ego akan kekuasaan yang menerjemahkan diri ke dalam bentuk ruang.

Sebagai bagian dari permukiman, kota dapat juga menampilkan *archetype* keruangan tertentu. Dalam hal ini yang menonjol adalah *archetype* ke-3 hingga ke-6. Dari yang ke-3 hingga ke-5 dapat kita temukan pengejawantahan tata ruangnya di kota-kota, antara lain, seperti Beijing (3 dan 4), Yogyakarta (4), Versailles, dan Washington (5). Sementara itu, *archetype* ke-6 dapat kita temukan di banyak kota-kota Amerika Serikat. Namun, apakah pola tersebut langsung dapat menentukan suatu kota itu baik? Mungkin kota-kota tersebut berfungsi baik pada saat mereka itu didirikan, tetapi perkembangan jaman membuat pola tertentu tidak dapat berperan dengan baik, sehingga tetap menimbulkan permasalahan. Dalam kaitan ini, baik tidaknya suatu bentuk kota agak nisbi dan kebaikannya tentu perlu sesuai dengan ukuran tertentu.

Pakar kota Kevin Lynch (1981) amat mengagumi kota ideal jaman dulu yang berdasarkan norma, seperti model kosmologis dan mesin dalam menggariskan polanya. Berdasarkan contoh tersebut dia mencoba mengusulkan model bukan melalui pola, melainkan matra kinerja bagi kota yang baik untuk masa kini. Matra pertamanya adalah

vitalitas (*vitality*); kedua rasa (*sense*); ketiga kecocokan (*fit*); keempat akses (*access*); dan kelima kendali (*control*) sebagai tolok ukur utama. Kemudian dia menambahkan efisiensi dan keadilan sebagai tolok ukur tambahan. Karena isu kedukungan (*sustainable*) belum mencuat pada saat itu, maka Lynch belum memasukkan faktor keterdukungan secara eksplisit dalam kategorinya. Faktor tersebut secara implisit tercakup dalam vitalitas. Tanpa dukungan warga, dengan sendirinya tidak akan bervitalitas. Vitalitas tidak akan muncul bila warga kota tidak merasa aman, sehat, dan nyaman. Kinerja ini belum semuanya dipenuhi oleh kota besar di Indonesia, apalagi dalam keadaan keamanan yang amat berkurang sekarang ini.

Rasa atau *sense* sebuah kota adalah kejelasan tata ruangnya yang mewujudkan bangunan, sehingga dapat membangkitkan rasa tertentu bagi warganya. Warga mampu mengidentifikasi tempat yang dialaminya dengan mudah. Perasaan akan ada tempat bagi kegiatan akan memberi arti bagi pemakainya, karena dapat mengaitkan ingatannya atas peristiwa yang khas dengan kehidupan yang pernah dijalaninya. Dalam hal ini, karya Lynch (1960) terdahulu amat membantu menjelaskan. Dalam suatu survei terhadap warga Jersey City, Lynch mendapat masukan bahwa citra yang mengesankan bagi warga kota atas kotanya terdiri atas unsur tengaran (*landmark*); tepian (*edges*); kawasan (*districts*); jalanan (*path*); dan noda-noda (*nodes*). Jalan (*path*) dan monumen (*landmark*) adalah unsur permanen sebuah kota. Monumen menghubungkan ingatan kolektif warga terhadap peristiwa yang menyangkut kotanya. Jalan adalah urat nadi bagi keberlangsungan kegiatan berkotanya. Keseimbangan di antara unsur-unsur ini akan membawa kesan yang berarti bagi warga terhadap kota.

Kecocokan antara ruang kota dan waktu yang diwakili oleh peristiwa serta kegiatan, bermakna bagi pemakainya. Tempat-tempat yang terbentuk berkat batas ruang kota tidak akan berarti bila tidak dapat diisi. Dalam hal ini, ada perbedaan yang bersifat sejarah dalam cara pemakaian ruang kota antara orang Indonesia dan Barat/Amerika. Di kota besar Indonesia, ruang umum adalah publik, sedangkan bangunan umum adalah pribadi dalam arti kurang dapat diakses oleh umum, dengan catatan ini tidak berlaku di desa. Bagi orang Eropa/Amerika, ruang umum malahan menjadi pribadi dan di dalam bangunan berlangsung kegiatan umum (Sennett 1977). Untuk memenuhi kecocokan dengan toleransi tinggi, ruang kota perlu mudah dimanipulasi dalam arti positif. Hal ini dapat kita temukan di beberapa kota tradisional, seperti Yogyakarta, Surakarta, dan juga sebagian Jakarta, dengan kemungkinan berubahnya kegiatan di suatu ruang terbuka pada jam tertentu, seperti untuk lesehan, atau warung tenda. Warisan kota tua itu mulai luntur untuk kawasan baru yang peruntukannya khusus. Kemampuan demikian memungkinkan terjadinya gejala *heterotopology* (Soja 1995), suatu konsep filsuf Prancis Foucault tentang kemampuan penggantian kegiatan yang selalu ada di suatu tempat. Hal ini juga memenuhi apa yang terkandung dalam konsep *chora* (Grosz 1995), yaitu gagasan orang Yunani tentang ruang yang bagaikan kandungan, siap menjadi sesuatu. Konsep tersebut berbeda dari ruang (*space*) sebagai lapangan yang terbuka lebar.

Akses berarti kemampuan memberi kesempatan bagi warga untuk mencapai sumber-sumber daya kota yang mereka butuhkan. Ini menuntut suatu penyebaran sumber-sumber pelayanan yang agak merata. Misalnya, fasilitas pendidikan, kesehatan, informasi, keadilan, keamanan, rekreasi, dan pelayanan lain. Selain pemerataan sumber-

sumber tersebut, juga perlu keterbukaan, sehingga pencapaian dapat seadilnya tersebar bagi warga. Dalam beberapa segi, kota-kota di Indonesia mampu menyediakan kemudahan pada tingkat yang mendasar, namun tidak untuk semua golongan. Sementara itu, ada golongan umur yang tidak dapat mencapai pelayanan olahraga, rekreasi, dan bermain. Pelayanan untuk pemakaman juga masih jauh dari memadai.

Pengendalian menyangkut lembaga pengendalian oleh kota praja. Lembaga membuahkan aturan-aturan yang menyangkut hak penggunaan ruang. Ruang kota terbuka untuk warganya dengan aturan, bukan tanpa batas. Aturan-aturan tersebut perlu tanggap dan terbuka untuk suatu perbaikan atau tinjauan sesuai dengan konteks. Tanpa pengendalian akan terjadi kesewenangan. Kota-kota besar di Indonesia masih lemah dalam perangkat ini. Warga menganggap remeh atas lahan kosong atau pinggir sungai yang tidak terkendali. Demikian pula dengan jalan raya yang dikuasai oleh mereka yang tidak berhak.

Matra kinerja usulan Kevin Lynch ini sudah mencakup unsur-unsur dasar bagi suatu kota untuk berkualitas baik. Untuk mencapai tingkat kinerja yang baik, tata ruang kota tampaknya sulit ditentukan oleh satu atau dua orang yang berkuasa seperti jaman dulu. Namun demikian, ada indikasi bahwa bentuk kota itu dapat tidak tergantung dari kegiatan yang ditampungnya. Dengan kata lain, bentuk tertentu mampu menampung kegiatan yang berbeda. Perubahan kegiatan di suatu bangunan juga lazim kita alami. Dalam hal ini, *archetype* keruangan tertentu tetap memungkinkan keberlangsungan suatu bentuk pemerintahan dan masyarakat yang berbeda dari faktor utama yang membuatnya timbul. Sebagai contoh Washington, D.C. dan Canberra memperlihatkan bentuk kota *ber-archetype Radiant Axes* tanpa menerapkan

cita-cita perluasan kekuasaan seperti penjajah. Ini berarti matra kinerja Lynch dapat juga terlepas dari wujud baku. Lalu mengapa kita memerlukan suatu pernyataan wujud yang mencolok mata agar kota kita dapat disejajarkan dengan kota dunia lain? Tampaknya di sini ego penguasa berbicara dan prestise tetap merupakan angan-angan manusia yang berada dalam alam bawah sadarnya yang bila ada kesempatan akan muncul ke permukaan kesadaran. Prestise memerlukan simbol untuk menyatakannya. Simbol itu produk kebudayaan. Di sinilah peran antropologi yang menekuni simbol dan kebudayaan dapat berbuat banyak.

Masalah kota kita: lingkungan daur hidup

Warga kota itu amat beragam dari segi umur dan jenis kelamin, belum terhitung pengubah latar belakang kebudayaan kelompok-kelompok sosial. Dari segi umur, manusia memiliki daur hidup yang tak terulangi dalam perjalanan hidupnya. Setiap manusia akan mengalami kelahiran, masa kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, dan meninggal hanya satu kali. Setiap tingkatan daur menuntut kebutuhan keruangan tertentu dengan syarat-syarat yang berbeda. Kebutuhan demikian selalu terselesaikan dalam lingkungan yang bertradisi kuat, karena yang menjadi pusat kegiatan dalam kehidupan sehari-hari adalah lingkungan 'dekat rumah'. Selain itu, masyarakat yang berinteraksi sebagian besar berlatar belakang kebudayaan serupa. Keadaan ini tentu tidak berlaku di kota besar masa kini di dunia, yang bila berkegiatan selalu jauh dari rumah. Ini adalah akibat dari pemintakan (*zoning*) lahan yang menentukan satu kegiatan, dalam satu pintak (*zone*), sehingga bekerja, berekreasi, berolahraga, dan bertemu teman menjadi serba jauh. Di desa, waktu seakan-akan berjalan lebih lambat dan warga dapat menikmatinya dengan tenang. Di

kota besar, waktu mengejar kegiatan, karena semua seakan terjadwal.

Dengan penyusutan baku (standar) ruang kota Jakarta, misalnya, terjadi kekurangan ruang bermain bagi anak-anak. Usia masa kanak-kanak adalah usia ingin tahu. Cara terbaik untuk menyalurkan hasrat mereka adalah penjelajahan. Di desa atau lingkungan bertradisi kuat, alam raya amat luas, sehingga hasrat mereka tersalur. Alam mendidik mereka tentang banyak hal dan, melalui pengalaman, mereka menarik nilai dari contoh-contoh yang tertera dalam tata nilai bermasyarakat sejak kecil. Hal demikian amat berbeda dari lingkungan kota di Indonesia. Penyusutan baku dan ketak-berdayaan menyediakan ruang bermain dan menjelajah membuat mereka memakai jalan umum atau, bahkan, jalan raya untuk menyalurkan hasrat mainnya. Arsitek ternama Amerika Louis Kahn pernah mengatakan, 'Kota adalah tempat seorang anak yang berada di dalamnya tahu dia bakal jadi apa (Wurman 1986).' Dalam kaitan itu, bila kota memberi tahu hal-hal yang keras, maka hari depan anak-anak kota itu dapat kita bayangkan.

Penyusutan baku juga tidak memberi ruang gerak yang cukup bagi remaja yang dalam usianya sedang menghadapi pancaroba dan dorongan dahsyat. Remaja tidak menemukan tempat untuk menyalurkan energinya. Desa, yang beruang terbuka alami, tentu mampu meredam kebutuhan remaja. Penyertaan kelompok remaja dalam kehidupan orang dewasa yang cukup intensif juga membantu mengendalikan peluapan kebutuhan tersebut. Kontrol sosial yang ketat berkat lingkungan dekat rumah mendekatkan nilai masyarakat dengan nilai remaja. Di kota besar, ruang terbuka/umum sering menjadi tempat berbisnis atau *shopping mall*. Mal tidak dapat menggantikan lapangan olahraga yang menjadi ajang pertandingan, sebagai penunjukan keakuan dan pelampiasan energi remaja yang

berlimpah. Sekolah umum seyogianya memberikan lapangan ini. Namun, karena baku sekolah umum itu menyusut, maka tidak ada lapangan yang cukup bagi kebutuhan jasmani yang sekaligus menjadi tempat penyaluran kejiwaan remaja. Sebagai akibatnya, jalan umum akan menjadi ruang terbuka bagi mereka untuk menunjukkan solidaritas berkelompok, identitas diri dan kelompok yang wajar. Dari sudut pandang ini, perkelahian remaja sulit dihindarkan selama tidak ada ruang yang cukup bagi mereka. Ini hanya salah satu faktor. Tentu masih ada faktor lain yang ikut mendorong perkelahian massal itu.

Baku ruang kota memakai ukuran orang dewasa dan kendaraan bermotor menjadi tolok ukur. Pemintakan lahan juga mengacu pada kebutuhan orang dewasa. Dengan demikian, dari segi daur hidup, kebutuhan orang dewasa agak memadai. Namun, baku umum kebutuhan ruang kota tidak memasukkan pejalan kaki sebagai bagian utama. Trotoar adalah milik umum yang sering dipakai oleh penjaja makanan, sehingga pejalan kaki terpaksa memakai jalan kendaraan. Pemakaian ruas pejalan kaki dan, bahkan, jalan umum mungkin ada hubungannya dengan konsep pemilikan dan toleransi pemakaian yang berlaku di desa. Tanpa pemahaman lebih jauh tentang kebiasaan ini, perancang tak akan mampu menyelesaikan masalah ini yang bagaikan lingkaran setan.

Bagaimana dengan usia lanjut dan orang cacat? Kota besar menyediakan ruang yang kurang bersahabat terhadap mereka yang berusia lanjut atau cacat. Ruang kota dengan pengendalian yang minimal dan syarat minimal amat membahayakan kaum tua dan kaum cacat. Perilaku sebagian besar warga yang tidak menghormati orang usia lanjut dan cacat membuat kota kita tidak manusiawi. Hal demikian jarang terjadi di desa atau kota tradisional yang warganya amat menghargai sesepuh.

Kota besar, seperti Jakarta, kurang bersahabat dengan orang mati. Lahan makam cenderung digusur bila ada kepentingan pengembangan demi uang yang masuk ke kota praja. Makam dalam kebudayaan beberapa daerah di Indonesia malah menjadi suatu pusat permukiman. Makam juga dapat menyumbangkan taman yang menarik bagi warganya. Pada umumnya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang hormat pada mereka yang sudah meninggal. Pemintakan lahan seyogianya memasukkan makam sebagai suatu unsur penting dalam kategori rasa. Dengan demikian, sebagian dari sistem ekokota yang menyangkut taman hijau dapat menyeimbangkan pembangunan lain.

Masalah kota kita: orientasi perancangan

Model perancangan kota setelah Perang Dunia II semula amat dipengaruhi Charta Atena (CIAM 1933) yang membagi peruntukan yang tegas bagi lahan kota. Hasil perancangan demikian tidak memberi tempat bagi ketercampuran penggunaan, sehingga menimbulkan banyak masalah. Hal tersebut sempat mendapat kritik tajam dari ahli sosiologi Amerika Jane Jacobs (1961) yang menganggap model perancangan demikian tidak memperhatikan kepentingan wanita atau ibu rumah tangga. Sebagai akibatnya, ibu-ibu tidak lagi merasa aman di jalan dan lepas kendali atas kemungkinan mengawasi anak-anak mereka bermain dengan apartemen-apartemen tinggi. Kritik Jacobs membawa perubahan dalam perancangan kota. Namun, tetap belum memuaskan kaum perempuan yang menganggap perancang kota yang didominasi oleh pria itu terlalu memusatkan perhatian untuk kepentingan pria.

Bangunan yang mengisi ruang kota berbicara tentang suatu sistem yang berlaku. Bangunan memberi asosiasi. Sejarawan

Ong Hok Ham memberitahukan kita bahwa bangunan candi mencerminkan suatu sistem membawa ke luar masyarakat dan membiarkan mereka dilindungi oleh dewa-dewa. Bangunan beratap besar yang datang kemudian pada masa Islam menyatakan pengayoman. Dua pandangan hidup yang ternyata melalui bangunan ini adalah cerminan kebudayaan. Atap dan candi yang menjulang ke atas tetap suatu pengejawantahan pria, yang berkuasa.

Bila kita tinjau pernyataan wujud kota di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, dan Semarang, misalnya, gedung-gedung tinggi ada asosiasinya dengan kekuasaan uang yang juga sekaligus kekelakian. Hal tersebut agak ironis bila dugaan budayawan Amerika Lewis Mumford (1961)—bahwa permukiman awal yang muncul di permukaan bumi ini dibangun oleh wanita—benar. Dengan adanya peningkatan peran wanita dalam angkatan kerja, hendaknya faktor kebutuhan wanita perlu menjadi pertimbangan khusus dalam perancangan kota.

Akibat pertumbuhan ekonomi yang semu, kota-kota besar di Indonesia seakan-akan mendapatkan prestisenya melalui pembangunan gedung-gedung tinggi atas pengorbanan mereka yang tidak mampu. Salah satu konsekuensi dari hal itu adalah kehilangan identitas yang membumi, yaitu yang bersumber dari kekuatan sistem sendiri. Wajah yang muncul memang dapat menyejajarkan kota Indonesia dengan kota besar lain. Namun, dalam jiwanya belum. Ini menandakan suatu pemaksaan akan membawa perbenturan nilai.

Perancang seyogianya sadar bahwa pertumbuhan kota-kota besar di Indonesia merupakan suatu gejala tersendiri yang cirinya mirip dengan kota-kota Asia lainnya. Kota hasil *commandery* memberi lowongan bagi pendatang setelah kemerdekaan Indonesia untuk menempati lahan kosong dan tepi-tepi sungai yang tak mampu dikendalikan oleh

aparatus. Akibatnya, pembentukan permukiman tak teratur (di mata pengendali) amat dominan dan hal itu ikut mempersulit keseimbangan ekologi kota dengan pendangkalan dasar sungai. Jakarta pernah dijuluki kampung besar (*the big village*) yang hanya mengendalikan citra jalur utama kotanya, itu pun tidak merata. Warna tersebut bertahan cukup lama, mungkin sebagian berkat keberhasilan Program Perbaikan Kampung yang mendapat Anugerah Aga Khan tahun 1981 dan berkali-kali dipuji oleh Bank Dunia. Kampung kota juga produktif dan menyumbang kehidupan kota. Perancang kota perlu membedakan masalah kumuh dan kampung. Program yang memiliki kelebihan dan kekurangan ini seakan-akan mulai mengalah pada kebijakan peremajaan berkat penekanan atas nama ekonomi yang amat meningkat. Pertumbuhan semu itu memicu pendatang dalam jumlah yang lebih banyak ke kota yang cepat pertumbuhannya. Jakarta, misalnya, perlu menampung pendatang, sehingga memikirkan pembangunan ke atas dan ke pinggir dengan melibatkan wilayah Jawa Barat.

Pendatang yang berasal dari berbagai daerah ini membawa masalah masing-masing. Kebudayaan asal mereka menghadapi tantangan di lahan baru yang masyarakatnya sudah mulai memiliki sikap peralihan dari yang bergerak lambat ke bergerak cepat sesuai tuntutan suatu kota metropolitan. Mereka terjepit di antara tekanan perlu hunian dan kenyataan bahwa daerah dekat pekerjaan justru sedang mengalami bahaya penggusuran dengan ganti untung. Dalam hal ini, ada perubahan kebudayaan yang mengakibatkan mereka berperilaku tertentu untuk mempertahankan hidup. Perlu saya catat bahwa kebudayaan di sini bukan perilaku, melainkan suatu konteks interpretasi keilmuan. Dalam hal ini, kebudayaan adalah hubungan antarkonsep atau hasil manusia dengan konsep atau hasil manusia yang lain, tetapi bukan hubungan

konsep, atau hasil tersebut dengan organ tubuh manusia (White 1986).

Nilai cangkakan bersumber dari suatu proyeksi, bukan tumbuh dari kekuatan budaya, karena belum cukup waktu bagi pemanfaatnya untuk membudayakan hal-hal baru tersebut. Dari cara berlalu lintas saja warga kota di Indonesia mestinya belum mampu atau pantas memakai kendaraan. Sebagian besar dari mereka hanya tahu mengendalikan kendaraan, tetapi belum tahu bagaimana berlalu lintas dengan kendaraan. Kendaraan bermotor menuntut perilaku yang sesuai. Kecepatannya telah meninggalkan perilaku sopan santun pengendara dalam bermasyarakat. Pertumbuhan semu ini membuah perilaku semu dalam berkota. Bila keadaan ini berlanjut, niscaya kita akan ketinggalan terus dalam barisan kota dunia. Selain kehilangan jati diri, juga kehilangan arah.

Bagi pengamat kota di Asia, kota-kota Asia mencerminkan sejenis kekalutan. Hal ini tampak jelas pada kota di negara termaju di Asia, seperti Jepang (tidak termasuk Singapura). Bahkan ada yang mengatakan kekalutan itu hari depan kota di Asia. Artinya, kekalutan justru lebih mampu menghadapi perubahan. Kenyataan bahwa kampung tahan terhadap perubahan saya kira ada contohnya. Namun, ketahanan itu juga mencegah perubahan dan menghentikan perkembangan dalam batas tertentu. Dengan demikian, sikap membiarkan kekalutan tentu mudah kita anggap sebagai pelarian atas masalah yang dihadapi. Bagaimana pun, yang mengambil sikap akhir tetap yang berwenang.

Penentu terakhir tata ruang kota tetap akan berada di tangan kelompok orang tertentu. Oleh sebab itu, kebudayaan kelompok tersebut akan mewarnai corak keputusan mereka. Dalam hal ini, bila kita ingin melihat kota kita mampu berbicara sebagai kota yang baik, pengambil keputusan perlu ada bekal dalam memahami dinamika perkembangan dunia dan bertindak

secara lokal, tetapi bersikap seperti global. Masalah tata ruang tetap menjadi tanggung jawab besar bidang arsitektur dan perancangan kota, dan masalah kebudayaan yang berubah tetap menjadi tanggung jawab antropologi. Dalam perspektif ini kita menoleh pada dua bidang kajian ini.

Kota Indonesia abad ke-21: peran arsitektur dan antropologi

Memasuki abad ke-21 ini kota-kota di Indonesia akan menghadapi persaingan dalam pelayanan ruang kota. Ruang tersebut perlu mendukung kegiatan warganya, sehingga dapat didukung pula oleh warganya. Apa akibat suatu perubahan jaman dari industri ke informasi, apa konsekuensi pengejaran identitas kelompok dalam tata ruang kota? Pertanyaan ini tidak dapat dijawab oleh satu atau dua disiplin ilmu. Namun, dalam keterbatasan pembahasan ini, saya hanya memupuk pada kemungkinan berperannya dua bidang kajian yang cukup penting ini.

Arsitektur adalah suatu bidang kajian tentang tata ruang. Arsitek adalah orang yang membuat arsitektur itu menjadi kenyataan. Konsekuensinya adalah arsitek perlu bertanggung jawab dalam batas tertentu atas kualitas ruang hasil buatannya. Untuk itu, arsitek perlu mengetahui tentang perilaku dan nilai yang dianut oleh pemakainya, sehingga dapat memberikan tata ruang yang sesuai dengan harapan. Ruang dalam pengertian tradisi Latin adalah suatu keterbukaan tanpa batas. Urusan arsitek adalah memotong sebagian dari ketakterhinggaan ini sedemikian rupa, sehingga memberi makna bagi kegiatan manusia yang berlangsung di dalamnya (Moore dan Allen 1975). Bila yang dihadapi seorang arsitek adalah masalah interaksi terbatas antarmanusia di dalam ruang ciptaannya, maka dia lebih mudah mengamati perilaku dan nilai pemakai yang terlibat.

Lain halnya bila interaksi itu demikian kompleks seperti yang terjadi di ruang umum perkotaan. Pada saat perancangan kota menjadi bagian dari arsitektur, arsitek banyak menentukan pola kota. Bahkan, kota-kota besar sekarang ini tata ruangnya banyak ditentukan oleh arsitek, meski telah ada bidang planologi. Hal ini disebabkan oleh keterlibatan arsitek dengan tata ruang lingkungan.

Antropologi, dalam arti kata sesungguhnya, adalah kajian tentang manusia. Namun dalam kenyataannya, telah banyak kajian yang sudah menjadi bagian disiplin lain seperti kedokteran yang mempelajari sisi kesehatan tubuh manusia, psikologi yang mempelajari sisi jiwa manusia, sosiologi yang mempelajari apa yang dilakukan oleh kelompok manusia, dan sejarah yang mempelajari kejadian-kejadian manusia. Dengan kenyataan ini, antropologi menjadi salah satu bidang kajian tentang manusia. Kini antropologi membagi diri menjadi dua, yaitu antropologi fisik dan antropologi kebudayaan. Tentu ini adalah versi Amerika. Antropologi kebudayaan di Inggris menjadi antropologi sosial. Namun, cakupan kajian bidang ini tetap dapat dimasukkan ke dalam dua kelompok besar ini.

Banyak karya antropologi tentang kebudayaan kelompok etnis tertentu mencakup penggambaran hunian cukup lengkap. Namun, pencatatan antropologis tetap bukan suatu gambaran arsitektur. Gambaran arsitektur menyangkut penggambaran tentang penciptaan batas ruang dengan kebudayaan tektoniknya (Frampton 1995). Ini berarti ada pencatatan rinci tentang konstruksi yang berhubungan dengan budaya membangun yang melibatkan bahasa tangan (Mallgrave dan Hermann 1989). Terlepas dari itu, catatan antropologis amat membantu arsitek memahami seluk-beluk makna dan cara pembagian ruang atau tempat suku-suku tertentu yang selama ini mereka abaikan. Mulai dari Lewis Henry

Morgan pada abad lalu (1965)—yang mengungkapkan kehidupan dan rumah Indian Amerika—hingga karya arsitek antropolog Rapaport (1969, 1982, 1984, 1990), mata dunia arsitektur terbuka lebar menerima kenyataan tentang perancangan dunia lain yang lebih spontan ketika berhadapan dengan lingkungan alami dengan berdasarkan kebudayaan dan hubungan sosial sebagai dasar utama dan faktor-faktor alami lain sebagai faktor pembantu dalam mewujudkan rumah. Kebudayaan, dalam kaitan itu, juga berperan utama dalam penentuan tata ruang kota.

Kekuatan antropologi kebudayaan yang erat hubungannya dengan arsitektur adalah cara perolehan pengetahuan secara langsung melalui pengamatan terlibat di lapangan. Arsitek dalam berkarya perlu mengamati keadaan lapangan. Namun, arsitek lebih menaruh perhatian pada keadaan fisik. Hal itu adalah akibat cara mereka dididik di sini yang lebih menitikberatkan pada masalah teknik daripada perilaku. Dengan melakukan pengamatan seperti yang dilakukan oleh ahli antropologi, arsitek akan mendapat pengetahuan yang lebih dalam mengenai manusia yang bakal memanfaatkan ruangnya. Bila dia memperluas jangkauan ke ruang kota, maka cara keterlibatan langsung yang tanpa prasangka pribadi dapat membantu mengungkapkan hasrat pemakai. Bukan hasrat pribadinya yang diproyeksikan ke dalam tata ruang.

Dengan mengikuti perkembangan dua gejala dunia menyongsong abad ke-21 ini, gejala-gejala tersebut dapat diterjemahkan oleh ahli antropologi ke dalam tanda-tanda kebudayaan. Penerjemahan tersebut dapat dipakai oleh arsitek dalam membaca perubahan tata ruang yang bakal mengisi kota besar kita.

Catatan penutup

Setelah menguraikan dengan panjang lebar tentang masalah kota, kini tiba saatnya saya

memberi beberapa catatan sebagai penutup tulisan ini.

Pertama, tradisi berkota sudah cukup lama berlangsung, yaitu sejak istilah *nagara* dikenal. Namun dalam perkembangannya, pola *nagara* menyusut dan pola paksaan, *commandery*, menjadi dominan. Dua jenis sistem ini berkonsekuensi terhadap kebudayaan berkota. Hal itu belum menjadi pelajaran utama perancang kota dan arsitek.

Kedua, konsep penataan ruang kota besar sekarang ini terlalu berorientasi pada kepentingan uang, bukan secara adil untuk semua warga. Sebagai akibatnya, kepentingan hakiki warga, seperti kebutuhan yang berdasarkan daur hidup, peningkatan peran wanita, dan penyesuaian kebudayaan warga yang beraneka ragam, agak diabaikan oleh penguasa kota.

Ketiga, tantangan masa depan adalah kedatangan masyarakat jaringan yang mungkin akan tercermin melalui ruang kota. Kita belum tahu apa wujud ruang demikian. Jelas bahwa tantangan tersebut berkonsekuensi pada perubahan kebudayaan berkota. Pembauran desa-kota adalah suatu gejala yang menandakan sebagian gejala tersebut dari segi ruang; dan — oleh karenanya — memerlukan perhatian perancang.

Keempat, konsep tata ruang perlu berorientasi pada kemampuan mengantisipasi perubahan. Dalam hal ini tempat pertemuan,

seperti pasar, yang berakar pada tradisi perlu mendapat definisi ulang. Peruntukan yang monolitik seperti sekarang ini perlu ditinjau kembali. Di sini peran pengetahuan budaya dan perilaku pemakaian menjadi penting.

Kelima, kenyataan bahwa kota besar di Indonesia berkaitan erat dengan muara dan sungai masih belum menjadi prioritas utama pengembangan. Pengembangan kawasan sungai dan muara perlu memperhitungkan perubahan kebudayaan bermukim.

Keenam, matra kinerja bentuk kota yang baik dapat menjadi tolok ukur yang disesuaikan dengan konteks Indonesia. Dalam hal ini, khusus mengenai citra, perlu mendapat perhatian dari penentu kebijakan, karena prestise dan simbol yang menentukan pernyataannya juga merupakan bidang kajian kebudayaan yang masih belum cukup dipelajari oleh perancang kota. Simbol dan prestise mungkin tertanam dalam *archetype* manusia yang akan tampil meruang. *Archetype* memiliki matra universal, maka di masa depan faktor itu tetap akan menonjol.

Ketujuh, tata ruang kota adalah tanggung jawab multidisipliner yang perlu bekerja secara antardisiplin. Disiplin arsitektur yang berkaitan dengan penataan ruang dan disiplin antropologi yang berkaitan dengan budaya yang memaknakan ruang perlu berperan aktif dalam menentukan tata ruang dalam menghadapi abad ke-21.

Kepustakaan

Castells, M.

- 1996 'The Rise of Network Society', *The Information Age: Economy, Society and Culture*, vol. 1. Oxford: Blackwell.
- 1997 'The Power of Identity', *The Information Age: Economy, Society and Culture*, vol. 2. Oxford: Blackwell.
- 1998 'The End of Millenium', *The Information Age: Economy, Society and Culture*, vol. 3. Oxford: Blackwell.

- CIAM
 1933 'Charter of Athens: Tenets', dalam U. Conrads (1975, peny.) *Programs and Manifestoes on 20th-Century Architecture*. Cambridge, Massachusetts: MIT. Hal. 137-145.
- Doxiadis, C.A.
 1968 *Ekistic: Introduction to the Science of Human Settlements*. London: Hutchinson.
- Frampton, K.
 1995 *Studies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture*. Cambridge, Massachusetts: MIT.
- Goode
 1978 *The Celebration of Heroes: Prestige as a Control System*. Berkeley: University of California.
- Grosz, E.
 1995 'Women, Chora, Dwelling', dalam S. Watson dan K. Gibson (peny.) *Postmodern Cities and Spaces*. Oxford: Blackwell. Hal. 47-58.
- Jacobs, J.
 1961 *The Death and Life of Great American City*. New York: Random House.
- Leaf, M.
 1988 *Of Cities and Systems: Urban Transformations in Precolonial Southeast Asia*. Thesis Master belum dipublikasikan. Berkeley: University of California.
- Lobell, M.
 1983 'Spatial Archetypes', *Revision* 6(2):69-82.
- Lynch, K.
 1960 *The Image of the City*. Cambridge, Massachusetts: MIT.
 1981 *A Good City Form*. Cambridge, Massachusetts: MIT.
- Mallgrave, H. dan W. Hermann
 1989 *The Four Elements of Architecture and Other Writings of Gottfried Semper*. Cambridge: Cambridge University.
- McGee, T.G.
 1969 *The Southeast Asian City: A Social Geography of the Primate Cities of Southeast Asia*. New York: Praeger.
 1989 'The Future of the Asian City: The Emergence of Desa-Kota Regions', dalam *Proceeding, International Seminar and Workshop on the Southeast Asian City of the Future*. Indonesian Institute of Architects, the Aga Khan Program for Islamic Architecture at Harvard University and Massachusetts Institute of Technology. Hal. 10-19.
- Moore, C. dan G. Allen
 1975 *Dimensions: Space, Shape and Scale in Architecture*. New York: Architectural Record.
- Morgan, L.H.
 1965 *Houses and Houselife of the American Aborigines*. Chicago: University of Chicago.
- Mumford, L.
 1961 *The City in History*. New York: Harcourt Brace.
- Rapaport, A.
 1969 *House Form and Culture*. New Jersey: Prentice Hall.

- 1982 *The Meaning of the Built Environment: A Nonverbal Communication Approach*. Beverly Hills: Sage.
- 1984 'Culture and the Urban Order,' dalam J.A. Agnew, J. Mercer, dan D.E. Sopher (peny.) *The City in Cultural Context*. Boston: Allen and Unwin. Hal. 50-75.
- 1990 *History and Precedent in Environmental Design*. New York: Plenum.
- Sennett, R.
1977 *The Fall of Public Man: On the Sosial Psychology of Capitalism*. New York: Vintage.
- Soja, E.W.
1995 'Heterotopologies: A Remembrance of Other Spaces in Citadel-LA,' dalam S. Watson dan K. Gibson (peny.) *Postmodern Cities and Spaces*. Oxford: Blackwell. Hal.13-34.
- Surjomihardjo, A.
1977 *Pemekaran Kota Jakarta*. Jakarta: Djambatan.
- Tjahjono, G.
1989 *Cosmos, Center and Duality in the Javanese Architectural Tradition: The Symbolic Dimensions of House Shapes in Kota Gede and Surroundings*. Disertasi doktoral belum dipublikasikan. Berkeley: University of California.
- Wheatley, P.
1983 *Nagara and Commandery: Origin of the Southeast Asian Urban Tradition*. Chicago: University of Chicago.
- White, L.A.
1986 'Culture,' dalam *Encyclopaedia Britannica*, vol. 16: Macropaedia, edisi 15, Chicago.
- Wurman, R.S.
1986 *What Will Be Has Always Been: The Words of Louis I. Kahn*. New York: Rizzoli.

**PENJUAL PISANG EPE DI KOTA MAKASSAR
(SUATU STUDI ANTROPOLOGI PERKOTAAN)**

SKRIPSI

Oleh :

NURUL IFADA ARSYAD
NIM : E511 09 262

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana
Pada Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin

**JURUSAN ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

ABSTRAK

Nurul Ifada Arsyad, (E511 09 262) jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, dengan judul skripsi “Penjual Pisang *Epe* Di Kota Makassar (Suatu Studi Antropologi Perkotaan)” (Di bawah bimbingan **Prof. Dr. M. Yamin Sani, MS** sebagai pembimbing I, dan **Prof. Dr. Pawennari Hijjang, MA** sebagai pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pendatang memilih pekerjaan sebagai penjual pisang *epe*, kondisi kehidupan penjual pisang *epe*, dan persepsi penjual pisang *epe* terhadap mata pencaharian di kota makassar.

Penelitian ini dilaksanakan disekitar pantai Losari Makassar, dan kantor kelurahan Bulogading, Maluko dan Losari Makassar. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, yaitu penjual pisang *epe* dan staf kelurahan yang berada disekitar pantai Losari sehubungan dengan penulisan skripsi ini dan data yang diperoleh dikumpul kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1). Lima keluarga memilih untuk migrasi dari desa ke kota guna menjual pisang *epe* dengan adanya peran kekerabatan didalamnya baik tetangga, saudara dan keluarga lainnya yang mengajak untuk urbanisasi, selain itu adanya faktor pendorong dari daerah asal dan faktor penarik dari kota. (2). Kondisi kehidupan penjual pisang *epe* terutama dalam lima keluarga dapat ditunjukan dari kondisi pangan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan air bersih yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. (3). Persepsi dari lima keluarga penjual pisang *epe* terhadap pekerjaannya di kota Makassar sangatlah sulit apalagi dengan tingkat pendidikan yang dimiliki hanya pada tingkat SD dan SMP saja yang membuat mereka untuk bekerja di sektor informal khususnya penjual pisang *epe* dengan ketekunan dan kesabaran yang dimiliki sehingga mampu menghidupi kebutuhan sehari-hari keluarganya.

ABSTRACT

Nurul Ifada Arsyad, (E511 09 262), Department of Anthropology, the Faculty of Social and Political Science University of Hasanuddin, thesis with the title "Epe Banana Sellers In Makassar (A Study of Urban Anthropology)" (Under the guidance of Prof. Dr. M. Yamin Sani, MS as a supervisor I, and Prof. Dr. Pawennari Hijjang, MA as a supervisor II).

This study aims to explain and describe the factors that influence migrants choose to work as a epe banana seller, living conditions epe banana seller and perceptions epe banana sellers on livelihoods in the city of Makassar.

The research was carried out around the Makassar Losari beach. Data was collected through observation and interviews with the parties involved, the seller of bananas Epe and village staff who were around the beach Losari connection with this thesis and obtained data collected is then processed and analyzed descriptively.

The results showed that : (1). Five families have chosen to migrate from rural to urban areas in order to sell epe bananas with the role of kinship in it good neighbors, siblings and other relatives who invite to urbanization, other than that the driving factors of the area of origin and pull factors of city (2). Epe banana salesman living conditions, especially in a family of five can be given of the condition of food, clothing, shelter, health and water used in meeting the needs of everyday life (3). Perception of the five families epe banana sellers on his work in the city of Makassar is very difficult especially with the level of education held only at the level of elementary and junior high school are making them to work in the informal sector, especially the epe banana seller with perseverance and patience are held so as to support the needs of family everyday.

KATA PENGANTAR



Segala Puji Syukur pada Allah SWT atas segala limpahan berkat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul **"Penjual Pisang Epe Di Kota Makassar (Suatu Studi Antropologi Perkotaan)** disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program studi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis banyak menemukan hambatan serta rintangan tetapi berkat keyakinan, kesabaran, kekuatan, do'a dan bantuan dari berbagai pihak, penulis akhirnya pantang menyerah hingga selesainya skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluargaku tercinta yang sejatinya menjadi sumber ketabahan, inspirasi dan pendengar sejati dari curahan hati dan kesedihan yang penulis rasakan dalam menjalani studi. Gelar dan karya ini penulis persembahkan kepada Ayahanda **Arsyad Massi** dan Ibunda **Hj. Rukmini, S.Pd**, serta saudara-saudaraku terkasih **Silvana S.Hut**, **Dewi Arifiani** dan **Faras**

Maulana. Terima kasih atas segala doa, pengorbanan, kasih sayang dan kebaikan tanpa batas yang selama ini dicurahkan untuk penulis.

Dengan penuh rasa hormat, penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya beserta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing **Prof. Dr. M. Yamin Sani, MS** selaku pembimbing I dan **Prof. Dr. Pawennari Hijjang, MA** selaku pembimbing II yang telah dengan ikhlas meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk memberikan nasehat serta bimbingan yang teramat berarti ditengah kesibukan yang sangat padat, yang telah menuntun penulis dengan penuh kesabaran dan keterbukaan, sejak dari persiapan sampai dengan selesainya skripsi ini.

Penghargaan setinggi-tingginya kepada **Dr. Muhammad Basir, MA, Dr. Tasrifin Tahara, M.Si, Dra. Hj. Nurhadelia. FI, M.Si,** dan **Muhammad Neil, S.Sos, M.si** selaku dosen penguji atas segala kritikan, saran dan arahan yang telah diberikan dalam penyempurnaan penyusunan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan pula kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Idrus. A. Paturusui, Sp.B.Sp.Bo** selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.
2. **Prof. Dr. Hamka Naping, MA** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.

3. **Dr. Mungsi Lampe, MA** selaku Ketua Jurusan dan **Drs. Yahya, MA** selaku Sekretaris Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.
4. **Dr. Muhammad Basir, MA** selaku Penasehat Akademik dan seluruh Staf Pengajar yang telah mendidik penulis dalam proses pendidikan di Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
5. Seluruh **Staf Karyawan** Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (Kak Mina, Pak idris dan Pak Yunus) yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
6. Seluruh teman-teman mahasiswa antropologi angkatan 2009 yang penulis tidak dapat sebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas dorongan semangat dan banyak bantuan yang telah diberikan pada penulis, sehingga penulis termotivasi dalam penyusunan skripsi ini.
7. Serta seluruh pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini terimah kasih banyak atas semuanya.

Semoga Allah SWT membantu budi baik semua yang penulis sebutkan diatas.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan segala keikhlasan, kerendahan hati serta tangan terbuka, sumbangan saran, koreksi maupun kritik yang sifatnya

membangun sangat Penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan selanjutnya. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi kita semua, Amin.

Makassar, Agustus

2013

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi dimaksudkan sebagai suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Laju pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar berada pada peringkat paling tinggi di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dalam lima tahun terakhir, dimana rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Makassar diatas 9 persen. Bahkan, pada tahun 2008 lalu, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar mencapai angka hingga 10,83 persen. Pesatnya pertumbuhan ekonomi saat itu, bersamaan dengan gencarnya pembangunan infrastruktur yang mendorong perputaran ekonomi, seperti pembangunan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, jalan tol dan sarana bermain kelas dunia yaitu Trans Studio Makassar yang terletak di Kawasan Kota Mandiri Tanjung Bunga. Renovasi tahun 2008 inilah yang membuat tiga buah layar, dan teks modern "Pantai Losari" di tambah dengan teks "City Of Makassar", sehingga anjungan tersebut menjadi

salah satu icon dari Kota Makassar. (www.fajar.co.id/read. Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar Tertinggi di Indonesia). Di akses pada tanggal 1 Maret 2013).

Sejak memulai perubahan Kota Makassar pada tahun 2004, yang paling pertama dilakukannya adalah mengubah posisi Kota Makassar menjadi ruang keluarga Kawasan Timur Indonesia (KTI) dari yang sebelumnya di kenal sebagai pintu gerbang Indonesia Timur. Seluruh aktivitas sosial maupun ekonomi akan bertumpu di Kota Makassar. Para pelaku ekonomi dari beberapa Kawasan Timur Indonesia, menjadikan Makassar sebagai tempat transit atau daerah perlintasan, artinya kita tidak mendapatkan apa-apa. Ibarat ruang keluarga di sebuah rumah, maka Kota Makassar menjadi titik simpul Kawasan Timur Indonesia sehingga menjadi pusat pelayanan dan pengembangan distribusi jasa dan perdagangan,” Fajar online dalam situs www.fajar.co.id/read. Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar Tertinggi di Indonesia. Di akses pada tanggal 1 Maret 2013.

Pertumbuhan penduduk diperkotaan khususnya di Kota Makassar terus mengalami peningkatan, untuk menafkahi baik kehidupan dirinya sendiri maupun keluarganya membuat masyarakat melakukan usaha untuk bisa tetap bertahan hidup diperkotaan. Kota menjadi pusat pembangunan sektor formal, maka kota dipandang lebih menjanjikan bagi masyarakat desa. Kota bagaikan mempunyai kekuatan magis yang mampu menyedot warga desa, sehingga terjadi perpindahan penduduk

dari desa ke kota. Kondisi tersebut di atas dikenal dengan teori faktor pendorong dari daerah asal dan faktor penarik dari daerah tujuan dalam urbanisasi.

Dari sini munculah para pekerja dibidang sektor formal, namun Lapangan kerja formal yang tersedia mensyaratkan kemampuan dan latar belakang pendidikan tertentu yang sifatnya formal, sehingga tenaga kerja yang tidak tertampung dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya memilih sektor informal. Everett S. Lee (dalam Munir, 2000:120). Akan tetapi kota tidak seperti apa yang diharapkan kaum migran. Tenaga kerja yang banyak tidak dapat sepenuhnya ditampung disektor formal.

Fakta yang dapat dilihat adalah adanya ketidakmampuan sektor formal dalam menampung tenaga kerja, serta adanya sektor informal yang bertindak sebagai pengaman antara pengangguran dan keterbatasan peluang kerja, sehingga dapat dikatakan adanya sektor informal dapat meredam kemungkinan keresahan sosial sebagai akibat langkanya peluang kerja (Effendy, 2000:46). Sektor informal yang lebih berfikir tentang peluang kerja untuk mempertahankan hidup dengan mencari pendapatan daripada berfikir soal keuntungan (Manning dan Effendi, 1996:90).

Kemampuan sektor informal dalam menampung tenaga kerja didukung oleh beberapa faktor yaitu sifat dari sektor ini yang tidak memerlukan persyaratan dan tingkat keterampilan yang tinggi, sektor modal kerja, pendidikan ataupun sarana yang dipergunakan semuanya

serba sederhana dan mudah dijangkau oleh semua anggota masyarakat atau mereka yang belum memiliki pekerjaan dapat terlibat didalamnya.

Salah satu sektor informal yang menjadi fenomena di perkotaan adalah pedagang kaki lima (PKL). Dengan adanya keterbatasan lapangan kerja di sektor formal, pedagang kaki lima menjadi pilihan yang termudah untuk bertahan hidup. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan Jayadinata (1999:146) karakteristik sektor informal yaitu bentuknya tidak terorganisir, kebanyakan dari usaha sendiri, cara kerja tidak teratur dan biaya dari diri sendiri. Dapatlah diketahui bahwa betapa banyaknya jumlah anggota masyarakat memilih tipe usaha ini, karena mudah dijadikan sebagai lapangan kerja bagi masyarakat strata ekonomi rendah yang banyak terdapat di negara kita terutama pada kota besar maupun kota kecil.

Kehadiran pedagang kaki lima sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan perkotaan, dengan munculnya kesan buruk, kotor, kumuh dan tidak tertib. Hal ini ditunjukkan oleh penempatan sarana perdagangan yang tidak teratur dan tertata serta sering menempati tempat yang menjadi tempat umum. Akan tetapi adanya kebutuhan terhadap pedagang kaki lima oleh masyarakat menjadikan keberadaan para pedagang kaki lima pun semakin banyak. Masyarakat terutama yang kelas bawah masih membutuhkan pedagang kaki lima untuk memenuhi kebutuhan yang terjangkau. Dengan demikian, merebaknya jumlah pedagang kaki lima bukan semata-mata karena keinginan para pedagang

tadi untuk memperoleh pendapatan, tetapi lebih karena tuntutan pasar yang membutuhkan jasa pedagang kaki lima. Disamping itu jenis usaha ini juga memberikan dampak yang menguntungkan seperti mengurangi beban pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja, membantu proses daur ulang beberapa jenis sampah, serta menjadi alternatif terbaik bagi kelompok berdaya beli rendah.

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pedagang kaki lima mempunyai sisi positif, disamping sisi negatifnya. Hal ini merupakan dilema bagi pemerintah kota dalam mengatasi menjamurnya pedagang kaki lima. Disatu sisi keberadaan pedagang kaki lima dapat menyerap tenaga kerja yang tidak tertampung di sektor formal sehingga dapat mengurangi beban pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Disisi lain, keberadaan pedagang kaki lima memberikan kesan kotor, kumuh dan tidak tertib terhadap lingkungan perkotaan yang tidak diinginkan oleh pemerintah kota dalam menata kotanya.

Fenomena tersebut tidak hanya terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan Yogyakarta saja, melainkan juga terjadi di kota Makassar. Salah satu sektor yang kini menjadi perhatian pemerintah Sulawesi Selatan adalah sektor tenaga kerja yang sifatnya informal. Sektor kerja informal ini beroperasi pada tempat-tempat tertentu di setiap pusat keramaian kota Makassar. Terdapat beberapa komunitas pedagang kaki lima di kota Makassar, salah satu diantaranya adalah komunitas pedagang kaki lima Pantai Losari khususnya penjual pisang epe.

Sesuai dengan namanya komunitas ini beraktifitas di sepanjang kawasan Pantai Losari. Namun dengan adanya renovasi pantai losari Makassar mengakibatkan tergusurnya sebagian besar pedagang kaki lima khususnya pedagang pisang epe dari Taman Safari dan Kuliner Pantai Laguna, karena alasan faktor keamanan, sehingga para pedagang kaki lima termasuk pedagang pisang epe berkeliaran berjualan disepanjang Losari mengakibatkan terjadinya kemacetan lalu lintas kerana para penjual ini sebagian menempati fasilitas umum seperti pinggir jalan raya sepanjang pantai losari.

Disisi lain pisang epe merupakan jajanan penganan khas di negeri anging mammiri ini yang sangat mudah ditemukan di Pantai Losari dan menjadi bagian dari wisata kuliner. Pisang *epe* ini termasuk jajanan khas Makassar berbahan dasar pisang, selain es *pallu butung* dan es pisang *ijo*. Dalam bahasa lokal Makassar, kata *epe* memiliki arti jepit, dinamakan demikian karena proses pembuatannya yaitu pisang di *epek* atau dijepit dengan alat pres yang terbuat dari dua papan kayu.

Keberadaan pisang *epe* tidak bisa dilepaskan dari sejarah Pantai Losari itu sendiri. Penjual pisang *epe* di sekitar pantai losari telah ada sejak tahun 1970, bersamaan dengan meningkatnya keramaian di Pantai Losari, padahal sebelumnya para pedagang dilarang berjualan di pantai. Bermula dari lima gerobak dorong, kini sudah ratusan gerobak dorong pisang epe yang bisa ditemui di pinggir Pantai Losari. Bahkan dahulu Pantai Losari pernah dijuluki restoran pisang epe terpanjang di dunia.

Menikmati pisang epe hangat, sambil duduk dipinggiran jalan Pengibur Pantai Losari dan menyaksikan matahari terbenam di sore hari serta berada diantara keramaian pantai membuat keindahan panorama Pantai Losari dikenal sebagai icon Kota Makassar begitupun dengan salah satu makanan khas Kota Makassar yaitu pisang epe yang juga menjadi icon karena makanan ini telah didaftarkan dalam brosur-brosur pariwisata kota. Bahkan kisah pisang epe Pantai Losari ini menjadi kesan nostalgia yang telah didendangkan dalam lagu Anci Laricci yang liriknya berbunyi : (<http://daonlontar.blogspot.com/2013/02/pisang-epe-di-pantai-losari.html>) Di akses tanggal 5 Mei 2013

Jalang-jalangki di pantai losari / jangki lupa makan pisang epe / gula manisna pake duriang / enakna mamo bikin lupa utang.

Dengan aroma dan lezatnya pisang epe ini membuat penikmatnya bisa melupakan beban hidup seperti utang. Pisang epe sudah menyusantara, bahkan di beberapa daerah juga telah mengenal jajanan jenis ini, seperti di Padang menyebutnya dengan pisang gepeng, Samarinda menyebutnya dengan pisang gapit, di Ambon dan Kupang menyebutnya dengan pisang gepe, bahkan di Jawa dan Bali lebih populer dengan istilah *banana press*. Demikian juga bahwa pisang epe sebagai kue tradisional juga telah menjadi penganan modern yang disajikan di beberapa restoran di Kota Makassar. Bukan hanya dinikmati oleh kalangan dari masyarakat Sulawesi Selatan saja, tetapi juga masyarakat

luar daerah hingga banyak juga wisatawan manca negara yang mencoba dan mengemari makanan khas ini.

Keberadaan pedagang kaki lima khususnya penjual pisang epe cukup membantu mengatasi masalah pengangguran di kota Makassar, dan sebagai salah satu sumber pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah kota Makassar, tetapi disisi lain keberadaan pedagang kaki lima tersebut menimbulkan sejumlah permasalahan.

Dari fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah ***“Penjual Pisang epe di Kota Makassar (Suatu Studi Antropologi Perkotaan)”*** khususnya di kawasan Pantai Losari Kecamatan Ujung Pandang, dimana kawasan tersebut terdapat banyak para pedagang kaki lima terutama penjual pisang epe.

B. Fokus Kajian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kaum urban memilih pekerjaan sebagai Penjual Pisang epe di kota Makassar ?
2. Bagaimana kondisi kehidupan penjual pisang epe di kota Makassar ?
3. Bagaimana persepsi penjual pisang epe terhadap pekerjaan di kota Makassar ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kaum urban memilih pekerjaan sebagai Penjual Pisang epe di kota Makassar.
- b. Menggambarkan kondisi kehidupan penjual pisang epe di kota Makassar.
- c. Mendeskripsikan persepsi penjual pisang epe terhadap pekerjaan di kota Makassar.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan mengenai lima penjual pisang epe di pantai losari makassar, baik kepada Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Program studi S1 Antropologi dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik .
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah khususnya pemerintah kotamadya Makassar dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan dan upaya menahan laju pertumbuhan penduduk yang berasal dari daerah lain di sekitar kota Makassar.
- c. Penelitian ini sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi di Jurusan Antropologi dan memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Haanuddin.

D. Kerangka Konsep

Sejak terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia sekarang ini mengakibatkan banyak perusahaan tidak beroperasi lagi seperti sedia kala oleh karena ketidakmampuan perusahaan menutupi biaya operasionalnya sehingga timbul kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini juga memberi kontribusi terhadap peningkatan jumlah pengangguran yang umumnya bermukim di wilayah perkotaan. Demi mempertahankan hidup, orang-orang yang tidak tertampung dalam sektor formal maupun yang terkena dampak PHK tersebut kemudian masuk ke dalam sektor informal khususnya pedagang kaki lima (Herlianto, 1997:61).

Secara teoritis kelompok masyarakat yang diperkirakan paling terpuak dengan adanya situasi krisis ekonomi yang berkepanjangan adalah pedagang kaki lima yang termasuk kelompok masyarakat yang tidak stabil, mudah tergeser, rapuh dan jauh dari jangkauan pembangunan.

Manusia melakukan berbagai macam kegiatan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dengan daya dan tenaga serta dengan seluruh kemampuannya. Seperti yang diungkapkan oleh Koentjaraningrat bahwa ada paling sedikit tujuh macam dorongan naluri manusia, salah satu diantaranya yaitu dorongan untuk mempertahankan hidup. Dorongan ini memang merupakan suatu kekuatan biologi yang juga ada pada semua makhluk di dunia ini dan yang menyebabkan bahwa semua jenis makhluk

mampu mempertahankan hidupnya di muka bumi ini. (Koentjaraningrat, 2005:104).

Oleh karena itu, manusia berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebabkan oleh adanya dorongan untuk mempertahankan hidupnya, apalagi kebutuhan hidup manusia semakin meningkat seiring dengan perubahan dan perkembangan.

Selain itu pada masyarakat pra modern, kelompok kekerabatan dan kekeluargaan juga mempunyai peranan yang penting sebagai organisasi yang mempunyai berbagai fungsi, termasuk fungsi kontrol atas perilaku individu. Karena itu posisi individu, sebagian besar ditentukan oleh kelompok kerabat dan keluarga dimana ia dilahirkan dan dibesarkan. Sedang dalam berbagai situasi sosial, kekerabatan masih dimanfaatkan, misalnya untuk mengelola perusahaan, kekuasaan, ataupun permodalan. Juga dalam situasi tertentu, misalnya dalam hal ancaman terhadap kedudukan dalam usaha untuk memperoleh pekerjaan atau perumahan dan fasilitas-fasilitas lainnya, ataupun jaminan hukum, maka kekerabatan dapat berfungsi sebagai penolong. Demikian juga para pedagang kaki lima melakukan aktivitasnya sebagai penjual pisang *epe* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan adanya kelompok kekerabatan dan kekeluargaan di dalamnya.

a. Urbanisasi

Urbanisasi merupakan perpindahan atau pergeseran penduduk dari desa ke kota. Migrasi ke kota terjadi karena adanya perbedaan kemajuan antara kota dan desa. Kehidupan kota yang jauh lebih enak, banyak kesempatan kerja yang bisa diperoleh di kota, mengundang penduduk desa untuk datang ke kota. Sejalan dengan itu PJM. Nas (1979:42), mendefenisikan konsep urbanisasi yaitu :

“Urbanisasi adalah proses yang digerakkan oleh perubahan-perubahan struktural dalam masyarakat, sehingga daerah-daerah yang dulu merupakan daerah pedesaan dengan struktur mata pencaharian yang agraris maupun sifat kehidupan masyarakat lambat laun atau melalui proses yang mendadak memperoleh sifat kehidupan kota.”

Pada umumnya migrasi atau perpindahan penduduk erat kaitannya dengan faktor-faktor berikut ini:

1. Faktor Pendorong (*Push Factors*)

Faktor ini merupakan adanya dorongan dari daerah asal untuk melakukan perpindahan penduduk. Faktor tersebut antara lain karena kurangnya lapangan pekerjaan di daerah asal, pertambahan penduduk yang menyebabkan pengangguran nyata atau tersembunyi dan juga kurangnya penghasilan yang diperoleh, serta kondisi geografis daerah asal.

2. Faktor Penarik (*Full Factors*)

Faktor ini adalah karena adanya daya tarik yang menyebabkan seseorang melakukan perpindahan penduduk. Faktor tersebut

antara lain karena daya tarik ekonomi kota, banyak fasilitas kehidupan yang lebih memadai.

Banyak orang pergi ke pusat-pusat urban semata-mata karena desakan ekonomi, karena tingkat kelahiran di pedesaan lebih tinggi dan lapangan pekerjaan yang kurang. Adapun sebagian orang yang mengemukakan bahwa kemampuan mereka tertekan, dan ambisi mereka terhalang di lingkungan pedesaan dan karena itu, mereka berpaling kepada kemungkinan-kemungkinan yang ada di kota. Tentu saja, terdapat pula banyak dari mereka yang bermigrasi ke kota karena tertarik oleh alasan lain, misalnya melarikan diri dari tekanan politik dan sosial, mencari hiburan, petualangan, dan mereka yang suka pada kehidupan kerumunan.

Kesimpulan lain yang dapat ditarik mengenai urbanisasi adalah eratnya hubungan urbanisasi itu dengan mobilitas sosial. Semakin tinggi mobilitas sosial yang terdapat dalam suatu masyarakat semakin tinggi pula dorongan atau motivasi untuk bermigrasi dan berurbanisasi. Mobilitas sosial dapat dibagi ke dalam bentuk yakni mobilitas fisik dan mobilitas mental. Mobilitas fisik adalah gerak perpindahan penduduk (individual maupun kelompok), dari ruang sosial yang satu ke ruang sosial yang lain. Sementara mobilitas mental adalah gerak perubahan atau peralihan (transformasi) aspek-aspek sosio-psikologis pada manusia, dari pola satu ke pola yang lain.

b. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang hampir ada di setiap negara dan merupakan tantangan bagi setiap pemerintah yang berkuasa untuk menanggulangi kemiskinan di negaranya. Mengentaskan kemiskinan memerlukan proses dan waktu serta hal yang harus diutamakan adalah bagaimana merubah mind set (pola pikir, pola sikap dan pola tindak) masyarakat miskin untuk menjadi masyarakat yang mandiri dan mampu bersaing secara ekonomi.

Keterampilan dan kecakapan masyarakat miskin dalam mengelola segala sumber daya dan sumber dana yang diberikan pada mereka merupakan hal yang tidak bisa dikesampingkan. Tentunya hal itu dapat terwujud dengan memberikan pendidikan dan keterampilan kepada masyarakat miskin yang produktif baik bagi kaum muda maupun para orang tua yang berada di kantong-kantong kemiskinan.

Kemiskinan bukanlah komoditas politik namun kemiskinan adalah masalah sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius dan berkesinambungan, dilakukan secara terkoordinasi antar lembaga yang menjalankan program-program kemiskinan dan yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana membangun mental dan psikologis dari masyarakat miskin untuk bangkit dan keluar dari kemiskinan. Artinya harus ada kemauan dan tekad yang kuat dari masyarakat miskin sendiri untuk bekerja keras menghasilkan sebuah kerja nyata yang akan membawa mereka keluar dari kemiskinan dengan memanfaatkan program-program

penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah sehingga mereka dapat meraih kesejahteraan hidup dan keluar dari kemiskinan.

Kemiskinan sebagai sebuah tantangan harus dan terus diperjuangkan oleh seluruh elemen bangsa agar masyarakat miskin di Indonesia keluar dari kemiskinan dan yang pada akhirnya akan tercapainya masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera secara menyeluruh bagi rakyat Indonesia.

Fenomena kemiskinan bukan hanya terbatas kepada kurangnya keuangan, melainkan melebar kepada kurangnya kreatifitas, inovasi kurangnya kesempatan untuk bersosialisasi dengan berbagai potensi dan sumber daya yang ada, atau secara khusus persoalan itu telah melingkar diantara lemahnya penyeimbangan potensi diri dan tertutupnya potensi diri untuk berkembang di masyarakat, semua itu akan berlangsung apabila proses marjinalisasi dan pihak yang berkuasa berlangsung pula.

Akan tetapi di kota Makassar, dengan renovasi Pantai Losari membuat pengusuran terhadap pedagang khususnya penjual pisang epe mematikan usaha masyarakat kecil sekaligus ikon wisata [kulinier](#) Makassar, pengusuran yang terjadi hanya menimbulkan bibit kemiskinan baru, karena pedagang dapat menafkahi hidupnya dari hasilnya sebagai penjual pisang epe di pantai losari.

c. Sektor Informal

Manning dan Effendi (1996:75) mengemukakan bahwa gagasan sektor informal dilontarkan pertama kali oleh seorang antropolog asal Inggris yaitu Keith Hart dari University of Manchester dalam penelitiannya di suatu kota di Ghana pada tahun 1973. Istilah tersebut digunakan untuk menjelaskan sejumlah aktivitas tenaga kerja yang berada diluar pasar tenaga kerja formal yang terorganisir. Dikatakan “diluar pasar” karena sektor ini termasuk kelompok yang tidak permanen atau tidak ada jaminan tentang keberlangsungan pekerjaan yang dimilikinya. Kelompok informal menggunakan teknologi produksi yang sederhana dan padat karya, tingkat pendidikan dan ketrampilan terbatas dan dilakukan oleh anggota keluarga.

Istilah sektor informal semakin populer setelah ILO (*International Labour Organization*) melakukan penelitian di Kenya dan kemudian melanjutkan penelitiannya tersebut ke negara-negara berkembang lainnya. Pada penelitian tersebut istilah sektor informal dipergunakan sebagai pendekatan untuk membedakan tenaga kerja yang tergolong dalam dua kelompok yang berlainan sifatnya (Manning dan Effendi, 1996: 75).

Jan Bremen (dalam Manning dan Effendi, 1996:138) memperjelas pengertian sektor informal dengan menyatakan bahwa sektor informal menunjukkan fenomena perbedaan dua kegiatan yang mempunyai ciri-ciri yang berlawanan. Tenaga kerja formal adalah yang bergaji dalam suatu pekerjaan yang permanen. Sifat semacam ini biasanya dimiliki oleh

kegiatan yang saling berhubungan dalam suatu sistem yang terjalin dengan organisasi yang baik. Pada umumnya mereka yang terikat dalam kontrak kerja kelompok ini mempunyai syarat-syarat bekerja yang dilindungi oleh hukum. Di lain pihak, mereka yang berada di luar kelompok ini dinamakan sektor informal.

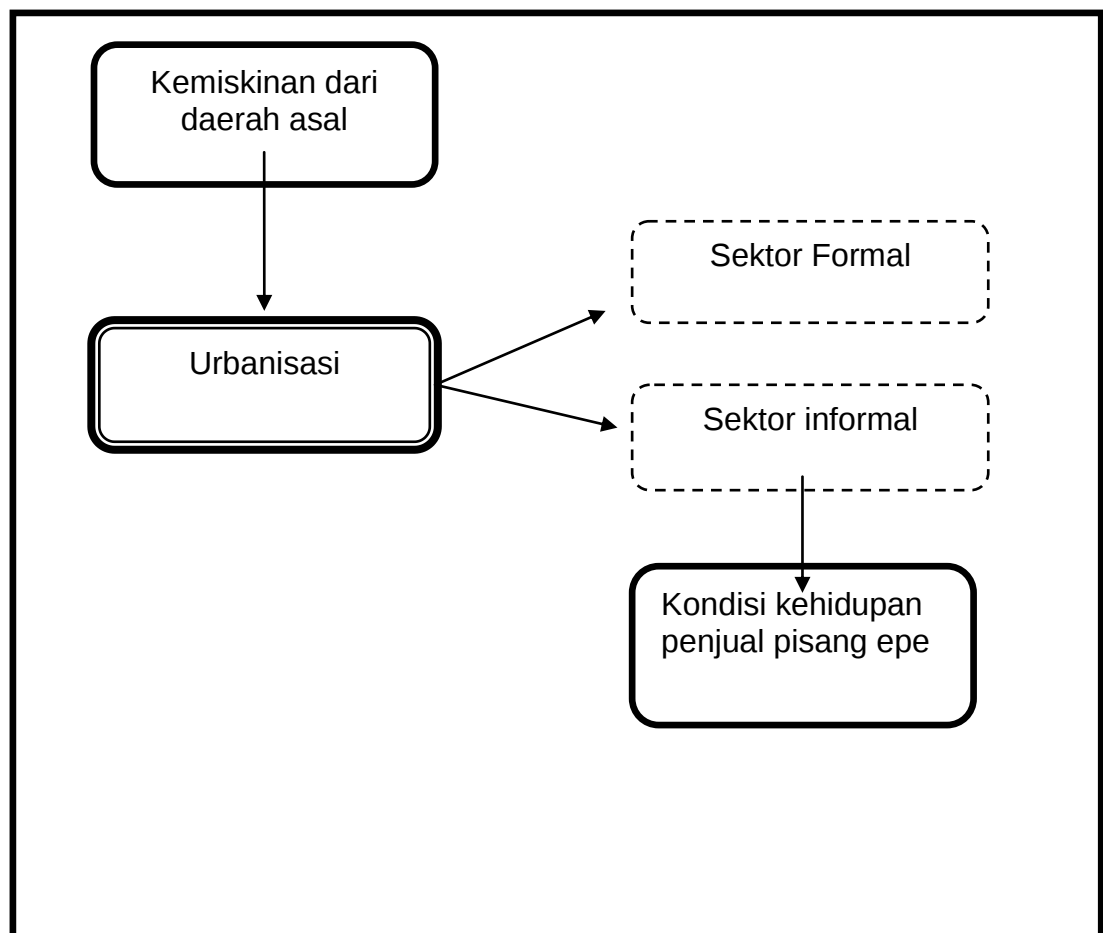
Studi mendalam tentang sektor informal di Indonesia dilakukan oleh Hans Dieter-Evers dalam (Rachbini dan Hamid, 1994:3), yang menganalogikan sektor ini sebagai bentuk ekonomi bayangan dengan negara. Ekonomi bayangan digambarkan sebagai berbagai kegiatan ekonomi yang tidak mengikuti aturan-aturan yang dikeluarkan pemerintah. Kegiatan ekonomi bayangan ini merupakan bentuk kegiatan ekonomi yang bergerak dalam unit-unit kecil sehingga bisa dipandang efisien dalam memberikan pelayanan. Dilihat dari sisi sifat produksinya, kegiatan ini bersifat subsisten yang bernilai ekonomis dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, khususnya bagi masyarakat yang ada di lingkungan sektor informal (Rachbini dan Hamid, 1994:3).

Sektor informal muncul ke permukaan karena sektor formal tidak memberikan ruang lingkup yang cukup sehingga kegiatan ekonomi berlangsung di luar sektor yang terorganisir. Sektor yang utamanya diisi oleh golongan yang kurang mampu ini terlihat makin menjamur di negara-negara sedang berkembang. Karena kegiatannya dipandang ilegal, maka para pengamat menamakan kegiatan ini sebagai kegiatan ekonomi bawah

tanah atau sering disebut *underground economy* (Rachbini dan Hamid, 1994:25).

Dari beberapa penjelasan mengenai sektor informal diatas, dapat disimpulkan bahwa sektor informal merupakan suatu unit usaha yang berskala kecil, tidak memiliki legalitas hukum, pola usahanya bersifat sederhana dan menggunakan sistem kekeluargaan, dilakukan oleh dan untuk masyarakat golongan menengah ke bawah, dan dalam aktivitasnya tidak diperlukan ketrampilan khusus.

E. Skema Kerangka Konseptual



Gambar 1. kerangka konseptual

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor mengemukakan bahwa metode kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan deskripsi dari orang-orang atau perilaku, dalam bentuk kata-kata, baik lisan maupun tulisan (Moleong, 2004:3). Dalam pendekatan ini data diperoleh langsung dari lapangan dengan melakukan pengamatan dan wawancara mendalam terhadap informan sesuai dengan fokus penelitian.

Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif, di mana penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan mengenai situasi-situasi tertentu berdasarkan data yang diperoleh sesuai permasalahan yang ditetapkan dalam penelitian ini secara terperinci sehingga penelitian yang dilakukan dapat tercapai dengan baik.

Seperti halnya yang dilakukan oleh penulis yaitu mendeskripsikan atau membuat suatu penggambaran mengenai lima penjual pisang epe di pantai losari makassar.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai April 2013 dimana lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (*purposive*) oleh peneliti yaitu di Kelurahan Bulogading, Maluku dan Losari yang terdapat di Kecamatan Ujung Pandang sekitar wilayah pantai losari Makassar, dimana berdasarkan hasil observasi atau pengamatan sebelumnya bahwa

ditempat tersebut banyak terdapat penjual pisang *epe* yang menjadi salah satu pekerjaan di sektor informal.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi pustaka

Yang dimaksud penulis yaitu dengan mencari tahu dan mempelajari literatur yang tentunya berkaitan dengan penelitian yang di lakukan, literatur tersebut yakni buku-buku, majalah, koran, internet, jurnal serta tulisan-tulisan yang dapat menjelaskan dan menguraikan konsep-konsep yang berhubungan dengan objek penelitian.

b. Observasi

Observasi yang dilakukan yaitu dengan berkunjung kelapangan untuk melihat dan mengamati kondisi secara langsung. Pengamatan dilakukan pada tanggal 21 Maret 2013, setelah penulis membawa surat penelitian dikantor kelurahan Bulogading. Penulis mengamati kondisi kegiatan sekitar pantai losari yang dikatakan sebagai icon dari kota Makassar yang tiap harinya tidak sepi oleh pengunjung, terdapat beberapa penjual yang berjualan di tempat yang indah tersebut untuk menikmati sunset pada sore hari, salah satu penjual yang banyak memenuhi jalan sekitar pantai Losari yaitu penjual pisang *epe*.

Sesuai dengan topik penelitian maka penulis mengamati kondisi penjual pisang *epe* pada siang, sore dan malam hari dan ternyata penjual mulai berjualan tidak pada waktu yang bersamaan melainkan terlihat pada siang hari sekitar pukul 14.00 beberapa penjual pisang *epe* sudah mempersiapkan jualan mereka dan memulai mengipas sambil membakar pisang kepek diatas arang. Kemudian pada sore hari sudah terlihat bahwa hampir semua penjual sudah memulai menata dan mengelolah jualannya masing-masing. Selain itu pada malam hari tampak terlihat banyaknya pengunjung yang menikmati pisang *epe* ditambah angin sepoi-sepoi dari pantai losari. Penulis pun melihat bahwa walaupun banyak penjual yang berjejer berdekatan menjual pisang *epe* namun selalu saja terlihat banyaknya pengunjung yang menikmati jajanan khas kota Makassar, mulai dari pejalan kaki, pengendara motor hingga pengendara mobil yang singgah menikmati jajanan pisang *epe* tersebut.

c. Wawancara

Wawancara yang dilakukan penulis yaitu dengan menggali informasi kepada nara sumber (informan) dengan cara mengajukan pertanyaan kemudian nara sumber menjawab pertanyaan tersebut. Menurut Moleong (2004: 135) wawancara adalah suatu percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan yang diwancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Penulis melakukan wawancara pertama kali pada tanggal 22 Maret 2013, setelah melakukan observasi sebelumnya, maka penulis langsung menentukan orang yang pertama kali akan diwawancarai, namun tidak seperti apa yang dibayangkan penulis, ternyata informan yang dipilih sangat tertutup dan sangat susah untuk menjawab pertanyaan yang diajukan, sehingga penulis hanya menanyakan orang-orang yang dapat diwawancarai seperti orang yang kontrak rumah atau mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya sesuai dengan topik yang akan diteliti. Sehingga informan tersebut memberi tahu orang-orang yang menyangkut kriteria tersebut.

Dalam proses wawancara penulis menggunakan alat perekam suara pada telepon genggam (*Handphone*). Sebelum menggunakan alat perekam tersebut, peneliti meminta izin terlebih dahulu dengan nara sumber. Untuk memperoleh data yang akurat dan lengkap, penulis harus menunjukkan perhatian dan mendengarkan secara seksama apa yang disampaikan nara sumber pada saat wawancara berlangsung, wawancara yang dilakukan berjalan dengan santai dan tidak terlalu serius, awalnya penulis harus melakukan pendekatan terlebih dahulu terhadap informan dan mencoba meyakinkan informan bahwa proses wawancara tersebut bukan dalam hal pemerintahan namun guna menyelesaikan tugas dari kampus, setelah informan mulai terbuka barulah penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan pedoman wawancara yang tentunya relevan dengan rumusan masalah. Selain itu, sambil menikmati pisang

epe penulis juga harus bersabar menunggu waktu luang informan agar dapat diwawancarai karena informan harus meladeni para pembelinya.

4. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dilakukan secara sengaja (*purposive*), penulis memilih informan kunci secara sengaja, informan kunci yang dimaksudkan penulis yaitu informan yang dapat menunjukkan dan memberikan informasi tentang siapa yang potensial untuk memberikan jawaban agar data yang diinginkan dapat dijawab sesuai dengan masalah penelitian dengan baik. Setelah pemilihan informan kunci maka selanjutnya menentukan informan ahli yaitu orang-orang yang akan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, sehingga datanya yang didapatkan bisa valid, dan informan ahli/biasa yang didapatkan yaitu lima keluarga penjual pisang epe yang menjual disekitar pantai Losari Makassar.

Informan yang dipilih oleh penulis yaitu berjumlah lima orang penjual pisang epe di pantai losari Makassar sesuai dengan rekomendasi sebelumnya. Kelima orang tersebut yang penulis pilih karena dari wawancara awal penulis lakukan diperoleh informasi tentang latar belakang kehidupan keluarga mereka yang sesuai topik penelitian yang akan penulis lakukan.

Kelima keluarga yang peneliti pilih sebagai informan yaitu :

1. Iwan, umur 44 tahun
2. Rahmatia, umur 36 tahun

3. Toni, umur 39 tahun
4. Dg. Mamun, umur 52 tahun
5. Dg. Rampu, umur 51 tahun

6. Teknik Analisa Data

Metode ini merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan sebelumnya yang dianalisis secara kualitatif. Pada tahap ini penulis melakukan pengumpulan data mentah dengan menggunakan alat-alat yang diperlukan seperti rekaman, field note, serta observasi yang dilakukan penulis selama berada dilokasi penelitian. Pada tahap ini sekaligus dilakukan proses penyeleksian, penyederhanaan, pemfokusan, dan pengabstraksian data dari field note dan transkrip hasil wawancara. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan dengan mengkategorisasikan, memusatkan tema, dan menentukan batas-batas permasalahan. Reduksi data seperti ini diperlukan sebagai analisis yang akan menyeleksi, mempertegas dan mengatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan.

Pada tahap selanjutnya, setelah memperoleh data hasil wawancara yang berupa rekaman, catatan lapangan, dan pengamatan maka penulis membuat transkrip data untuk mengubah data hasil wawancara, catatan lapangan dalam bentuk tulisan yang lebih teratur dan sistematis. Setelah seluruh data sudah dirubah dalam bentuk tertulis, penulis membaca seluruh data tersebut dan mencari hal-hal yang perlu dicatat untuk proses selanjutnya yakni pengkategorisasian data agar data dapat diperoleh lebih

sederhana sesuai dengan kebutuhan penelitian. Sampai disini diperoleh kesimpulan sementara berdasarkan data-data yang telah ada. Pada tahap selanjutnya, penulis melakukan triangulasi yakni check and recheck antara satu sumber data dengan sumber data yang lainnya. Apakah sumber data yang satu sesuai dengan data yang lainnya, hal ini dilakukan agar data yang diperoleh dapat valid.

Dari hasil pengumpulan data yang telah diperoleh peneliti menemukan berbagai hal-hal penting yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pada saat mengolah data peneliti sudah mendapat kesimpulan sementara, kesimpulan sementara yang masih berdasarkan data akan dipahami dan dikomentari oleh peneliti yang pada akhirnya akan mendeskripsikan atau menarik suatu kesimpulan akhir dari hasil penelitian yang telah diperoleh. Penelitian berakhir ketika penulis sudah merasa bahwa data yang dikumpulkan sudah cukup dan data yang diperoleh tidak jauh berbeda dengan data-data sebelumnya yang telah dikumpulkan oleh penulis.

G. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan ini disusun dalam lima bab yang mana setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab. Adapun sistematika penulisan disusun sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Memuat uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : TINJUAN PUSTAKA

Memuat tentang teori-teori yang berkenaan dengan pembahasan dalam skripsi ini yang digunakan untuk pedoman dalam menganalisa masalah.

Bab III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian yakni kota Makassar dan sekitar pantai Losari Makassar

Bab IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Memuat data tentang hasil-hasil penelitian dan analisisnya.

Bab V : PENUTUP

Memuat tentang kesimpulan penelitian yang berdasar dari hasil penelitian dan saran-saran untuk pihak-pihak yang terkait di dalamnya dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini akan diuraikan konsep-konsep yang disesuaikan berdasarkan topik, judul, fokus penelitian. Konsep-konsep ini menjadi landasan atau kerangka berpikir dalam perumusan pelaksanaan studi, kajian, dan penelitian yang akan dilaksanakan.

A. Urbanisasi

1. Pengertian Urbanisasi

Urbanisasi merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota. Persebaran penduduk yang tidak merata antara desa dengan kota akan menimbulkan berbagai permasalahan kehidupan sosial kemasyarakatan. Jumlah peningkatan penduduk kota yang signifikan tanpa didukung dan diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan, fasilitas umum, aparat penegak hukum, perumahan, penyediaan pangan, dan lain sebagainya tentu adalah suatu masalah yang harus segera dicarikan jalan keluarnya. <http://azariansyah.wordpress.com/> Pengertian Urbanisasi (di akses pada tanggal 9 Maret 2013)

Berdasarkan perspektif ilmu kependudukan, definisi urbanisasi berarti persentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Perpindahan manusia dari desa ke kota hanya salah satu penyebab urbanisasi. perpindahan itu sendiri dikategorikan dalam 2 macam, yakni:

1. Migrasi Penduduk dan Mobilitas Penduduk. Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota yang bertujuan untuk tinggal menetap di kota.
2. Mobilitas Penduduk berarti perpindahan penduduk yang hanya bersifat sementara saja atau tidak menetap.

Untuk mendapatkan suatu niat untuk hijrah atau pergi ke kota dari desa, seseorang biasanya harus mendapatkan pengaruh yang kuat dalam bentuk ajakan, informasi media massa, impian pribadi dan terdesak kebutuhan ekonomi.

Pengaruh-pengaruh tersebut bisa dalam bentuk sesuatu yang mendorong, memaksa atau faktor pendorong seseorang untuk urbanisasi, maupun dalam bentuk yang menarik perhatian atau faktor penarik.

2. Faktor-faktor Urbanisasi

Seseorang melakukan urbanisasi karena adanya faktor pendorong dan faktor penarik yang berperan didalamnya.

Faktor pendorong terjadinya suatu urbanisasi dalam masyarakat, yaitu :

1. Lahan pertanian semakin sempit
2. Merasa tidak cocok dengan budaya tempat asalnya
3. Menganggur karena tidak banyak lapangan pekerjaan di desa
4. Terbatasnya sarana dan prasarana di desa

5. Diusir dari desa asal
6. Memiliki impian kuat menjadi orang lebih sukses di kota

Faktor penarik terjadinya suatu urbanisasi dalam masyarakat, yaitu :

1. Kehidupan kota yang lebih modern
2. Sarana dan prasarana kota lebih lengkap
3. Banyak lapangan pekerjaan di kota
4. Pendidikan sekolah dan perguruan tinggi lebih baik dan berkualitas

Pada dasarnya urbanisasi dapat menggerakkan seseorang atau individu untuk melakukan suatu perpindahan dari pedesaan ke perkotaan. Faktor penarik terjadinya suatu urbanisasi telah di uraikan sebagai berikut :

- Kehidupan kota yang lebih modern

Tentu ini menjadi dasar alasan yang utama sehingga banyak sekali penduduk di daerah untuk meninggalkan kampung halamannya. Kehidupan di desa memang bisa dikatakan agak jauh dari kemudahan dan tidak banyak pekerjaan yang dapat dilakukan. Namun berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di perkotaan, semua serba mudah dilakukan di perkotaan misalnya jika seseorang lapar hanya dengan menelpon sebuah rumah makan maka makanannya akan langsung di antar ke rumah yang memesan.

- Sarana dan prasarana kota lebih lengkap

Banyak sekali sarana dan prasarana yang disediakan di kota dan tidak di miliki di desa, sarana dan prasarana ini dapat dinikmati kapan saja oleh msyarakat, sehingga membuat masyarakat tidak jenuh. Berbeda dengan keadaan desa yang sarana dan prasarananya yang disedikan sangatlah terbatas, sehingga banyak masyarakat yang pindah ke kota.

- Banyak lapangan pekerjaan di kota

Di pedesaan sedikit sekali pekerjaan yang bisa di lakukan. Upah yang diterima pun tidak sebanding dengan keringat yang telah bercucuran. Upah hasil bekerja di pedesaan tidak cukup untuk menghidupi keluarga secara layak. Jadi mau tak mau pekerja itu harus hidup sangat sederhana, bahkan ada di antaranya yang kekurangan. Sebenarnya keadaan di kota juga tidak jauh berbeda bagi pengadu nasib yang kurang beruntung.

- Pendidikan sekolah dan perguruan tinggi lebih baik dan berkualitas

Kurangnya perguruan tinggi yang disediakan di desa, bahkan ada suatu daerah yang tidak menyediakan perguruan tinggi sama sekali sehingga seseorang yang akan melanjutkan pendidikannya melakukan urbanisasi, begitu halnya dengan pendidikan sekolah yang ada di desa sedikit kurang berkualitas, sehingga banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya di kota dengan harapan dapat memperoleh pendidikan yang lebih baik.

B. Sektor Informal

Meningkatnya arus migrasi dari desa ke kota telah menyebabkan penyerapan tenaga kerja dalam kegiatan jasa-jasa dan produktivitas rendah. Gejala ini banyak terjadi di kebanyakan kota-kota di Indonesia. Kenyataan seperti ini justru menimbulkan keprihatinan bahwa pengangguran dipedesaan sedang diekspor ke sektor informal yang berproduktivitas rendah di daerah perkotaan. Perkembangan pesat yang dialami oleh sektor jasa nampaknya merupakan ciri umum di Indonesia seperti di banyak negara yang sedang berkembang lainnya.

Dalam Manning (1991:291) membahas mengenai partisipasi migran di kota Jakarta dan Bandung yang berasal dari desa-desa di Jawa Barat, yang menemukan :

“Hubungan informasi antar pribadi dengan keluarga dan teman-teman yang telah berpengalaman di kota memegang peranan penting dalam mendapatkan pekerjaan di kota.”

Hubungan itulah yang mendorong perpindahan ke kota dan pengelompokan dalam pekerjaan yang sama di kota. Pola mobilitas sirkuler memungkinkan banyak penduduk Jawa Barat mengkombinasikan partisipasinya dalam angkatan kerja kota dengan pekerjaan di sektor pertanian di desa. Pekerja migran yang terlibat dalam sektor informal kebanyakan terlibat dalam distribusi komoditi berskala kecil.

Dalam beberapa studi tentang partisipasi migran di beberapa kota di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa sektor informal dalam ekonomi kota banyak menyerap kaum migran. Kehadiran sektor informal di

Indonesia tampaknya berkaitan erat dengan besarnya populasi penduduk dan angkatan kerja serta ketidakseimbangan pembangunan antara desa dan kota.

Kebanyakan penduduk kota di Indonesia tidak seluruhnya tergolong dalam kelompok yang berpendapatan tinggi, namun sebagian penduduk tergolong dalam kelompok yang berpendapatan menengah dan rendah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa daya beli sebagian besar penduduk kota masih termasuk rendah, sehingga permintaan terhadap jasa-jasa yang harganya relatif murah semakin meningkat.

Besarnya persentase pekerja yang masuk dalam sektor informal merupakan pencerminan ketidakmampuan sektor formal menampung pertambahan angkatan kerja. Pendapat ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa orang akan berusaha kerja di sektor formal. Namun kurangnya lowongan di sektor formal, maka seseorang mencari atau menciptakan kesempatan kerja di sektor informal. Disamping itu karena adanya krisis ekonomi 1998 yang telah menyebabkan ambruknya sektor ekonomi formal yang menyebabkan terjadinya rasionalisasi pekerja (PHK) di sektor industri kota yang tinggi dan menuntut mereka memilih sektor informal untuk bertahan hidup.

Makassar merupakan pusat kota di Sulawesi Selatan, dengan demikian kota Makassar mempunyai daya tarik tersendiri bagi kaum migran dari desa yang berusaha membebaskan diri dari kemiskinan.

Mayoritas penduduk Kota di Makassar bekerja pada sektor Industri, perdagangan dan jasa.

Forbes (dalam Manning, 1991:292) mengamati sektor informal di kota Makassar dengan menitikberatkan kehidupan marginal pedagang kecil, hubungan sosial ekonomi antara pedagang dan pengaruh perkembangan kota terhadap kehidupan ekonomi mereka. Hubungan antara punggawa yang menguasai bahan baku, permodalan, dan pedagang kecil. Kajiannya tersebut menjelaskan tentang penaja di Makassar yang kebanyakan pekerja dari sektor informal adalah pengendara becak dan pedagang. Kemudian Forbes menggolongkan para pedagang di dalam tiga kategori untuk melihat struktur perdagangan sektor informal yaitu penjual borongan (punggawa), pengecer besar, dan pengecer kecil.

Sektor informal di kota Makassar cukup berperan dalam menyerap tenaga kerja yang tidak tertampung dalam sektor formal dan erat kaitannya dengan para pendatang dari daerah asal. Idrus Abustam menjelaskan tentang pemilihan lapangan kerja bagi para pendatang dari desa, yaitu :

“Di kota Makassar terdapat banyak spesialisasi pekerjaan menurut daerah asal pendatang dan jenis atau status gerak penduduk, mereka yang datang dengan sedikit keterampilan atau berbakat cenderung memilih lapangan pekerjaan di sektor industri pengolahan sebagai tukang-tukang, dan kebanyakan berstatus permanen, sebaliknya yang datang tanpa keterampilan yang kebanyakan berstatus sementara (sirkuler), memilih lapangan pekerjaan di bidang angkutan seperti penarik becak dan di bidang perdagangan produksi kecil-kecilan.” (Abustam, 1989:290)

Keberadaan pedagang golongan ekonomi lemah khususnya pedagang kaki lima termasuk penjual pisang epe, telah menciptakan lapangan kerja yang menyerap beberapa tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran di kota Makassar. Sebagian dari kebutuhan masyarakat dapat disediakan oleh para pedagang kaki lima dengan harga yang relatif murah dan terjangkau oleh kemampuan daya beli masyarakat kecil. Namun demikian kegiatan usaha mereka pada umumnya belum tertata dan terarah dengan baik, sehingga kehidupannya masih penuh ketidakpastian serta terkadang menimbulkan pula gangguan keamanan lalu lintas, kebersihan dan keindahan lingkungan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka diperlukan kebijakan pemerintah dalam membina dan mengarahkan pengusaha ekonomi lemah, agar usahanya dapat berkembang dengan baik, mengingat pisang epe sebagai makanan khas kota makassar dan disisi lain keamanan lalu lintas, kebersihan dan keindahan lingkungan dapat berjalan dengan baik.

Karakteristik Sektor Informal

Hidayat, 1982: 98 mengemukakan bahwa di Indonesia terdapat 11 karakteristik pokok sektor informal, yaitu :

1. Kegiatan usaha tidak terorganisir dengan baik karena timbulnya unit usaha tidak menggunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia di sektor formal.
2. Pada umumnya unit usaha tidak mempunyai izin usaha

3. Pola kegiatan usaha tidak teratur baik dalam arti lokasi maupun jam kerja
4. Pada umumnya kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi tidak sampai kepedagang kaki lima
5. Unit usaha mudah keluar masuk dari satu sub-sektor ke lain sub-sektor
6. Teknologi yang digunakan termasuk ke dalam teknologi yang sederhana
7. Modal dan perpustakaan usaha relatif kecil, maka skala operasi unit usaha ini kecil pula
8. Skala operasinya kecil dan tingkat teknologinya sangat sederhana, maka untuk mengelola usaha tidak diperlukan tingkat pendidikan tertentu, bahkan keahliannya didapat dari sistem pendidikan non formal dan pengalaman
9. Kebanyakan unit usaha ini termasuk dalam one-man enterprise atau kalau mempunyai buruh, maka buruh tersebut berasal dari lingkungan keluarganya dan unit tersebut dinamakan family enterprise
10. Sumber dana untuk modal tetap atau modal kerja kebanyakan berasal dari tabungan sendiri dan dari sumber keuangan tidak resmi

11. Hasil produksi dan jasa di sektor ini dikonsumsi oleh golongan berpenghasilan rendah dan kadang-kadang oleh golongan menengah ke atas

Menurut Sethurama (dalam Latief, 1988:2), seorang pejabat Internasional Labour Organisation (ILO) di Jenewa menjelaskan bahwa:

“Ciri-ciri sektor informal yang umum diterima adalah (a) mudah memasuki perusahaan baru tanpa adanya syarat-syarat yang membatasi; (b) menggunakan teknologi bersifat lokal; (c) pada umumnya dimiliki satu keluarga dan juga memanfaatkan tenaga kerja dari lingkungan kekeluargaan; (d) para tenaga kerja yang rata-rata tidak banyak memperoleh pendidikan formal; (e) menggunakan teknologi yang lebih padat karya; (f) melakukan produksi dalam skala/ukuran terbatas; (g) melakukan operasi pada pasar dengan persaingan tajam dan tanpa adanya perlindungan melalui peraturan pengendalian”

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Hidayah (dalam Dahriani, 1995:22) yang mengemukakan beberapa faktor pelengkap dari ciri-ciri sektor informal tersebut, yaitu:

“Faktor pelengkap tersebut adalah modal sukar diperoleh; kredit bila tersedia terutama dari lembaga keuangan tidak resmi. Selain itu, tidak ada peranan serikat buruh (trade union), hubungan kerja berdasarkan saling mempercayai antar majikan dan karyawan/ pekerja, hasil produksi tersedia dalam persediaan terbatas serta mulut berbeda-beda dan tidak ada atau hanya sedikit diperoleh bantuan pemerintah”

Sedangkan menurut Damsar (2009:158-159), konsep sektor informal dicirikan dengan :

1. Mudah memasukinya dalam arti keahlian, modal, dan organisasi;
2. Perusahaan milik keluarga;

3. Beroperasi pada skala kecil;
4. Intensif tenaga kerja dalam produksi dan menggunakan teknologi sederhana
5. Pasar yang tidak diatur dan berkompetitif

Dengan karakteristik seperti yang dijelaskan di atas, maka pendapat diatas semakin jelas bahwa pedagang kaki lima menjadi salah satu bagian dari sektor informal. Dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh sektor informal, maka pencari kerja serta pendatang baru dengan mudah dapat memasukinya. Sektor informal benar-benar merupakan sumber penghidup baru yang tidak menuntut persyaratan terlalu berat dari pada peminatnya.

C. Teori Kemiskinan

Kondisi kehidupan perkotaan selalu saja identik dengan fenomena kemiskinan yang diakibatkan dari rendahnya penghasilan atau tidak memiliki mata pencaharian yang cukup mapan untuk tempat bergantung hidup. Pendapat seperti ini, untuk sebagian mungkin benar, tetapi tidak kurang mencerminkan kondisi riil yang sebenarnya dihadapi keluarga miskin.

Kemiskinan bukan hanya semata-mata karena kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok atau standar hidup layak, namun lebih dari itu esensi kemiskinan adalah menyangkut kemungkinan keluarga miskin untuk melangsungkan dan mengembangkan usaha serta taraf kehidupannya.

Kemiskinan diartikan sebagai kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Definisi lain tentang kemiskinan adalah ketidaksanggupan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas (Suyanto, 2010:4).

Masyarakat miskin adalah mereka yang serba kurang mampu dan terbelit di dalam lingkaran ketidak berdayaan, rendahnya pendapatan mengakibatkan rendahnya pendidikan dan kesehatan, sehingga mempengaruhi produktifitas. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya pada kegiatan ekonomi sehingga semakin tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi.

Keluarga ataupun orang yang disebut miskin pada umumnya selalu lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi sehingga seringkali makin tertinggal jauh dari masyarakat lain yang memiliki potensi lebih tinggi. Definisi yang lebih lengkap tentang kemiskinan dikemukakan oleh John Friedman. Menurut Friedman kemiskinan adalah ketidaksamaan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. (Bagong: 2010)

Sementara yang dimaksud basis kekuasaan sosial itu menurut Friedman meliputi. Pertama, modal produktif atas asset, misalnya tanah perumahan, peralatan, dan kesehatan. Kedua, sumber keuangan, seperti

income dan kredit yang memadai. Ketiga, organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, seperti koperasi. Keempat, *network* atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, pengetahuan dan ketrampilan yang memadai. Kelima, informasi-informasi yang berguna untuk kehidupan (Suyanto: 2010). Salah satu masalah yang mendapat sorotan dari para antropolog adalah masalah kemiskinan yang dialami oleh golongan tertentu dalam kota-kota besar.

Oscar Lewis (dalam Andre Bayo Ala, 1996: 20-23) mengemukakan bahwa kebudayaan kemiskinan itu (*culture of poverty*) mempunyai ciri-ciri :

- a. Tingkat mortalitas yang tinggi dan harapan hidup yang rendah.
- b. Tingkat pendidikan yang rendah.
- c. Partisipasi yang rendah dalam organisasi-organisasi sosial.
- d. Tidak atau jarang ambil bagian dalam perawatan medis dan program-program kesejahteraan lainnya.
- e. Sedikit saja memanfaatkan fasilitas-fasilitas kota seperti toko-toko, museum, atau bank.
- f. Upah yang rendah dan keamanan kerja yang rendah.
- g. Tingkat ketrampilan kerja yang rendah.
- h. Tidak memiliki tabungan atau kredit.
- i. Tidak memiliki persediaan makanan dalam rumah untuk hari besok.

- j. Kehidupan mereka tanpa kerahasiaan pribadi (privasi).
- k. Sering terjadi tindak kekerasan termasuk pemukulan anak.
- l. Perkawinan sering terjadi karena konsensus, sehingga sering terjadi perceraian dan pembuangan anak.
- m. Kehidupan keluarga yang bertumpu pada ibu.
- n. Kehidupan keluarga yang bersifat otoriter.
- o. Penyerahan diri pada nasib atau fatalisme.

Kebudayaan kemiskinan yang dijelaskan oleh Oscar Lewis merupakan suatu kebudayaan dalam artian antropologi tradisional yang mencerminkan suatu pola kehidupan, serangkaian penyelesaian/solusi yang siap pakai untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia, karena itu ia menjalankan fungsi adaptasi yang signifikan.

Kemiskinan terkategori ke dalam kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang terjadi bukan dikarenakan ketidakmampuan si miskin untuk bekerja (malas), melainkan karena ketidakmampuan sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan si miskin dapat bekerja (Suharto, 2005). Struktur sosial tersebut tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber-sumber yang tersedia, baik yang disediakan oleh alam, pemerintah maupun masyarakat yang ada disekitarnya. Pihak yang berperan besar dari terciptanya kemiskinan struktural ini adalah pemerintah, karena pemerintah sebagai pihak yang

memiliki kekuasaan dan kebijakan cenderung membiarkan masyarakat dalam kondisi miskin, tidak mengeluarkan kebijakan yang pro masyarakat miskin, jika pun ada lebih berorientasi pada proyek, bukan pada pembangunan kesejahteraan.

Sedangkan kemiskinan kultural menurut Lewis (Suharto, 2005), merupakan kemiskinan yang muncul sebagai akibat adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut oleh orang-orang miskin, seperti malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja. Ciri dari kebudayaan kemiskinan ini adalah masyarakat enggan mengintegrasikan dirinya dalam lembaga-lembaga utama, sikap apatis, curiga, terdiskriminasi oleh masyarakat luas. Kebudayaan kemiskinan biasanya merupakan efek domino dari belenggu kemiskinan struktural yang menghinggap masyarakat terlalu lama, sehingga membuat masyarakat apatis, pasrah, berpandangan jika sesuatu yang terjadi adalah takdir.

Secara ekonomi kemiskinan dapat diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika diartikan dengan pendapatan dan kebutuhan dasar maka kemiskinan dapat diukur secara langsung, yaitu ketika pendapatan masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum maka orang ini dapat dikatakan miskin. Dalam hal ini kemiskinan ditentukan oleh keadaan tidak tercapainya kebutuhan dasar sesuai dengan kebutuhan saat ini.

D. Konsep Antropologi Perkotaan

Antropologi diawal perkembangannya memusatkan perhatiannya kepada masyarakat yang primitif. Perhatian ini timbul karena ada sesuatu yang dianggap sebagai keganjilan pada tingkah laku masyarakat tertentu, yaitu pada masyarakat pedalaman-pedalaman. Akan tetapi lama-kelamaan, mereka tidak lagi melihat tingkah laku itu sebagai sesuatu yang ganjil, melainkan sebagai sesuatu yang masih dekat dengan alam, dan masih berada dalam tahap perkembangan. Dan pada saat itu Antropologi memusatkan perhatiannya pada masyarakat tersebut. Karena ternyata masyarakat primitif itu telah semakin maju dan teradaptasi ke dalam masyarakat modern, maka perhatian antropologi selanjutnya beralih pada masyarakat pedesaan. Hampir seluruh aspek kehidupan desa telah diteliti dan diungkapkan. Karena itu, perhatian para antropolog pada tahap berikutnya, mulai beralih ke kota.

Ada beberapa alasan yang digunakan untuk mengalihkan dan memperluas perhatian mereka ke kota-kota, yaitu:

1. Masyarakat kota mempunyai pola-pola budaya dan tingkah laku, lembaga, pranata, serta struktur sosial yang berbeda dari masyarakat primitif maupun masyarakat desa.
2. Terjadinya urbanisasi yang semakin meningkat. Pada umumnya mereka pergi ke kota tanpa membawa bekal ketrampilan kecuali tenaga. Setibanya di kota, mereka dapati dirinya berada pada

situasi dan kondisi yang berbeda dari pada sewaktu berada di desa.

3. Semakin luasnya pengaruh kehidupan kota atas kehidupan daerah pedesaan yang berada di sekitarnya, baik positif maupun negatif.
4. Semakin merosotnya nilai-nilai manusiawi oleh berkembangnya teknologi di kota.

Pada awal abad ke-20, antropologi perkotaan mulai dikembangkan oleh seorang antropolog yang bernama Clifford Geertz, dalam penelitiannya disebuah daerah yang berada di Jawa Timur yang dalam hasil penelitiannya disamakan dengan nama Mojokuto. Dalam penelitiannya itu Gertz mencoba menganalisis sistem stratifikasi sosial masyarakat Jawa yang didasarkan pada kepercayaan. Masyarakat Jawa dalam kaca mata Gertz terbagi dalam tiga golongan yaitu Priayi, Santri, dan Abangan. Dengan diterbitkannya hasil penelitiannya yang dilakukan kurun waktu 1940, antropologi perkotaan di Asia umumnya dan di Indonesia mulai berkembang. Clifford Geertz (1989:8)

Antropologi perkotaan merupakan dua konsep yang dihubungkan antara antropologi dan perkotaan. Makna dari konsep antropologi perkotaan adalah pendekatan-pendekatan antropologi mengenai masalah-masalah yang terjadi di perkotaan. Yang dimaksud dengan pendekatan-pendekatan antropologi adalah pendekatan-pendekatan yang baku yang menjadi ciri-ciri dari metodologi yang ada dalam antropologi,

dan yang dimaksudkan dengan pengertian masalah-masalah perkotaan adalah masalah-masalah yang muncul dan berkembang dalam kehidupan kota dan yang menjadi ciri-ciri dari hakekat kota itu sendiri yang berbeda dari ciri-ciri kehidupan desa.

Pendekatan-pendekatan antropologi mengenai masalah-masalah perkotaan yang digunakan yaitu :

1. Pendekatan Holistik, yaitu pendekatan yang memahami kebudayaan secara menyeluruh.
2. Pendekatan Emik, yaitu pendekatan yang memandang sudut pandang dari masyarakat itu sendiri. Pendekatan emik dalam hal ini memang menawarkan sesuatu yang lebih obyektif. Karena tingkah laku kebudayaan memang sebaiknya dikaji dan dikategorikan menurut pandangan orang yang dikaji itu sendiri, berupa definisi yang diberikan oleh masyarakat yang mengalami peristiwa itu sendiri
3. Pendekatan Etik, yaitu pendekatan yang memandang sudut pandang dari para ahli
4. Pendekatan komperatif, yaitu perbandingan dan membandingkan data dari yang satu dengan yang lain.
5. Pendekatan Historis, yaitu faktor-faktor dari kesejarahannya seperti sejarah terbentuknya sesuatu.

Kelima pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis masalah-masalah yang ada didalam perkotaan. Kota dengan demikian diperlakukan sebagai konteks atau variabel yang menjelaskan keberadaan permasalahan yang ada di dalam kehidupan perkotaan, dan kota juga sebagai permasalahan perkotaan itu sendiri. Permasalahan perkotaan yang menjadi sasaran kajian antropologi perkotaan berpangkal pada kebudayaan perkotaan dan pranata-pranata sosial yang hidup dan berkembang di kota.

Masalah-masalah perkotaan, yaitu :

1. Masalah-masalah yang berkembang dan muncul dalam kehidupan perkotaan yang menjadi ciri-ciri kehidupan kota.
2. Melihat kota yang muncul dalam kehidupan perkotaan itu sendiri.

Parsudi Suparlan (2004:3) mengemukakan bahwa kajian utama mengenai kebudayaan perkotaan dan pranata-pranata sosial yang hidup dan berkembang di kota yakni :

1. Kehidupan sehari-hari
2. Pola-pola kelakuan
3. Kehidupan komunitas, seperti komunitas supir angkot
4. Kehidupan Ekonomi
5. Hubungan antar sukubangsa dalam perkotaan

6. Kemunculan dan mantapnya golongan-golongan sosial tertentu yang baru muncul, seperti tiba-tiba munculnya ahli-ahli komputer
7. Hierarki dan stratifikasi sosial
8. Kemiskinan yang terjadi dalam perkotaan
9. Perkumuhan
10. Permasalahan permukiman, rumah dan hunian serta berbagai masalah lain yang dapat dilihat keberadaan, hakekat, dan kecenderungan-kecenderungannya yang mengacu pada kondisi-kondisi kota yang merupakan lingkungan hidup perkotaan.

Sedangkan permasalahan dalam kota itu sendiri, yaitu :

1. Kota harus dilihat bagaimana hubungan antar kota dengan kota-kota yang lain.
2. Kota sebagai arena persaingan, perbandingannya dengan pedesaan.

Kajian antropologi perkotaan bukanlah kajian yang hanya memperlakukan kota sebagai latar, lokasi dilakukannya penelitian, atau sebuah situs tempat kajian masalah yang diteliti yang terwujud sebagai kajian sosial-mikro itu dilakukan, atau kajian tempat hidupnya komunitas miskin. Kajian-kajian yang tercakup dalam antropologi perkotaan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Kajian atau penelitian yang dilakukan harus dapat mendefinisikan kota atau kota-kota yang tercakup dalam kajiannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sasaran konseptual dari penelitiannya.
2. Kajian atau penelitian yang memfokuskan pada melihat penelitian silang budaya harus tidak terpaku pada model urbanisme yang telah terjadi di kota-kota di dunia Barat, tetapi betul-betul harus dapat menggali dan menemukan pola-pola yang berlaku secara empirik dalam kehidupan kota-kota yang ditelitinya.
3. Harus menggunakan pendekatan yang holistik mengenai kota dan berbagai kaitan hubungan kota tersebut dengan pola-pola kelakuan dan pola-pola budaya dengan masyarakat yang lebih luas. Parsudi Suparlan (2004:9)

Masyarakat kota merupakan masyarakat yang anggota-anggotanya terdiri dari manusia yang bermacam-macam lapisan atau tingkatan, pendidikan dan kebudayaan. Mayoritas penduduknya hidup berjenis-jenis dan usaha yang bersifat non-agraris. Sikap kehidupan masyarakat kota cenderung pada individualisme/egoisme yaitu masing-masing anggota masyarakat berusaha sendiri-sendiri tanpa terikat oleh anggota masyarakat lainnya, setiap individu melakukan aktivitas dan kegiatannya dengan sendiri-sendiri tanpa melibatkan anggota masyarakat yang lainnya.

Tingkah lakunya bergerak maju mempunyai sifat kreatif, radikal dan dinamis. Dari segi budaya masyarakat kota umumnya mempunyai tingkatan budaya yang lebih tinggi, dengan kreativitas dan dinamikanya yang dimiliki sehingga kehidupan kota lebih cepat menerima yang baru atau membuang sesuatu yang lama, lebih cepat mengadakan reaksi, lebih cepat menerima mode-mode dan kebiasaan-kebiasaan baru. Sifat yang diperolehnya ini dapat memberikan sesuatu perasaan harga diri yang lebih tinggi, jauh berbeda dengan seni budaya dalam masyarakat desa yang bersifat statis. Derajat kehidupan masyarakat kota beragam dengan corak sendiri-sendiri

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI

A. Gambaran Umum Kota Makassar

1. Letak Geografis dan Topografi

Kota Makassar terletak antara $119^{\circ} 24'17'38''$ bujur Timur dan $5^{\circ}8'6'19''$ Lintang Selatan yang berbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Maros, sebelah timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah barat adalah selat Makassar. Luas wilayah kota makassar tercatat 175,77 km persegi yang meliputi 14 kecamatan. Dan memiliki batas-batas wilayah administratif dari letak Kota Makassar, antara lain :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar

Secara geografis, letak Kota Makassar berada di tengah diantara pulau-pulau besar lain dari wilayah kepulauan nusantara sehingga menjadikan Kota Makassar dengan sebutan “angin mammiri” ini menjadi pusat pergerakan spasial dari wilayah Barat ke bagian Timur maupun Utara ke Selatan Indonesia. Dengan posisi ini menyebabkan Kota Makassar memiliki daya tarik kuat bagi para imigran dari daerah Sulawesi Selatan itu sendiri maupun daerah lain seperti provinsi yang ada di

kawasan Timur Indonesia untuk datang mencari tempat tinggal dan lapangan pekerjaan.

Kota Makassar cukup unik dengan bentuk menyudut dibagian Utara, sehingga mencapai dua sisi pantai yang saling tegak lurus di bagian Utara dan Barat. Di sebelah Utara kawasan pelabuhan hingga Tallo telah berkembang kawasan campuran termasuk di dalamnya armada angkutan laut, perdagangan, pelabuhan rakyat dan samudera, rawa-rawa, tambak, dan empang serta perumahan kumuh hingga sedang. Kawasan pesisir dari arah Tengah ke bagian Selatan berkembang menjadi pusat kota (*Center Busines District–CBD*) dengan fasilitas perdagangan, pendidikan, pemukiman, fasilitas rekreasi yang menempati pesisir pantai membelakangi laut yang menggunakan lahan hasil reklamasi pantai.

Kenyataan di atas menjadikan beban kawasan pesisir Kota Makassar saat ini dan dimasa mendatang akan semakin berat terutama dalam hal daya dukung dan aspek fisik lahan termasuk luasnya yang terbatas. Ditambah lagi pertumbuhan dan perkembangan penduduk sekitarnya yang terus berkompetisi untuk mendapatkan sumber daya didalamnya.

2. Kondisi Penduduk

Unsur pembentuk suatu negara terdiri dari rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Rakyat

termasuk syarat terbentuknya suatu negara yang bersifat konstitutif atau mutlak. Rakyat suatu negara meliputi penduduk dan bukan penduduk (orang asing). Bukan penduduk adalah orang yang ada di wilayah suatu negara tetapi tidak bermaksud untuk menetap dan tinggal di negara yang bersangkutan. Penduduk merupakan setiap individu yang mendiami suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu, terlepas dari warga negara atau bukan warga negara.

Negara yang sedang berkembang senantiasa diperhadapkan pada pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi sehingga secara langsung bermasalah terhadap upaya peningkatan kesejahteraannya. Tingkat pertumbuhan penduduk yang semakin cepat menyebabkan proporsi penduduk yang belum dewasa menjadi bertambah tinggi dan jumlah anggota keluarga bertambah besar.

Sementara itu, bilamana pertumbuhan penduduk tersebut disertai pula pertambahan penduduk struktur usia muda akan merupakan beban tanggungan penduduk yang bekerja. Di samping itu besarnya golongan umur anak-anak merupakan factor penghambat pembangunan ekonomi, karena sebagian pendapatan yang diperoleh yang sebenarnya harus ditabung yang kemudian diinvestasikan untuk pembangunan ekonomi, terpaksa harus dikeluarkan untuk keperluan sandang dan pangan bagi mereka yang merupakan beban tanggungan penduduk ini.

Masalah kependudukan yang mempengaruhi pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan seperti di Indonesia adalah pola

penyebaran penduduk dan mobilitas tenaga kerja yang kurang seimbang, baik dilihat dari sisi antar daerah, maupun antara daerah perdesaan dan daerah perkotaan, serta antar sektor.

Dalam hubungan ini, kaitannya dengan Kota Makassar, maka penduduk Kota Makassar tahun 2008 tercatat sebanyak 1.248.436 jiwa yang terdiri dari 601.378 jiwa laki-laki dan 652.277 jiwa perempuan. Sementara itu jumlah penduduk kota Makassar tahun 2009 tercatat sebanyak 1.272.349 jiwa yang terdiri dari 610.270 jiwa laki-laki dan 662.079 jiwa perempuan.

Kemudian pada tahun 2010 jumlah penduduk kota makassar tercatat sebanyak 1.339.374 jiwa yang terdiri dari 662.009 jiwa laki-laki dan sebanyak 676.654 jiwa perempuan. Pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2011 mengalami peningkatan jumlah penduduk di kota makassar yakni tercatat sebanyak 1.557.771 jiwa dengan rincian 767.681 jiwa laki-laki dan 794.455 jiwa perempuan. Tahun 2012 juga mengalami peningkatan penduduk yang lumayan banyak yakni tercatat sebanyak 791.348 jiwa laki-laki dan sebanyak 841.246 jiwa perempuan dengan total sebanyak 1.645.216 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah Penduduk Dalam 5 Tahun Terakhir dan Jenis Kelamin
di Kota Makassar

No.	Tahun	Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	2008	601.379	652.277	1.248.436 jiwa
2.	2009	610.270	662.079	1.272.349 jiwa
3.	2010	662.009	676.654	1.339.374 jiwa
4.	2011	767.681	794.455	1.557.771 jiwa
5.	2012	791.348	841.246	1.645.216 jiwa

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Makassar, 2012

B. Gambaran Khusus lokasi Konsentrasi Penelitian

Lokasi konsentrasi penelitian yaitu Pantai Losari yang terbentang sepanjang jalan penghibur yang terletak di sebelah barat Kota Makassar. Pantai Losari terletak dalam wilayah kecamatan Ujung Pandang. Pantai Losari adalah salah satu objek dan daya tarik wisata bagi masyarakat seluruh Indonesia. Daya tarik yang pertama dapat dilihat pada suasana waktu sore hari terutama dengan menikmati pemandangan sunset yang begitu indah untuk dipandang sambil menikmati aneka jajanan kota Makassar. Kecamatan Ujung Pandang terdiri dari 10 kelurahan dengan luas wilayah 2,63 km² dan sebanyak 4 kelurahan di kecamatan Ujung Pandang merupakan daerah pantai termasuk pulau lae-lae yang terletak beberapa mil dari pantai Losari dan 6 kelurahan lainnya merupakan daerah bukan pantai. Kecamatan Ujung Pandang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara dengan kecamatan Wajo,
- Sebelah Selatan dengan kecamatan Mariso,

- Sebelah Timur dengan kecamatan Makassar dan Gowa, dan
- Sebelah Barat dengan Selat Makassar.

Dalam kurun waktu tahun 2008-2012 jumlah penduduk kecamatan Ujung Pandang bertambah setiap tahunnya. Jumlah penduduk hasil sensus penduduk tahun 2008 di kecamatan Ujung Pandang sebanyak 27.941 jiwa, kemudian pada akhir Desember tahun 2012 sebanyak 29.064 jiwa.

Tabel 2
Banyak Penduduk Menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin di
Kecamatan Ujung Pandang

Desa /kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Lae-Lae	829	807	1.636
Losari	874	1.151	2.025
Mangkura	705	839	1.544
Pisang Selatan	1784	1992	3.776
Lajangiru	2.637	2.791	5.428
Sawerigading	750	836	1.585
Maluko	1.146	1.385	2.531
Bulogading	1.276	1.427	2.703
Baru	745	813	1.558
Pisang Utara	2.098	2.276	4.374
Jumlah			27.160

Sumber: Badan Pusat Statistik kota Makassar, 2012

Pantai Losari merupakan icon dari kota Makassar. Dulu, pantai ini dikenal dengan pusat makanan laut dan ikan bakar di malam hari, hal ini dapat dilihat dengan beroprasinya para penjual dan pedagang hanya pada malam hari, selain itu sepanjang Pantai Losari disebut-sebut sebagai warung terpanjang di dunia karena warung-warung tersebut dengan tenda yang berjejer di sepanjang pantai yang panjangnya kurang lebih hingga satu kilometer.

Salah satu makanan khas dari kota Makassar yang dijajak pada warung-warung tenda tersebut yaitu pisang *epe* (pisang mentah yang dibakar di atas arang, kemudian dipipihkan, dan dicampur dengan air gula merah dan paling enak jika dimakan dalam keadaan masih hangat). Namun, warung-warung tenda yang menjajakan makanan laut tersebut telah direlokasi ke sebuah tempat yang tidak jauh dari kawasan wisata, sehingga kawasan Losari banyak berubah. Pemerintah Kota Makassar (Pemkot) telah mempercantik pantai tersebut dengan membuat anjungan seluas 100 ribu meter persegi sehingga tampak lebih indah, bersih, bebas polusi, dan nyaman untuk dikunjungi.

a) Jumlah Populasi Penjual Pisang Epe Di Pantai Losari

Berdasarkan data primer yang diperoleh oleh peneliti, dapat diketahui bahwa jumlah populasi penjual pisang *epe* saat ini yang berada di kecamatan Ujung Pandang yaitu sebanyak 64 penjual pisang *epe*, yang tersebar dalam 3 kelurahan, yaitu kelurahan Bulogading sebanyak 1

penjual, sementara ini di kelurahan Maluku sebanyak 26 orang penjual, serta di kelurahan Losari terhitung sebanyak 37 penjual.

Dari pemaparan diatas terlihat bahwa jumlah populasi penjual pisang *epe* sebagian besar terdapat di kelurahan Losari yaitu 37 orang.

b) Asal Daerah

Hasil data primer yang peneliti dapatkan menunjukkan bahwa para penjual pisang *epe* yang berada di kecamatan ujung pandang dengan 3 kelurahan yakni kelurahan Bulogading, Maluku, dan Losari berasal dari berbagai daerah. kemudian sebagian besar para penjual tersebut berasal dari daerah takalar, jeneponto dan daerah di sekitar kota Makassar yang tersebar di beberapa tempat untuk menjajakan pisang *epe* dari masing-masing penjual.

Daerah asal merupakan tempat kelahiran seseorang. Tempat awal sebelum melakukan migrasi ke daerah tujuan. Biasanya alasan seseorang untuk meninggalkan daerah asal mereka disebabkan oleh keinginan untuk memperbaiki taraf hidup khususnya dari segi perekonomian. Di daerah asal yang sarana dan prasarananya sangat minim juga menjadi salah satu alasan seseorang melakukan perpindahan.

Dalam suatu masyarakat pada setiap individunya selalu memiliki hak untuk hidup lebih baik yaitu sebuah pekerjaan dan pendidikan. Maka dari itu, banyak dijumpai seseorang melakukan migrasi ke kota-kota besar yang menjanjikan mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih

layak. Kota-kota besar seringkali digambarkan sebagai tempat yang tepat untuk memperbaiki kehidupan sosial dan ekonomi seseorang.

Sebagian besar penjual pisang *epe* tersebut merupakan kaum migran yang datang dari beberapa daerah seperti yang disebutkan sebelumnya. Para penjual ini lebih memilih untuk tinggal permanen (menetap) dibanding migran sirkuler (tidak menetap).

C. Pisang *Epe* Sebagai Makanan Khas Kota Makassar

Pantai Losari merupakan suatu pantai yang terletak di sebelah barat Kota Makassar, tepatnya di jalan penghibur, yang dipotong oleh Jalan Datu' Museng. Di ujung Jalan Datu' Museng sekitar 50 meter dari tepi pantai Losari dan sekitar jalan Lamadukelleng yang terdapat beberapa gerobak dagangan, menjual makanan khas lokal Makassar, yaitu pisang *epe*. Indonesia selain kaya akan ragam budayanya yang unik juga kaya akan wisata kulinernya, salah satunya jajanan khas Kota Makassar yaitu pisang *epe*. Jajanan khas yang sangat menarik untuk dinikmati oleh siapapun penikmatnya.

Pisang terbuat dari pisang kepok yang mengkal di panggang. Proses penyajiannya cukup cepat tidak sampai tiga menit. Awalnya pisang kepok di kupas kulitnya, berikutnya pisang itu dibakar diatas bara api sambil dibolak-balik hingga harum dan matang. Setelah matang pisang tadi diangkat dan disajikan dengan siraman lelehan air gula merah dengan campuran durian dan pandan. Selain itu penjual menyajikan beberapa pilihan variasi pisang *epe*, yaitu ditaburi keju serut, coklat serut,

dan kelapa parut. Seporsinya terdiri dari 3 potong pisang. Harga seporsi berkisar Rp. 6000 – Rp. 9000. Para penjual pisang epe mulai buka pada pukul 14.00 siang menjelang sore sampai pukul 23.00 Wita malam, tapi jika hari sabtu dan minggu para penjual biasanya berjualan hingga pukul 02.00 subuh.

Para penjual pisang epe sudah beberapa kali pindah lokasi berdagang. Kawasan pertama para penjual ini yaitu di daerah Pantai sekitaran jalan metro tanjung bunga Pantai Losari yang kini telah tergusur. Kemudian para penjual pindah ke Laguna dan akibat adanya renovasi pantai sehingga para penjual kemudian pindah kembali ke sekitaran Pantai Losari.

D. Tingkat Kesejahteraan Keluarga

Adapun indikator keluarga sejahtera adalah sebagai berikut:

1. Keluarga Pra Sejahtera, adalah keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, dan kesehatan.
2. Keluarga Sejahtera I, adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan keluarga secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial lainnya seperti pendidikan.
3. Keluarga Sejahtera II, adalah keluarga yang sudah mampu memenuhi dasar dan kebutuhan sosialnya tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan perkembangannya seperti menabung.

4. Keluarga sejahtera, adalah keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan sosial, dan kebutuhan perkembangan serta memenuhi kebutuhan yang bersifat pengembangan rutin kepada masyarakat.

E. Identitas Informan

Identitas Informan dalam penelitian ini, merupakan dasar untuk mengungkapkan lebih jauh, berbagai macam usaha dan aktifitas yang dilakukan oleh penjual pisang *epe* untuk mempertahankan hidupnya.

1. Umur

Umur merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam mengambil suatu peran dalam lingkungannya. Usia atau umur akan menentukan seseorang dalam menjalankan aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan hidup baik dirinya, maupun untuk anggota keluarga. Umur akan memberikan pengaruh besar terhadap seseorang mengenai bagaimana ia melakukan kegiatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan adanya variasi usia terhadap informan penjual pisang *epe* yang terdapat dalam tiga kelurahan yaitu kelurahan Bulogading, Maloku, dan Losari, yaitu :

Dapat diketahui bahwa infoman yang masih bekerja sebagai penjual pisang *epe* di pantai Losari Makassar di usia antara 50-55 tahun dengan jumlah informan 2 orang, dan begitupun juga dengan usia antara 35-45 tahun sama banyak dengan jumlah informan 2 orang, sedangkan informan pada usia antara 26-36 tahun sebanyak 1 orang dari 5 informan

yang diteliti. Namun berdasarkan hasil pengamatan, peneliti melihat beberapa penjual pisang *epe* yang berjualan disekitaran pantai losari dan jalan Lamadukelleng dengan umur kurang lebih 18 tahun.

2. Lama bekerja

Lama bekerja dapat mengatur kematangan dan kemampuan berkarya seseorang. Dimana kematangan dalam berkarya ini juga dipengaruhi oleh pengalaman yang diperoleh seseorang dalam menekuni suatu bidang pekerjaan.

Umumnya informan telah memiliki pengalaman bekerja yang cukup lama karena kebanyakan informan telah menekuni pekerjaan diatas 5 tahun. Bahkan ada yang mencapai 15 tahun ke atas menekuni pekerjaannya sebagai penjual pisang *epe*.

Pekerjaan merupakan suatu faktor yang sangat menentukan bagi seseorang untuk kelangsungan hidupnya, apabila bagi mereka yang telah berkeluarga atau berumah tangga. Demikian pula dengan masyarakat kecamatan ujung pandang yang berusaha memperoleh pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Tentunya setiap orang menginginkan pekerjaan yang baik, dalam artian bahwa pekerjaan tersebut tidak berat dan mempunyai penghasilan yang memuaskan, hal ini dapat dicapai bila potensi dan latar belakang individu mendukungnya. Jika seseorang mempunyai pendapatan yang rendah, maka orang tersebut cenderung mencari cara untuk meningkatkan pendapatan, seperti mencari pekerjaan sampingan atau tempat yang menguntungkan.

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam melihat pola hidup masyarakat. Kondisi pendidikan para penjual pisang *epe* di kota Makassar sangat rendah. Bahkan ada penjual pisang *epe* yang menempuh pendidikannya hanya di sekolah rakyat (SR) dan sekarang masih tetap menjadi penjual pisang *epe* walaupun sudah tua. Jika ada penjual pisang *epe* yang pendidikan terakhirnya maksimal SMP mereka sangat bersyukur karena menurutnya dulu sangat susah untuk menuntut ilmu karena selain memiliki sarana pendidikan yang terbatas mereka juga harus membantu orang tua mereka mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari atau karena tidak adanya biaya untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

Kondisi pendidikan yang rendahlah sehingga dapat mengakibatkan sebagian orang memilih menjadi penjual pisang *epe*. Di kota Makassar ada penjual pisang *epe* yang hanya tamat SD bahkan ada yang putus sekolah, seperti juga halnya dengan yang SMP, ada yang tamat dan ada yang putus sekolah. Bahkan sampai sekarang ada beberapa anak yang putus sekolah akibat dari kurangnya biaya sehingga anak tersebut lebih memilih untuk membantu orang tuanya berjualan pisang *epe*.

4. Agama

Dalam kehidupan sehari-hari, suatu agama merupakan indikator seseorang dalam bertingkah laku. Seseorang yang beragama merupakan pencerminan keseluruhan jiwa seseorang dalam kehidupannya.

Berdasarkan data primer yang diperoleh dari peneliti, menunjukkan bahwa beberapa penjual pisang *epe* yang berjualan di kecamatan Ujung Pandang beragama islam.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Penjual pisang *epe* studi lima keluarga di Pantai Losari Makassar maka kesimpulan yang penulis dapatkan antara lain sebagai berikut :

1. Faktor yang mendorong kaum urban dari daerah asal untuk bekerja sebagai penjual pisang *epe* di kota Makassar, yaitu: Pekerjaan disektor informal tidak langsung begitu saja dikerjakan oleh para pendatang dari daerah asal, akan tetapi adanya dorongan dan ajakan dari sanak keluarga dan teman yang membantu mencari pekerjaan ketika para pendatang dari desa berada di kota. Latar belakang kehidupan sosial para penjual pisang *epe* di pantai losari rata-rata berasal dari suku Makassar. Kebanyakan tingkat pendidikan yang dimiliki penjual pisang *epe* hanya sebatas SD dan SMP, sehingga mendorong mereka untuk terjun ke sektor informal. Karena bekerja di sektor informal tidak memerlukan pendidikan dan keterampilan yang tinggi.
2. Kondisi kehidupan penjual pisang *epe* dari lima keluarga, yaitu : Dari lima keluarga penjual pisang *epe*, hanya satu keluarga yang memiliki rumah sendiri dan empat keluarga lagi tinggal di rumah kontrak yang dibayar pertahunnya dengan air bersih dari

PAM dan listrik yang dibayar perbulan, kemudian tidak terpenuhinya empat sehat lima sempurna yang dikonsumsi perhari, dengan membeli pakaian baru pada waktu hari raya selain itu tempat beli pakaian para keluarga penjual pisang *epe* yaitu di pasar, selain itu kesehatan bagi penjual pisang *epe* sangat penting karena dengan kesehatan yang dimiliki mereka dapat memenuhi kebutuhan keluarga, dengan membayar sendiri biaya kesehatan di rumah sakit dan adapun yang mendapat kartu sehat dari pemerintah.

3. Persepsi penjual pisang *epe* terhadap pekerjaan di kota makassar, yaitu begitu sulit untuk mendapat pekerjaan yang dapat dijadikan mata pencaharian yang tetap namun kembali lagi ke dorongan dan ajakan dari sanak keluarga dan adanya keinginan yang kuat untuk bekerja sehingga lima keluarga menekuni dan menetap pada mata pencahariannya sebagai penjual pisang *epe* yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

B. Saran

1. Sektor informal yang bekerja sebagai Pedagang Kaki Lima khususnya para penjual pisang *epe*, tampaknya harus patut diperhitungkan dalam konteks permasalahan tenaga kerja secara umum. Tindakan bijaksana yang patut dilakukan oleh pihak terkait terhadap kaki lima khususnya penjual pisang *epe*

adalah bukan tindakan mematikan kesempatan kerja mereka tanpa mencari alternatif lain untuk tetap memperoleh penghasilan.

2. Bagi pemerintah daerah sebaiknya mengadakan pembinaan suatu unit usaha yang bertujuan mengembangkan kegiatan usaha pedagang kaki lima karena mereka adalah kelompok yang mempunyai potensi untuk menjadikan usahanya sebagai usaha formal. Selain itu, pemerintah harus meminimalisir jumlah pedagang kaki lima di pantai losari, karena tiap tahunnya akan semakin bertambah.
3. Kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan pedagang kaki lima khususnya penjual pisang *epe* sebaiknya membentuk suatu organisasi yang dapat menampung aspirasi mereka yang bertujuan untuk melindungi dan membantu para pedagang kaki lima dari segala macam hambatan yang dirasakan selama ini.
4. Dalam pembinaan dan pengembangan sektor informal sebaiknya saling mendukung dan berkesinambungan, baik pihak pemerintah yang terkait maupun dari pihak swasta mengingat peranannya dalam mengatasi ketenagakerjaan yang cukup besar.

Daftar Pustaka

- Abustam, Muhammad Idrus. 1989. *Gerak penduduk pembangunan dan perubahan sosial*, Jakarta: UI-Press.
- Andre Bayo Ala, 1996. *Kemiskinan dan Strategi Menangani Kemiskinan*. Yogyakarta : Liberty
- Djakti, Dorodjatun Kuntjoro. 1986. *Kemiskinan Di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Dahriani, 1995, *Potret Pedagang Kaki Lima di Pantai Losari Kotamadya Ujung Pandang* (skripsi). Program Strata Satu Universitas Hasanuddin.
- Damsar. 2009. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenata Media Group
- Effendi, Tadjuddin Noer, 1993, *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan*, Yogyakarta, Tiara Wacana
- Geertz, Clifford. 1989. *Mojokuto, Dinamika Sosial Sebuah Kota di Jawa*, Jakarta: Grafiti Press.
- Herlianto. 1997, *Urbanisasi, Pembangunan Dan Kerusuhan Kota*, Jakarta Bumi Aksara
- Jayadinata, J.T. 1999. *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah*, Bandung: ITB.
- Koentjaraningrat, 2005. *Pengantar Ilmu Antropologi*. PT. Rineka Cipta. Jakarta

- Manning, Chris dan Tadjuddin Noer Effendi. 1996. *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Moleong, Lexi J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja RosdaKarya.
- Munir, R. 2000. *Migrasi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Indonesia.
- Nas, d. P. J. M. 1979. *Kota di Dunia Ketiga: Pengantar Sosiologi Kota*. Jilid 1. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Parsudi Suparlan. 2004. *Masyarakat dan Kebudayaan Perkotaan : Perspektif Antopologi Perkotaan*. Jakarta : YPKIK
- Poerwandari E. Kristi, 2009 *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*. Jakarta : Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi
- Rachbini, Didik, J dan Abdul Hamid. 1994. *Ekonomi Informal Perkotaan Gejala Involusi Gelombang Kedua*, Jakarta : LP3ES
- Sardjito, 1989. *Laporan Penelitian Alternatif Pemecahan Masalah Pedagang Kaki Lima Pada Tata Ruang Fisik Kota Surabaya*.
- Shirvani, Hamid. 1996. *Proses Perencanaan Urbanisasi*, Edisi Revisi. Kanisius, Yogyakarta.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama. 2005.
- Suyanto, Bagong. 2010. *Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin*. Jakarta : Universitas Airlangga.

Internet :

www.fajar.co.id/read. Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar Tertinggi di Indonesia. Di akses pada tanggal 1 Maret 2013.

<http://azariansyah.wordpress.com/> Pengertian Urbanisasi (di akses pada tanggal 9 Maret 2013)

<http://daonlontar.blogspot.com/2013/02/pisang-epe-di-pantai-losari.html>.

Di akses tanggal 5 Mei 2013

LAMPIRAN





Gambar 2. Proses pembakaran pisang kepok diatas arang yang kemudian diolah menjadi pisang *epe*



Gambar 3. Proses pisang kepok yang telah dibakar kemudian di *epe* (dipipihkan)



Gambar 4. Pisang *epe* rasa coklat siap santap



Gambar 5. Pisang *epe* rasa keju siap santap



Gambar 6. Pisang *epe* ditambah dengan kuah gula merah siap santap



Gambar 7. Seorang informan yang akan menyajikan pisang *epe* untuk di santap oleh pelanggannya



Gambar 8. Penjual pisang epe yang sedang melayani pembelinya



Gambar 9. Wawancara dengan informan (Iwan)



Dari *Bounded System* ke *Borderless Society*: Krisis Metode Antropologi dalam Memahami Masyarakat Masa Kini¹

Irwan Abdullah

(Universitas Gadjah Mada)

Abstract

Society and culture can no longer be viewed as they have been in the past. Fundamental changes in group and cultural dynamics provide a new context with implications on how anthropological research must be done. A major change is the shift from the view of societies and cultures as bounded systems to the deterritorialization of culture. The author identifies three stages of change bearing upon agrarian cultures, i.e., market entry, market integration and market expansion. There is a new social reality wherein increasingly intensive mobility is enabled by transportation and communication, thus allowing movement across geographic and cultural boundaries. The author notes that the implications of this are manifold, i.e., a shift in the context for the production of meaning; the problem of the locus of culture; conventional methods of data collection that do not inform the anthropologist on how to handle data available from electronic media; the problem of representation and representativeness; and the matter of determining the unit of analysis in research.

Key words: culture change; cultural deterritorialization; research methods.

Pendahuluan: menuju antropologi lain

Katakanlah hampir 50 tahun yang lalu (1952), saat para antropolog masuk ke Mojokuto (Pare) dengan penuh semangat, mendatangi kota kecil dan desa-desa sekitarnya (Geertz 1998), masyarakat masih sangat mengenal batas-batas geografis dan simbolis mengenai perbedaan ‘kami’ dan ‘mereka’. Pada masa itu, orang Mojokuto tahu betul batas-batas abangan, santri, maupun priyayi: dari menyangkut di

mana mereka tinggal, ke mana mereka pergi sehari-hari, apa yang mereka minati, sampai kebiasaan-kebiasaan sehari-hari. Mereka pun bisa saling menjelek dengan mengacu pada identitas masing-masing: ‘*Mendung-mendung cap gomek, kudung-kudung digawe lemek*’ (lihat Geertz 1981:478).’ Pendek kata, siapa yang masuk *in-group* dan *out-group* merupakan sesuatu yang jelas, bukan saja karena kebiasaan dan sifat-sifat yang berbeda, melainkan juga karena lokasi tempat mereka tinggal jelas perbedaannya.

Mengenai sifat khas dari suatu masyarakat ini secara lebih jelas digambarkan Geertz (1992)

¹ Tulisan ini merupakan penerbitan ulang artikel yang sama dari Jurnal ANTROPOLOGI INDONESIA vol. XXIII, no. 60, 1999, hlm. 11–18.

dalam kasus Bali pada saat ia membicarakan sabung ayam:

Ketika kami berkeliling dengan rasa tak tentu, muram, ingin sekali diterima, orang-orang kelihatan menatap lurus ke arah kami dengan sorotan mata yang membidik beberapa meter di belakang kami pada batu atau pohon....Tetapi mereka berbuat seakan-akan kami tak ada Di tempat lain mana pun di Indonesia yang pernah saya kunjungi..., orang-orang memenuhi dari segala sudut untuk melihat saya dekat-dekat dan sering kali dengan perasaan yang terlalu menyelidik juga. Di desa-desa Bali, sekurangnya yang jauh dari lingkungan-lingkungan wisata, sama sekali tidak ada apa-apa yang terjadi. Penduduk terus bekerja, mengobrol, membuat sesajen-sesajen, melamun, menyunggi keranjang, sementara orang berkeliling desa merasa tak tentu (Geertz 1992:205-206).

Gambaran tentang bagaimana orang Bali memperlakukan pendatang atau 'orang lain' di sini ditunjukkan Geertz sebagai sesuatu yang khas Bali. Dari sini tampak kembali bagaimana batas-batas kultural itu begitu tegas bagi orang Bali yang membedakan dirinya dari orang lain.

Pengalaman Geertz hampir 50 tahun yang lalu itu telah menjadi pengalaman antropolog di Indonesia, bahkan di tempat-tempat lain, karena pengalaman itu telah dibagi dalam proses sosialisasi. Pengalaman semacam itu pulalah yang telah mempengaruhi 'cara' kita melihat apa yang dimaksud dengan masyarakat, kebudayaan atau agama dan berbagai manifestasinya. Masyarakat itu, seperti masyarakat Jawa, merupakan *bounded system* dengan batas-batas yang jelas. Pertama, faktor geografis menjadi penting dalam hal ini, karena pada saat orang Jawa atau orang Bali dibicarakan, pikiran kita secepat itu pula menuju ke suatu 'wilayah geografis', seperti pulau yang disebut Bali. Demikian juga, Jawa yang membawa kita ke suatu pulau atau, bahkan, ke tengah pulau itu. Pada saat Parsudi Suparlan menulis 'Orang Jawa di Suriname', kita mulai

sadar bahwa batas fisik/geografis itu menjadi kurang jelas kadang-kadang. Batas-batas itu pun semakin tidak jelas pada saat mobilitas orang menjadi demikian meluas dan intensif. Kedua, adanya faktor nilai yang dibagi bersama yang dianggap sebagai pengikat dalam membentuk masyarakat ke dalam suatu *bounded system*. Sistem ini memang menjadi sesuatu yang kuat yang bahkan direproduksi dalam *setting* sosial yang berbeda, seperti adanya 'Kampung Jawa' di Sumatera atau Pecinan di berbagai tempat. Sistem semacam ini pun telah menunjukkan pergeseran yang meluas saat batas-batas Kampung Jawa tadi atau Pecinan tidaklah sejelas sebelumnya akibat berlakunya prinsip-prinsip pengelompokan baru.

Dewasa ini masyarakat telah berubah sedemikian rupa, yang sangat disadari oleh Geertz sendiri (1998). Perubahan yang disebabkan oleh berbagai kekuatan dari dalam dan dari luar itu telah menyebabkan apa yang dikatakan masyarakat dan kebudayaan itu menjadi berbeda: Orang Jawa di Mojokuto tidak lagi dengan mudah dapat mengidentifikasi tetangganya sebagai 'abangan' atau 'santri' maupun 'priyayi'. Mereka yang dahulu disebut santri sekarang telah menjadi priyayi (priyayinisasi santri), atau yang dahulu disebut priyayi sekarang telah menjadi santri (santrinisasi priyayi). Ciri-ciri yang dahulu menjadi monopoli kelompok tertentu sekarang ini telah menjadi praktik umum walaupun tidak menghilang. Proses ini tentu saja mengubah batas-batas kelompok dan kebudayaan yang didefinisikan di dalam kelompok.

Perubahan yang mendasar dalam sifat kelompok dan dalam beroperasinya ciri-ciri suatu kebudayaan, merupakan konteks sosial budaya baru yang membutuhkan suatu respons dalam cara kerja penelitian antropologi. Apa implikasi perubahan konteks ini terhadap metode antropologi dan persoalan-persoalan

apa yang bakal dihadapi di masa mendatang, merupakan bahan diskusi dalam tulisan ini. ‘Antropologi lain’ yang bukan sekadar antropologi tentang ‘yang lain’ (*the other*) mulai dibutuhkan sejalan dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Untuk itu saya akan memulainya dengan memaparkan kondisi-kondisi objektif masyarakat kontemporer sebelum membicarakan implikasi-implikasi metodologis secara rinci.

Dari *bounded system* ke deterritorialisasi budaya

Masyarakat telah mengalami perubahan yang mendasar dalam berbagai aspek, sejak kultur agraris mulai dipertanyakan oleh kekuatan lain di luar dirinya. Perubahan ini paling tidak dapat dilihat pada tiga tahap.

Pertama, pada saat masuknya pasar ke dalam masyarakat petani yang mulai mempengaruhi kultur agraris, khususnya menyangkut tekanan ide dan praktik pasar yang tidak hanya mempengaruhi proses komodifikasi dari hasil-hasil pertanian (yang mengubah produksi subsistensi dan ‘barter’), tetapi juga telah memperluas jaringan sosial dan orientasi masyarakat ke luar desa. Ciri-ciri lokal mulai bergeser sejalan dengan melebarnya batas-batas interaksi dan batas pengetahuan penduduk. Sumber daya yang dapat dimobilisir pada masa ini menjadi lebih luas karena mulai melintasi batas desa. Calon pengantin bisa dari desa tetangga, tidak harus dicari hanya dari dalam desa sendiri. Penduduk tidak pula harus mempertahankan pola organisasi sosial yang terbatas, tetapi mulai dapat melibatkan ide dan sumber daya yang ada dari daerah sekitar. Penggunaan tenaga kerja dalam pertanian juga mulai masuk dari desa tetangga yang, tentu saja, kemudian mengubah bentuk-bentuk kewajiban sosial antaranggota masyarakat, akibat meluasnya batas-batas solidaritas sosial. Meskipun kepemimpinan lokal masih penting,

hubungan dengan dunia luar telah menyebabkan melemahnya keyakinan tentang sesuatu yang bersifat magis dan supernatural.

Kedua, terjadinya integrasi pasar, yakni pengaruh pasar menjadi lebih kuat sejalan dengan terikatnya penduduk ke dalam suatu tatanan yang lebih luas; ke dalam suatu ide, nilai, dan praktik yang berbau nasional. Selain barang-barang lokal yang mulai menyebar ke berbagai tempat akibat terintegrasinya ke dalam suatu pasar (nasional), barang-barang baru (pabrik) mulai masuk ke daerah-daerah yang secara langsung mulai mengubah pola kegiatan ekonomi penduduk. Kegiatan pertukangan, kerajinan, dan pertanian itu sendiri mulai ditujukan untuk menghasilkan komoditas yang memiliki nilai jual, sehingga suatu produk mulai dihubungkan dengan ‘permintaan pasar’ dan tentu saja dengan harga. Pada fase ini, batas-batas etnis (lokal) mulai mengabur, khususnya akibat perkawinan antaretnis yang mulai mendapatkan pengesahan. Stereotipe etnis mulai dipertanyakan keabsahannya. Perkawinan campuran yang terjadi antara etnis satu dengan yang lain tidak hanya mengubah citra etnis masing-masing, tetapi juga melahirkan anak yang mengalami kekayaan orientasi lokal dan nasional. Penduduk lokal dalam fase ini terkontaminasi dengan prinsip-prinsip totalitas yang menjadi ideologi nasional. Dalam bidang pertanian orang mulai mengenal program pembangunan pertanian; dalam kesehatan mulai dikenal puskesmas, dokter, obat, dan segala yang berbau nasional. Demikian pula kepemimpinan yang mulai dipraktikkan dengan aturan main yang sudah disiapkan secara nasional.

Ketiga, tahap perubahan yang disebut sebagai ekspansi pasar, yakni suatu perubahan pusat kekuasaan ke pasar dalam penataan sistem sosial. Orientasi tidak hanya bersifat nasional, tetapi meluas ke global dengan serangkaian nilai dan norma baru. Sumber daya

yang dapat dimobilisasi jauh lebih luas, seperti modal dan juga sumberdaya manusia. Perkawinan campuran tidak hanya terjadi antaretnis, tetapi juga antarbangsa, antarorang yang memegang paspor yang berbeda atau berlainan kewarganegaraan. Komunikasi merupakan kata kunci di sini akibat batas-batas ruang yang relatif sejalan dengan perbaikan transportasi dan teknologi komunikasi. Pasar, dalam hal ini, muncul sebagai kekuatan dalam membangun 'dunia' kehidupan sehari-hari, dengan memindah-mindahkan batas dan ikatan tradisional mengikuti logika berpikir pasar. Perkampungan yang semula lebih berorientasi pada etnis (Kampung Jawa, Kampung Arab, Pecinan) dan agama sebagai alat identifikasi dan pemosisian diri, berubah ke dalam suatu pola organisasi ruang dan identifikasi diri yang berbeda: Bumi Serpong Damai, Lippo Cikarang, Bumi Mataram Sejahtera, Merapi View, dan berbagai nama yang indah dan damai. Pengaturan ruang semacam ini lebih didasari oleh daya beli penduduk, sehingga kekuatan ekonomi lebih menjadi alat atau faktor dalam identifikasi diri dan sosial.

Tahap yang ketiga merupakan tahap yang lebih kurang sedang dialami dengan prinsip-prinsip diferensiasi yang lebih kuat dibandingkan totalitas. Ketiga proses tersebut sesungguhnya telah menegaskan suatu perubahan masyarakat yang begitu jauh bergeser dari tatanan lama. Suatu tatanan baru yang lahir tidak hanya merupakan suatu bentuk dan gaya yang baru yang dianut oleh masyarakat, tetapi juga suatu cara baru di dalam melihat diri sendiri dan orang lain di dalam konteks yang berbeda. Hal ini terkait dengan pencarian makna seperti yang dikatakan Berger dan Luckmann (1979) dan Geertz (1973) yang terikat pada kelompok atau komunitasnya. Sifat-sifat komunitas inilah yang bergeser dewasa ini, sehingga *ground* untuk basis pemaknaan tersebut menjadi hal yang bersifat *problematis*.

Perubahan-perubahan yang digambarkan di atas dapat dipertegas dengan melihat berbagai fakta. Pertama, munculnya mode produksi baru dalam kehidupan penduduk. Adanya pilihan-pilihan itu telah menyebabkan terjadinya diferensiasi di antara mereka. Komunalisme mulai runtuh dalam penataan sosial secara umum yang memunculkan bentuk-bentuk solidaritas baru dengan logika yang berbeda, sesuai dengan agen sosial yang terlibat dalam proses konstruksinya. Nilai tidak lagi dikonstruksikan dengan harmonis, tetapi dengan serangkaian negosiasi yang melibatkan agen yang berbeda. Masyarakat yang tadinya dihadapkan dengan negara, kemudian terlibat dalam jaringan yang lebih kompleks yang melibatkan pasar. Relasi antara *state*, *market*, dan *society* inilah yang menjadi basis ideologi bagi praktik-praktik sosial. Dalam hal ini, setiap simbol mengalami negosiasi makna.

Kedua, melemahnya ikatan-ikatan tradisional, seperti berubahnya hubungan antargenerasi dan perkawinan, sehingga kultur kehilangan kontrol terhadap pembentukan suatu tipe sistem sosial. Otoritas tradisi, dalam hal ini, mulai melemah yang digantikan dengan rasionalitas yang kemudian menjadi pegangan dalam setiap pengambilan keputusan. Orang tua (akibat perubahan hubungan antargenerasi) atau pemimpin mulai kehilangan otoritas tradisional dalam berhubungan dengan masyarakat, sehingga kontrol hanya dapat dilakukan dengan instrumen kekuasaan modern yang lebih kompetitif dan berdasarkan negosiasi. Dalam konteks semacam ini, sub-sub kebudayaan mencari sistem referensinya sendiri.

Ketiga, posisi mesin dan teknologi menjadi semakin penting dari waktu ke waktu, yang cara kerjanya dan nilai-nilai yang melekat sangat mempengaruhi ritme kehidupan dan norma-norma yang terbentuk. Proses dehumanisasi yang telah menjadi suatu mode pembicaraan



tentang dampak teknologi pada tahun 1980-an, telah melahirkan apa yang disebut Foucault sebagai *the death of the subject*. Proses ini menentukan bagaimana struktur hubungan antarorang diberi makna. Apakah kehadiran *handphone* (seperti dalam iklan) memang dapat menggantikan kehadiran suami dalam proses melahirkan anak? *Electronic space* seperti *automatic teller machine* (ATM), *handphone*, *video game*, komputer, dan internet telah mengurangi hubungan *face to face* secara substansial.

Realitas sosial baru dan krisis identitas antropologi

Transportasi dan komunikasi telah memungkinkan terjadinya proses mobilitas yang semakin intensif dengan gerakan orang dan imajinasi yang meninggalkan batas-batas geografis dan kultural. Proses mobilitas ini merupakan proses sosial yang paling penting di abad ke-20 (Appadurai 1994) yang akan menjadi basis dalam pembentukan tatanan baru pada milenium ketiga. Konteks perubahan ini merupakan suatu dasar dari evaluasi kemampuan metode antropologi dalam usahanya *'to understand the native's point of view'*. Tiga isu perlu didiskusikan secara seksama sejalan dengan usaha mengevaluasi kemampuan metode antropologi tersebut.

Pertama, persoalan pada tataran analisis pada saat konteks pendefinisian dan pemaknaan mengalami pergeseran. Pada saat Geertz mengatakan bahwa kebudayaan merupakan *'...historically transmitted pattern of meanings embodied in symbols, a system of inherited conceptions expressed in symbolic forms by means of which men communicate, perpetuate, and develop their knowledge about and attitudes toward life'* (Geertz 1973: 89),⁹ sesungguhnya kebudayaan itu memiliki batas wilayah tempat sekelompok orang mencari makna atas simbol-simbol. Dengan cara

ini, budaya bersifat generik yang menuntun tingkah laku melalui simbol-simbol. Karena itu, baik simbol dan tingkah laku akan dapat dimaknai dengan analisis konteks tempat simbol itu dibangun. Persoalan yang dihadapi dalam transformasi masyarakat tingkat ketiga, konteks tidak dibentuk oleh agen tunggal, tetapi oleh berbagai agen dengan kepentingannya yang berbeda-beda. Karena itu, suatu simbol tidak lagi merupakan pemadatan terhadap suatu makna, tetapi berbagai makna yang tergantung pada kelompok sosial yang diacu. Proses ini telah melahirkan privatisasi berbagai praktik sosial dengan pemaknaan yang berbeda dari konteks *general*. Sejalan dengan ini, kebudayaan yang diyakini sebagai nilai-nilai yang terbagi tidak dapat lagi dijadikan alat dalam analisis keberadaan suatu simbol dan praktik sosial, karena logika individual selain mengalami pemisahan dari konteks *general*nya, juga mengalami pengayaan melalui komunikasi yang terbuka.

Dalam contoh semacam ini kita akan mengalami kesulitan menjelaskan perilaku sosial seseorang; kapan kita bisa menganalisis suatu praktik dalam kebudayaannya—seperti kebudayaan Jawa, Batak, atau kebudayaan Cina—pada saat proses enkulturasi dan sosialisasi yang berlangsung tidak lagi didominasi oleh agen tradisional, seperti orang tua, pemimpin agama dan adat. Konstruksi nilai telah dilakukan secara sangat kompetitif antara agen-agen yang berbeda: keluarga, adat, pemerintah, dan pasar. Nilai yang saling bertentangan merupakan fakta yang sah dalam kehidupan sosial.

Kedua, masalah yang berkaitan dengan hal tempat kita dapat menemukan kebudayaan itu sendiri. Rumah Jawa bisa dilihat pada bentuknya (*joglo*) dengan pembagian ruang yang ada. Cara yang sama sulit untuk dilakukan, pada saat orang Jawa mulai membangun rumah modern ala Spanyol. Bukankah rumah Jawa itu

dikonstruksikan pada saat orang Jawa punya anak banyak, yang pada saat terjadi penurunan angka kelahiran, bentuk pembagian ruang juga mengalami pergeseran? Dimensi penjelasan suatu kebudayaan sebagai alat untuk memberi arti menjadi sesuatu yang bermasalah. Menemukan kebudayaan jauh lebih mudah pada masa lalu dibandingkan dengan masa kini, karena simbol-simbol yang digunakan menegaskan *cultural boundary* induknya. Pada saat simbol-simbol mencair akibat proses kontekstualisasi terhadap konteks sosial dan kepentingan pemiliknya secara dinamis (Alam 1998:5), maka pengertian-pengertian dalam penelitian harus dicari pada '*internal significance*' atau logika internal, bukan lagi pada sistem referensi yang memisahkan sistem budaya dari realitas sosial (Asad 1983; Alam 1998:4).

Ketiga, teknik pengumpulan data. Dengan revolusi sistem komunikasi dan lahirnya realitas multi-media, perlu disadari tentang adanya dunia bermain di luar dunia empiris. Apakah antropologi dapat menjadi bagian dari tatanan media tersebut? Apakah kita dapat terus bersandar pada teknik-teknik konvensional pada saat data begitu banyak dapat dikumpulkan melalui telepon atau internet? Apakah mungkin wawancara dilakukan dengan telepon atau melalui internet, yang tidak memungkinkan kita untuk mengidentifikasi secara visual wajah orang, gerak geriknya, warna kulitnya, yang sebelumnya telah merupakan bagian dari sensibilitas etnografis? Bagaimana menganalisis data wawancara dengan cara itu jika kita tidak tahu konteks tempat ia berada, berapa jauh dari sini, dalam konteks sosial yang mana dia menjadi bagian?

Keempat, masalah representasi: dari siapa data diperoleh. Dalam hal ini perlu dipertanyakan: siapa yang layak dijadikan informan kunci. Apakah informan ini dapat menjadi wakil dari kelompoknya, mengingat pengalaman indi-

vidual dan sosial mereka dapat sangat berbeda? Bagaimana seseorang dipilih: apakah berdasarkan jender, usia, lapisan sosial, lokasi yang diwakilinya, profesi, atau keanggotaan kelompok? Logika memilih informan kunci perlu dipikirkan ulang, karena seorang informan tidak bisa merefleksikan orang lain jika dia tidak memiliki pengalaman yang sama dengan orang lain (perubahan masyarakat menyebabkan mereka memiliki pengalaman yang beragam), dan bersifat individualistik. James Spradley (1997), misalnya, menunjukkan bahwa enkulturasi merupakan syarat penting untuk memilih informan. Dalam kasus seorang informan, Spradley mengatakan, 'Sandy merupakan informan yang baik hanya mengenai satu hal: pengalaman belajar sebagai seorang pelayan wanita sebuah warung minum (Spradley 1997:62).' Dalam hal ini, Sandy 'hanya' terenkulturasi untuk pengetahuan dan pengalaman tertentu, sehingga ia hanya layak dijadikan informan untuk bidang itu. Variasi dan diferensiasi pengetahuan masyarakat mengharuskan ketelitian yang lebih dalam memilih informan.

Kelima, masalah unit analisis. Apakah unit analisis mikro yang menjadi '*trade mark*' masih dapat dipertahankan mengingat kasus-kasus yang diteliti tidak lagi mampu menjelaskan sistem yang diwakilinya? Di satu sisi, satu keluarga atau individu dapat mewakili bukan kultur, melainkan subkulturnya (atau sub-sub kultur). Hal ini menyebabkan studi antropologi menjadi studi tentang 'keunikan' yang tidak memiliki implikasi dalam suatu sistem yang lebih luas. Di sisi lain, penjelasan kasus pada unit tertentu dapat berarti meneliti wakil dari suatu dunia yang begitu luas yang disebut *global community*. Apakah keberadaan unsur-unsur global pada seorang individu perlu dan mampu dijelaskan? Dahulu, dengan mudah kita mengatakan '*cultural man*' untuk menunjukkan berlakunya suatu kosmologi atau nilai dengan

referensi kultural yang jelas (seperti budaya Jawa). Bagaimana ciri mikroskopis dapat dioperasikan dalam konteks yang berubah, dan apakah ciri antropologi sebagai suatu disiplin ilmu masih ingin dipertahankan pada kecenderungan tersebut? Arti holistik pada saat kasus bukan lagi menjadi bagian dari *bounded system*, melainkan bagian dari sistem yang tidak jelas batasnya. Secara faktual, batas-batas kultur mengalami perluasan.

Penutup: catatan untuk ke lapangan

Perubahan mendasar yang sedang dan akan berlangsung dalam masyarakat tempat antropolog mendefinisikan bidang penelitiannya, mensyaratkan adanya penyesuaian dalam cara kerja penelitian antropologi. Cara-cara konvensional harus dimodifikasi agar penelitian antropologi tidak terperangkap kembali dalam kategori penelitian yang bersifat 'primitif' dan 'eksotis' (Marcus 1998). Hal ini juga mengingat posisi antropologi sebagai disiplin ilmu yang memberikan dasar bagi pengembangan dan pengujian teori-teori, sehingga keberhasilannya merekam sifat dan hakikat suatu fenomena akan berpengaruh dalam studi-studi lanjutan. Sejalan dengan kebutuhan di atas, ada beberapa hal yang dapat menjadi catatan sebelum sebuah penelitian lapangan dilakukan.

Pertama, perlunya pendefinisian ulang 'tempat' di mana suatu studi antropologi dilakukan. Dalam hal ini, proses kontekstualisasi penelitian dengan perkembangan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendefinisikan lokasi di mana wilayah data akan dikumpulkan. Dengan cara ini, studi antropologi akan berpindah dari studi '*culture area*' ke studi '*subculture area*' yang tidak terikat pada batas-batas geografis. Studi ini dapat bersifat lintas batas, baik itu batas desa, kota, atau wilayah. George Marcus (1998) menyebutnya sebagai '*multi-sited research*' yang memungkinkan dilakukannya ekspansi dan inovasi dalam

deskripsi antropologi. Marcus (1998:14) menyatakan bahwa:

...within a multi-sited research imaginary, tracing and describing the connections and relationships among sites previously thought incommensurate is ethnography's way of making arguments and providing its own contexts of significance...

Penelitian antropologi perlu terbuka dengan data (daerah) lain, dan perlu imajinasi dengan konteks yang berbeda untuk melahirkan kekayaan-kekayaan dalam interpretasi. Basis interpretasi harus lebih mengarah pada pusat-pusat enkulturasi dan sosialisasi baru yang harus didefinisikan kembali dalam konteks lokal, nasional, atau global.

Kedua, sejalan dengan meningkatnya diferensiasi, maka persoalan representasi dalam penelitian menjadi penting. Bagaimana '*the other*' mampu dihadirkan bukan sebagai 'orang lain', melainkan dengan pengakuan-pengakuan keberadaan mereka dengan rasionalisme sendiri. Lincoln dan Denzin (1994) dalam hal ini mengatakan bahwa mengakui keberadaan mereka berarti '*...presenting to the inquiry and policy community a series of autohistories, personal narratives, lived experiences, poetic representations, and sometimes fictive and/or fictional texts*' (Lincoln dan Denzin 1994:577). Konteks ini menyebabkan peneliti tidak lagi perlu menggunakan istilah *native* untuk menunjuk kepada kelompok tertentu, karena istilah itu mengandung bias yang cukup kuat. Dalam hal ini pula otoritas peneliti mengalami gugatan, karena kesalahan dalam interpretasi akan mewarnai karakter kelompok yang dibangun. Untuk itu, analisis harus dilakukan lagi dengan melihat jaringan makna secara internal, tidak bisa dijelaskan dari suatu kultur yang ada di luar dan tidak diacu oleh kelompok.

Ketiga, masalah teknologi media yang mempengaruhi penelitian antropologi. Bukan

hanya *notebook* komputer yang dapat dibawa ke lapangan dan komputer yang lebih cepat dalam memroses data, tetapi juga *software* yang beragam telah dikembangkan untuk analisis data dan teks etnografis. Sage Publications edisi Spring/Summer 1999, misalnya, menginformasikan *software* NVivo (untuk analisis penelitian kualitatif), Code-A-Text (untuk analisis dialog), atau Ethnograph (untuk analisis data etnografi). Kamera video mampu memindahkan lapangan penelitian ke rumah. Hal lain yang paling mengesankan, mungkin, adalah sistem e-mail yang telah membentuk

'komunitas baru' dan menjadi bagian dari *virtual community*. Dunia sosial-elektronis ini, yang berpenduduk begitu padat, telah mengubah konsep komunitas itu sendiri (Lincoln dan Denzin 1994:583). Hubungan peneliti dengan yang diteliti dalam realitas teks internet semacam ini tidak jelas sama sekali, karena aktor telah menyiapkan teks bagi peneliti; atau aktor telah direpresentasikan dengan cara yang tidak jelas oleh agen tertentu. Hal tersebut menyebabkan usaha memahami manusia dan realitas sosialnya mengalami banyak hambatan.

Referensi

- Alam, B.
1998 'Globalisasi dan Perubahan Budaya: Perspektif Teori Kebudayaan', *Antropologi Indonesia* 21(54):1-11.
- Appadurai, A.
1994 'Global Ethnoscapes', dalam R. Fox (peny.) *Recapturing Anthropology*. Santa Fe: School of American Research Press. Hal.191-210.
- Asad, T.
1983 'Anthropological Conceptions of Religion: Reflection on Geertz,' *MAN* 18 (2):237-259.
- Berger, P. dan T. Luckmann
1979 *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Penguin Books.
- Geertz, C.
1973 *Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.
1981 *Abangan, Santri dan Priyayi*. Jakarta: Pustaka Jaya.
1992 *Tafsir Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
1998 *After the Fact: Dua Negeri, Empat Dasawarsa, satu Antropolog*. Yogyakarta: LKiS.
- Lincoln, Y.S. dan N.K. Denzin
1994 'The Fifth Moment' dalam N.K. Denzin dan Y.S. Lincoln (peny.) *Handbook of Qualitative Research*. London: Sage Publications.
- Marcus, G.
1998 *Ethnography through Thick and Thin*. Princeton: Princeton University Press.
- Spradley, J.
1997 *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.